



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**LKj**

**Laporan Kinerja Provinsi Jambi**

**Tahun 2016**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *Bab I Berisi:*

- 1.1 *Latar Belakang*
- 1.2 *Gambaran Umum Daerah*
  - 1.2.1 *Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan*
  - 1.2.2 *Kondisi Geografi dan Demografi*
  - 1.2.3 *Kondisi Ekonomi*
- 1.3 *Isu Strategis*

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk menjamin pemerintahan telah berjalan demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Jambi Tahun 2016 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Sedangkan pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

### 1.2 Gambaran Umum Daerah

#### 1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 57 dan 58, penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Provinsi Jambi berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

### 1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi

Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 4.445,94 Km<sup>2</sup> serta dengan panjang garis pantai 223,025 km. Luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.508 km<sup>2</sup> atau sebesar 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.205 km<sup>2</sup> dan 5.948 km<sup>2</sup>.

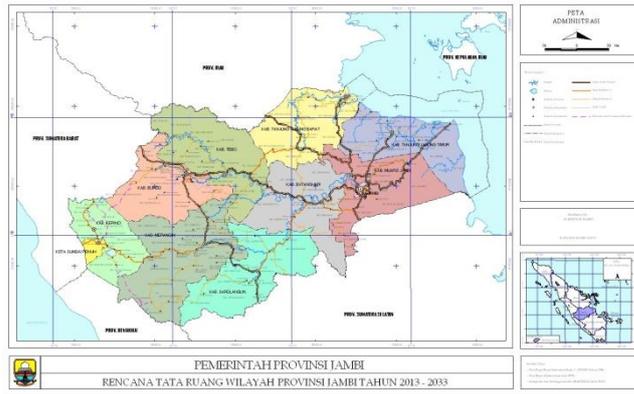
Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota		Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Kerinci		3.334,99
2	Merangin		7.508,23
3	Sarolangun		5.948,73
4	Bungo		4.673,16
5	Tebo		6.205,81
6	Batanghari		5.536,86
7	Muaro Jambi		5.321,67
8	Tanjung Jabung Barat	Darat	4.990,95
		Laut	384,21
9	Tanjung Jabung Timur	Darat	4.943,36
		Laut	4.061,73
10	Kota Sungai Penuh		353,76
11	Kota Jambi		172,26
<b>Jumlah daratan</b>			<b>48.989,98</b>
<b>Jumlah lautan</b>			<b>4.445,94</b>
<b>Total</b>			<b>53.435,92</b>

Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

#### 1.2.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0° 74'– 2° 46,16' Lintang Selatan dan 101° 12' – 104° 44' Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam



Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Jambi

rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).

### 1.2.2.2 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 1.2 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 - 100 )	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari Sebagian Sarolangun, Tebo,
Dataran sedang (100 - 500)	903.180	17	sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (> 500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

### 1.2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi:

- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah:

- Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
- Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh
- Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur
- Kawasan strategis Bangko – Sarolangun

Sementara Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

- Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi
- Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci.

Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

### 1.2.2.4 Kondisi Demografi

Proyeksi penduduk Provinsi Jambi tahun 2016 adalah sebanyak 3.358.926 jiwa dengan jumlah terbesar berada di Kota Jambi dan jumlah terkecil di Kota Sungai Penuh. Proyeksi penduduk Provinsi Jambi Tahun 2016 menurut kabupaten/kota dan kelompok umur selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3.

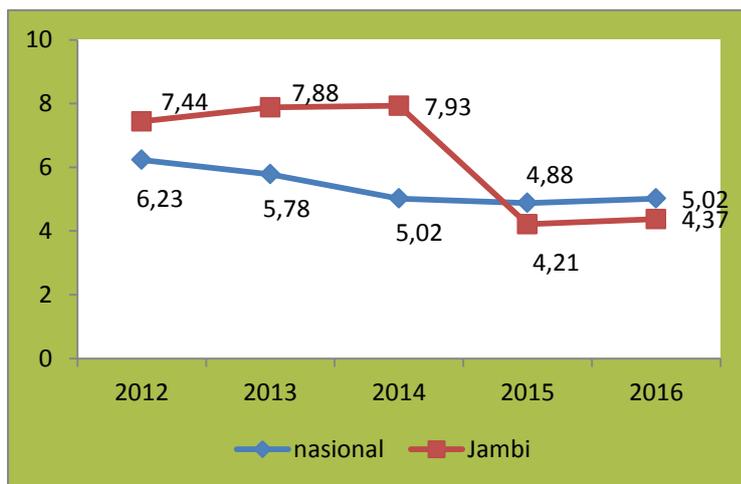
Tabel 1.3 Proyeksi penduduk Provinsi Jambi Tahun 2016 menurut kabupaten/kota dan kelompok umur

Kabupaten/ Kota	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-75	75+	JUMLAH
Provinsi Jambi	323.535	319.675	318.316	303.863	301.726	304.293	296.349	287.242	253.132	210.170	172.065	135.566	94.012	59.246	38.929	40.807	3.458.926
1 Kerinci	18.372	18.934	20.804	18.492	15.804	17.260	19.528	19.596	16.749	16.263	15.253	13.998	8.888	5.971	4.388	5.502	235.802
2 Merangin	35.739	35.954	36.142	32.814	32.676	33.679	31.735	29.977	26.109	22.334	18.476	13.667	9.733	5.942	3.705	3.523	372.205
3 Sarolangun	28.986	28.176	28.455	25.898	24.261	24.877	24.117	22.839	19.742	16.700	12.904	9.904	6.765	4.298	3.010	3.269	284.201
4 Batanghari	25.788	25.083	24.323	23.462	23.595	23.221	22.369	21.822	19.939	16.067	12.714	9.785	6.542	3.925	2.579	2.682	263.896
5 Muaro Jambi	39.315	38.014	36.970	35.782	37.541	37.727	36.875	35.762	31.822	24.590	18.513	14.191	9.844	5.788	3.720	3.883	410.337
6 Tanjab Timur	18.784	18.820	19.220	17.733	17.379	18.452	17.487	17.913	15.886	13.241	11.303	9.270	8.211	4.999	3.445	3.173	215.316
7 Tanjab Barat	31.056	31.184	29.816	26.988	26.656	28.208	27.958	27.971	23.429	18.056	14.274	10.987	8.602	5.068	3.264	3.294	316.811
8 Tebo	32.501	32.555	32.027	29.098	29.317	31.230	29.263	27.017	24.078	19.297	16.210	12.650	8.579	5.557	3.735	3.908	337.022
9 Bungo	35.244	33.943	33.882	31.980	32.401	31.851	28.914	27.305	24.130	20.342	17.275	12.982	8.402	5.502	3.599	4.126	351.878
10 Kota Jambi	50.359	49.319	48.624	54.429	56.043	51.344	50.676	49.718	44.993	37.561	29.898	23.235	15.462	10.077	6.009	5.740	583.487
11 Kota Sungai Penuh	7.391	7.693	8.053	7.187	6.053	6.444	7.427	7.322	6.255	5.719	5.245	4.897	2.984	2.119	1.475	1.707	87.971

### 1.2.3 Kondisi Ekonomi

#### 1.2.3.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada 2016 sebesar 4,37 %, mengalami peningkatan 0,16 poin dibandingkan tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,02.

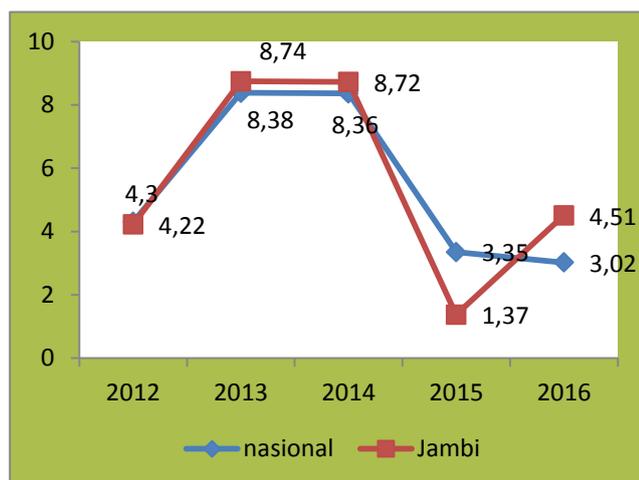


Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mulai mengalami penurunan sejak tahun 2015 akibat kondisi ekonomi dunia yang lesu diiringi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang juga mengalami penurunan, menurunnya harga minyak dunia serta peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2016 kondisi ini mulai membaik, seiring dengan membaiknya harga produk-produk sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi.

#### 1.2.3.2 Inflasi

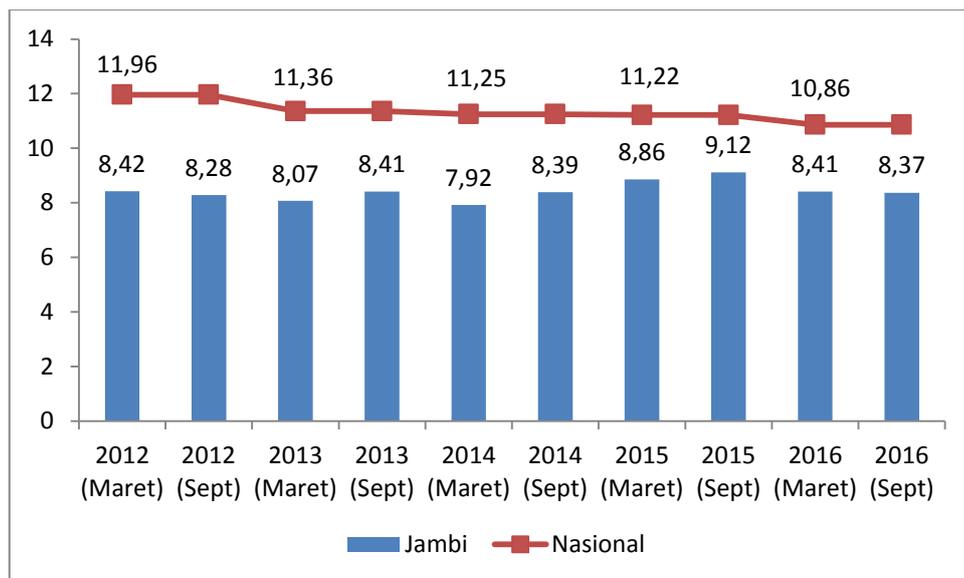
Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Provinsi Jambi Tahun 2016 adalah 4,51, di atas tingkat inflasi nasional yang berada pada 3,02. Inflasi ini meningkat bila dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 yang hanya sebesar 1,37. Hal ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada 4 kelompok pengeluaran yaitu kelompok perumahan, listrik, air dan gas; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan.



Gambar 1.3 Inflasi Provinsi Jambi dan Nasional

### 1.2.3.3 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyakkasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.



Gambar 1.5 Angka Kemiskinan Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2012-2016

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, dalam kurun waktu Maret-September 2016, di Provinsi Jambi terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1.000 jiwa, yaitu dari 289,81 ribu pada Maret 2016 menjadi 290,81 ribu pada September 2016, tetapi secara relatif terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 8,41% pada Maret 2016 menjadi 8,37% pada September 2016.

### 1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. **Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.** Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, *e-government system* belum optimal dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.** Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan **revolusi mental**.
3. Predikat **Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia** merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.
4. **Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.** Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
5. **Ketersediaan dan kualitas infrastruktur** umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai tingginya** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari **poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).**
8. **Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif** berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
9. **Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs.**

Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

10. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
11. **Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan** merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### *Bab II Berisi:*

- 2.1 *Rencana Strategis*
- 2.1.1 *Visi dan Misi*
- 2.1.2 *Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama*
- 2.2 *Perjanjian Kinerja*

### 2.1 Rencana Strategis

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana strategis daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :

#### **“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”**

##### **JAMBI TUNTAS 2021**

- Tertib:** diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.
- Unggul:** Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman:** Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh:** Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Adil:** mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Sejahtera:** mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis .
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah
6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

## 2.1.2 Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja Utama

### 2.1.2.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah :

- 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
- 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan

- 4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
- 5 Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
- 6 Meningkatkan kualitas SDM perempuan
- 7 Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
- 8 Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
- 9 Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
- 10 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
- 11 Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
- 12 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

#### 2.1.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
6. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
7. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum
9. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)
10. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
11. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
12. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
15. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
16. Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan

17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
19. Menurunnya angka kemiskinan
20. Menurunnya angka pengangguran
21. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi

**2.1.2.3 Indikator Kinerja Utama**

Sebagai alat pengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka ditetapkan indikator kinerja utama dan target yang akan dicapai. Adapun indikator kinerja utama dan target masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	Target	
				2016	Kondisi Akhir 2021
<b>Visi: Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera</b>					
<b>MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik</b>					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	CC	CC	BB
		Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
		Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah	109,26	109	100,93
		Indeks transparansi Pemerintah	6,32	6,4	7,05
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	IKM	B	B	A

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	Target	
				2016	Kondisi Akhir 2021
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.					
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	70,43	70,5	72
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	359	359	356
		Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	34	34	32
		Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (persen)	19.7 (Riskesdas 2013)	17	15
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan	meningkatnya kualitas Pendidikan Menengah	Tingkat kelulusan SMA dan SMK	94%	99%	99,50%
Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	10	20	70
	Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	76,67	80,47	99,47
Meningkatkan kualitas SDM Perempuan	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	IPG	87,88	90	95,01
		IDG	61.93	62,01	67,01

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	Target	
				2016	Kondisi Akhir 2021
<b>MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat</b>					
Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Kebebasan Sipil	75,89	76	77,9
<b>MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</b>					
Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	TFP	NA	1	1,5
	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase peningkatan share sektor Sekunder terhadap PDRB	32,00%	32,50%	37,00%
Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.208	3.217
	Meningkatnya Indeks Pertanaman pada lahan Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman: - IP 200 - IP 300	(35.061 Ha)  (1.400 Ha)	1,2  1,4	1,2 (37.662 Ha) 1,4  (1.521,79 Ha)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	Target	
				2016	Kondisi Akhir 2021
MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan					
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum	akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	73,51	74,59	80
		Jalan dalam kondisi mantap	75,56	76,18	82,52
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	81,5	85	96
	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75	67%	95%
		persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35%	73%	95%
Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan	persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	NA	6%	20%
	Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	NA	10,50%	75%
		persentase peningkatan perusahaan proper hijau	5,77	7,5	15

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	Target	
				2016	Kondisi Akhir 2021
		Persentase peningkatan industri ekowisata	7%	7,5	10%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Indeks tata kelola hutan	33	34	50
		Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	(130.000 Ha)	23,10%	50% (10.000 Ha)
		persentase penurunan luas lahan kritis	(1.420.602 Ha)	0%	2% (1.284.112 Ha)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	52,74	52,84
<b>MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat</b>					
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,12	8,35	7,09
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	4,20%	4,00%	2,50%
	Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	2,17	1,82

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang terukur. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien seiring peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Nilai SAKIP	CC
		2. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		3. Efisiensi Pengelolaan keuangan daerah	109
		4. Indeks transparansi pemerintah	6,4
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan menengah, kesadaran dan pengetahuan dalam pengembangan seni budaya serta kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	1. Usia Harapan Hidup	70,5
		2. Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	359
		3. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	34
		4. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (persen)	17
		5. Tingkat kelulusan SMA dan SMK	99%
		6. HAKI karya seni	20
		7. Indeks Kebebasan berkeyakinan	80,47
		8. IPG	90
		9. IDG	62,01
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	1. Indeks Kebebasan Sipil	76

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) guna mendukung perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah serta terwujudnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal melalui peningkatan indeks pertanaman tanaman pangan	1. TFP	1,0
		2. Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	3208
		3. Indeks Pertanaman: - IP 200 - IP 300	- 54,0% - 4,1%
		4. Persentase share sektor sekunder terhadap PDRB	32,5%
5.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi, energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	1. Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	74,59
		2. Jalan dalam kondisi mantap	76,18
		3. Rasio elektrifikasi	85
		4. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	67%
		5. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73%
6.	Meningkatnya pengelolaan energi dan SDA yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal sehingga terwujud pengelolaan DAS yang berkualitas	1. Persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	6%
		2. Persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat <i>good mining practice</i>	10,5%
		3. Persentase peningkatan perusahaan proper hijau	7,5%
		4. Persentase peningkatan industri ekowisata	7,5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Indeks Tata Kelola Hutan	34
		6. Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	23,1% (30.030 ha)
		7. Persentase penurunan luas lahan kritis	1% (14.206 Ha)
		8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,74
7.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial ekonomi	1. Angka Kemiskinan	8,35
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,0
		3. Laju Pertumbuhan Penduduk	2,17

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Berisi:

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1. Capaian IKU

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2. Indikator Kinerja lainnya

3.3. Realisasi Anggaran

### 3.1 Capaian Kinerja

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi pada perubahan yang lebih baik, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai rumusan perubahan baik pada keluaran maupun dampak yang dihasilkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good government* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai pengejawantahan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah faktor kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam hal ini, aturan perundangan-undangan yang dipakai sebagai pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tingkatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 - $\geq$ 100	Sangat Tinggi	
2	76 - 90	Tinggi	
3	66 - 75	Sedang	
4	51 - 65	Rendah	
5	$\leq$ 50	Sangat Rendah	

### 3.1.1 Capaian IKU

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Pencapaian IKU Gubernur Jambi sampai dengan tahun 2016 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

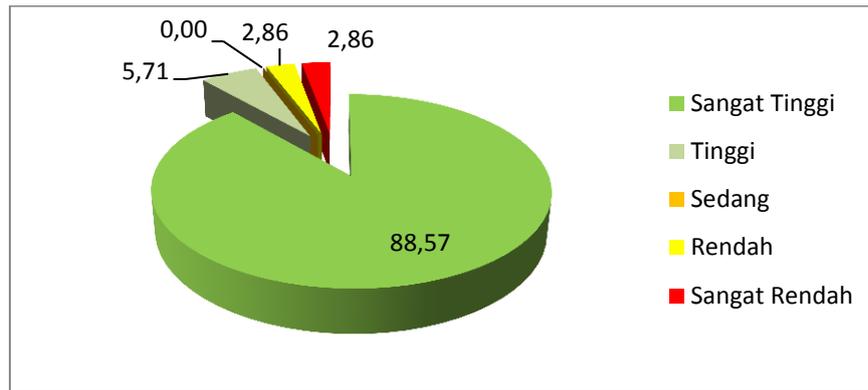
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2016

No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2016			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai SAKIP	CC	CC	CC	100	BB	75,52
2	Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
3	Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah	109,26	109,0	97,08	110,94	100,93	103,82
4	Indeks transparansi Pemerintah	6,32	6,4	6,32	98,75	7,05	89,65
5	IKM	B	B	B	100	A	97,40
6	Usia Harapan Hidup	70,43	70,5	70,56	100,09	72	98,0
7	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	359	359	359	100	356	99,16
8	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	34	34	34	100	32	93,75
9	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (persen)	19,7 (Riskesdas 2013)	17	19,7	84,12	15	72,35
10	Tingkat kelulusan SMA dan SMK	94%	99%	98,79%	99,79	99,5%	99,29
11	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	10	20	23	115,0	70	32,86
12	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	76,67	80,47	86,61	107,63	99,47	87,07
13	IPG	87,88	90	88,44	98,27	95,01	93,08
14	IDG	61,93	62,01	62,43	100,67	67,01	93,17
15	Indeks Kebebasan Sipil	75,89	76,0	75,89	99,86	77,9	97,42
16	TFP	NA	1,0	-1,45	0	1,5	0

No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2016			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
17	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38%	19,0%	18,14%	95,47	24,00%	75,58
18	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.208	2.854	88,96	3.217	88,72
19	Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman:						
	- IP 200	(35.061 Ha)	1,2	0	0	1,2 (37.662 Ha)	0
	- IP 300	(1.400 Ha)	1,4	0	0	1,4 (1.521,79 Ha)	0
20	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	73,51	74,59	73,955	99,15	80,00	92,44
21	Jalan dalam kondisi mantap	75,56	76,18	76,074	99,86	82,52	92,19
22	Rasio Elektrifikasi	81,5	85	86,89	102,22	96	90,51
23	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75	67%	65,12%	97,19	95%	68,55
24	persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35%	73%	74,3%	101,78	95%	78,21
25	persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	NA	6%	8%	133,33	20%	40,0
26	Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	NA	10,5%	15%	142,86	75%	20,0
27	persentase perusahaan proper hijau	6,25	7,5	7,46	99,5	15,00	49,75

No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2016			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
28	Persentase peningkatan industri ekowisata	7 %	7,5	25,8	344	10%	258
29	Indeks tata kelola hutan	33	34	33	97,06	50	66
30	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	(130.000 Ha)	23,1%	99,82%	432,12	50% (10.000 Ha)	108,14
31	persentase penurunan luas lahan kritis	(1.420.602 Ha)	0%	40,54%	140,54	2% (1.284.112 Ha)	134,22
32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	52,74	59,93	113,63	52,84	113,42
33	Angka Kemiskinan	9,12	8,35	8,37	99,76	7,09	81,95
34	Tingkat pengangguran Terbuka	4,34%	4,0%	4,0%	100%	2,5 %	48,8
35	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	2,17	1,8	117,05	1,82	101,1

Dari 35 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 20 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.1, maka 31 indikator (88,57%) masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi, 2 indikator (5,71%) dengan indikator tinggi, 1 indikator (2,86%) termasuk dalam kriteria realisasi rendah dan 1 indikator (2,86%) terealisasi sangat rendah. Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2016 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Sebagian besar indikator yang digunakan sebagai IKU menggunakan data yang diukur oleh lembaga di luar Pemerintah Provinsi Jambi dan beberapa diantaranya tidak dilakukan setiap tahun. Oleh karena itu untuk mengukur capaian kinerja tahun 2016 terhadap indikator yang belum dirilis oleh lembaga-lembaga tersebut ataupun tidak disurvei pada tahun 2016 maka data capaian akan menggunakan data terakhir dan selanjutnya akan dijelaskan capaian indikator proxy yang mendukung capaian IKU pada subbab Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target 2016	Capaian 2016	2017	
					(Target RPJMD)	PK
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	CC	CC	CC	B	B
	Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah	109,26	109,0	97,08	108	108
	Indeks transparansi Pemerintah	6,32	6,4	6,32	6,5	6,5
Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	IKM	B	B	B	B	B
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	70,43	70,5	70,56	70,7	70,7
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	359	359	359	359	359
	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	34	34	34	33,7	33,7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target 2016	Capaian 2016	2017	
					(Target RPJMD)	PK
	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (persen)	19.7 (Risksdas 2013)	17	19,7	17	17
meningkatnya kualitas Pendidikan Menengah	Tingkat kelulusan SMA dan SMK	94%	99%	98,79%	99,1%	99,1%
Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	10	20	23	30	30
Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	76,67	80,47	86,61	84,27	84,27
Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	IPG	87,88	90	88,44	91,02	91,02
	IDG	61,93	62,01	62,43	63,02	63,02
Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Kebebasan Sipil	75,89	76,0	75,89	76,5	76,5
Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	TFP	NA	1,0	-1,45	1,1	1,1
Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB	19,0%	18,14 %	95,47%	20,0%	20,0%
Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.208	2.854	3.210	3.210

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target 2016	Capaian 2016	2017	
					(Target RPJMD)	PK
Meningkatnya Indeks Pertanaman pada lahan Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman:					
	- IP 200	(35.061 Ha)	1,2	0	1,2%	1,2%
	- IP 300	(1.400 Ha)	1,4	0	1,4%	1,4%
akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	73,51	74,59	73,955	75,67%	75,67%
	Jalan dalam kondisi mantap	75,56	76,18	76,074	77,64%	77,64%
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	81,5	85	86,89	88	88
Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75	67%	65,12%	74%	74%
	persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35%	73%	74,3%	75%	75%
meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan	persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	NA	6%	8%	8%	8%
Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	NA	10,5%	15%	15%	15%
	persentase perusahaan proper hijau	6,25	7,5	7,46	8,9	8,9
	Persentase peningkatan industri ekowisata	7 %	7,5	25,8	8,1	8,1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target 2016	Capaian 2016	2017	
					(Target RPJMD)	PK
Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Indeks tata kelola hutan	33	34	33	35	35
	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	(130.000 Ha)	23,1%	99,82%	26,5%	26,5%
	persentase penurunan luas lahan kritis	(1.420.602 Ha)	0%	40,54%	2%	2%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	52,74	59,93	52,76	52,76
Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,12	8,35	8,37	8,05	8,05
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	4,34 %	4,0%	4,0%	3,7%	3,7%
Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	2,17	1,8	2,11	2,11

### 3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

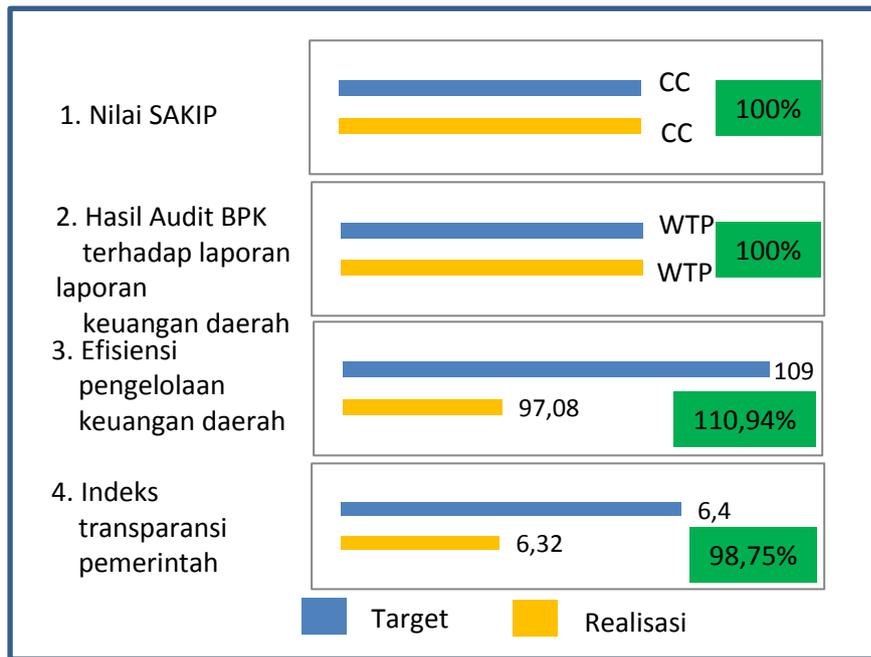
Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya. Penyajian untuk subbab ini disajikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

#### Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif

Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

**Sasaran 1.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien**

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya. Capaian sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efisien ditunjukkan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja berikut ini:



Gambar 3.2 Capaian Sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efisien

**1.1.1. Nilai SAKIP**

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi pada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi beorientasi pada hasil atau outcome. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah disorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggungjawab terhadap kinerja atau hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik di tingkat Pusat maupun daerah. Komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian

kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal “B” atau “Baik”.

Capaian kinerja akuntabilitas kinerja menunjukkan hasil yang belum baik secara predikat, karena Pemerintah Provinsi Jambi baru memperoleh predikat CC\* dengan nilai 52,87\*. Namun bila dibandingkan dengan target, dimana target pada tahun 2016 adalah CC, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini adalah 100% atau **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2021, maka capaian hingga tahun 2016 ini mencapai 75,52% atau masuk dalam kategori sedang. Capaian nilai “CC” ini pada dasarnya adalah nilai yang diterima pada tahun 2015 untuk penilaian SAKIP tahun 2014, nilai ini tetap dipakai karena sampai dengan laporan ini dibuat, Kementerian PANRB belum merilis capaian nilai SAKIP terbaru. Bila melihat tren perolehan nilai, maka terjadi penurunan nilai yang diterima dari tahun 2014, hal ini disebabkan oleh perubahan kriteria penilaian sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Nilai SAKIP	CC (50,95)	CC (56,71)	CC (59,36)	CC (52,87)	CC	CC*)	100,00	BB (>70)	75,52

Sumber: Biro Organisasi, 2017

\*) Data terakhir tahun 2015, capaian tahun 2016 belum rilis

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB, nilai yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Jambi sudah menunjukkan hasil yang cukup memadai dan masih memerlukan banyak perbaikan. Berikut ini perkembangan penerapan akuntabilitas kinerja tahun 2014-2016:

Tabel 3.5 Perkembangan Capaian Nilai pada Komponen SAKIP

No	Komponen yang dinilai	2014	2015	2016*)
a.	Perencanaan Kinerja	21,67	16,48	16,48
b.	Pengukuran Kinerja	11,15	11,81	11,81
c.	Pelaporan Kinerja	8,7	9,17	9,17
d.	Evaluasi Internal	5,46	4,64	4,64
e.	Capaian Kinerja	12,38	10,77	10,77
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>59,36</b>	<b>52,87</b>	<b>52,87</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>

Sumber: Biro Organisasi, 2017

\*) Data terakhir tahun 2015, capaian tahun 2016 belum rilis

Dalam rangka perbaikan nilai SAKIP, pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan beberapa upaya perbaikan pada komponen penilaian SAKIP. Pada komponen perencanaan kinerja, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 melalui PERDA Nomor 7 Tahun 2016 yang diturunkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016. Sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra ini menjadi acuan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) setiap tahunnya oleh Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Sebagai penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu IKU yang ditetapkan untuk pencapaian misi pertama dalam RPJMD adalah nilai SAKIP dengan program utama adalah program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan didukung oleh program-program berikut:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dilaksanakan oleh Bappeda
- b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dilaksanakan oleh Inspektorat
- c. Program Reformasi Birokrasi, dilaksanakan oleh Biro Organisasi
- d. Program Pembangunan dan Pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi

**Permasalahan:**

1. e-planning telah dibangun namun akses masih terbatas untuk lingkungan internal Pemerintah Provinsi Jambi dan belum terintegrasi dengan aplikasi penganggaran sehingga perlu pengembangan lebih lanjut.

**Solusi:**

1. e-planning yang masih dalam tahap *trial and error* pada tahun 2016 perlu dikembangkan lebih lanjut hingga tahap evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan serta dapat diakses secara terbuka, sehingga memudahkan pemantauan kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2. Selain itu integrasi antara e-planning dan SIMDA (aplikasi penganggaran) harus segera dilaksanakan untuk menyederhanakan prosedur perencanaan dan pengendalian kinerja dan keuangan.

1.1.2. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.



Gambar 3.3 Penerimaan hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi

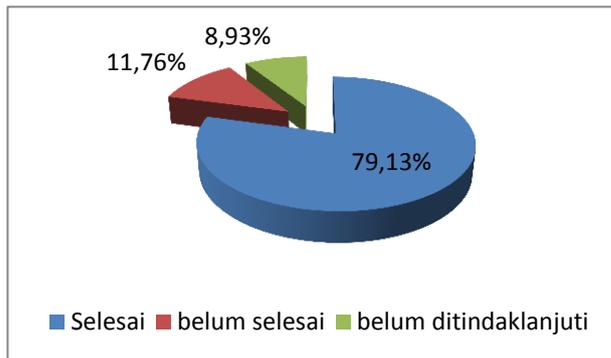
Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Realisasi atas target kinerja ini menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk keempat kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporannya. Atas pencapaian ini maka kinerja indikator kedua pada sasaran pertama ini adalah **sangat tinggi**

atau memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan RPJMD. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi. Sebagai catatan, realisasi ini merupakan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2015 yang dikeluarkan oleh BPK pada tahun 2016. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2016, masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Indikator hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sumber: BPK, 2016



Gambar 3.4 Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2006-2016

Dalam rangka perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Jambi terus mengupayakan penyelesaian rekomendasi - rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah, selain terus meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Inspektorat Provinsi Jambi dan BPK RI Tahun 2006 – 2016 dapat dilihat pada gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bahwa 90,89% hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti dengan rincian 79,13% selesai ditindaklanjuti dan 11,76% belum selesai. Sedangkan sisanya sebesar 8,93% akan terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti hingga tuntas.

#### Permasalahan:

1. Adanya tahapan penyelesaian kasus yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.
2. Masih terdapat Objek Pemeriksaan (SKPD) yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap Obrik yang tidak/belum melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran dari temuan pemeriksaan.
4. Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga, dikarenakan adanya pekerjaan yang di sub kontrakkan.

#### Solusi:

1. Mengupayakan penyelesaian Kasus tahapan dan waktu yang lebih singkat
2. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan oleh BPK maupun oleh APFP
3. Menjalin koordinasi yang baik antara Obrik/SKPD dengan lembaga pemeriksaan, baik APFP maupun BPK sehingga tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan cepat
4. Mengupayakan pola yang tepat menghubungkan antara Obrik/SKPD dengan pihak ketiga dalam menindaklanjuti temuan yang ada.

1.1.3. Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah

Tabel 3.7 Kriteria efisiensi kinerja Keuangan berdasarkan  
Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
>100%	Tidak efisien
90% - <100%	Kurang efisien
80% - <90%	Cukup efisien
60% - <80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah memperlihatkan sejauhmana daerah dapat mengelola keuangannya. Berdasarkan perhitungan sementara (proses penilaian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi oleh BPK sedang berlangsung pada saat laporan ini

dibuat), pada tahun 2016 efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi adalah 97,08% atau masuk dalam kriteria kurang efisien (berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996). Namun bila dibandingkan dengan target dan capaian tahun lalu, capaian ini menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik dan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 atau berkinerja **sangat tinggi**. Bahkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD atau target tahun 2021, maka capaian kinerja saat ini telah mencapai 103,82% atau sangat tinggi.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Efisiensi pengelolaan keuangan daerah	96,07	104,37	100,15	109,26	109,0	97,08	110,94	100,93	103,82

Sumber: Bappeda (Hasil analisis), 2017

Bila melihat capaian indikator ini setiap tahunnya, terlihat realisasi yang berfluktuatif. Besarnya pendapatan yang merupakan pembagi dalam perhitungan efisiensi sangat tergantung dengan situasi perekonomian dan kebijakan pada saat itu. Adanya kebijakan *self blocking* dan situasi perekonomian pada tahun 2016 turut mempengaruhi capaian indikator ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh **program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah** yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah.

**Permasalahan:**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali optimal dan pendapatan daerah masih sangat tergantung dengan dana perimbangan.
2. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusi daerah belum tinggi.

**Solusi:**

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan inovasi-inovasi baru yang memudahkan akses wajib pajak.
2. Updating database wajib pajak dan sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan.

**1.1.4. Indeks transparansi Pemerintah**

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga indeks transparansi menjadi komposit dari penilaian *Indonesia Governance Index* (IGI). Indeks transparansi merupakan salah satu indeks yang tidak diukur setiap tahun, namun penting untuk dijadikan indikator kinerja utama. Indeks ini menunjukkan posisi relatif Provinsi Jambi terhadap capaian provinsi lainnya.

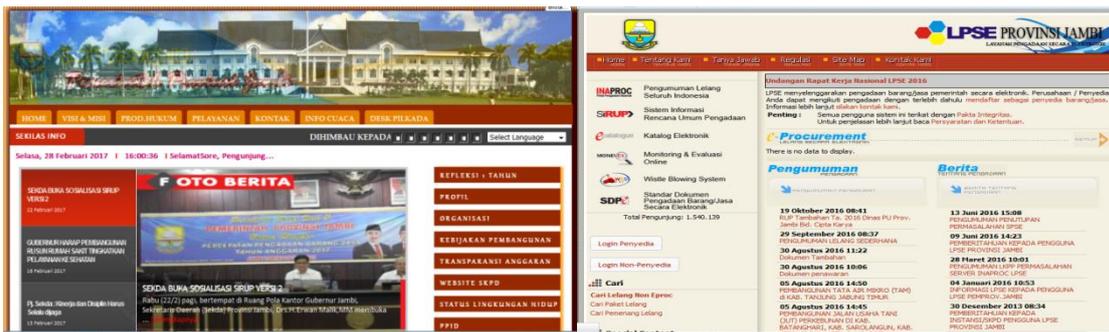
Berdasarkan rilis data terakhir pada tahun 2013, capaian indeks transparansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah 6,32 dan sampai akhir 2016 belum ada rilis data terbaru terkait indeks ini. Oleh karena itu realisasi kinerja pada tahun 2016 masih menggunakan data ini atau terealisasi sebesar 98,75% dengan kategori **sangat tinggi**.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Indeks Transparansi Pemerintah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Transparansi Pemerintah	6,32	6,32 <sup>*)</sup>	6,32 <sup>*)</sup>	6,32 <sup>*)</sup>	6,4	6,32 <sup>*)</sup>	98,75	7,05	89,65

Sumber: IGI, 2012

<sup>\*)</sup> data survey terakhir (2012), belum ada data terbaru yang dirilis

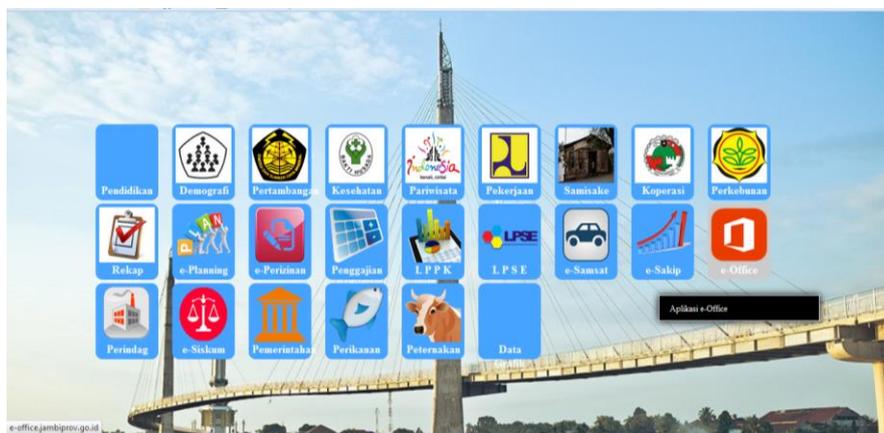


Gambar 3.5 Transparansi informasi publik pada web resmi Pemerintah Provinsi Jambi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

Salah satu bentuk implementasi dari transparansi pemerintah adalah keterbukaan informasi publik, atau dengan kata lain masyarakat dapat mengakses web resmi pemerintah dengan mudah. Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi telah memiliki web resmi yang memuat informasi-informasi yang masuk dalam kategori informasi publik. Publik dapat memberikan saran dan kritik membangun terkait perkembangan pembangunan Provinsi Jambi.

Seiring dengan perkembangan media sosial saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah juga memiliki akun media sosial yang berfungsi untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi. Akun media sosial ini terbukti lebih interaktif karena publik dapat berinteraksi langsung dalam memberikan saran dan masukan serta kritik atas kebijakan atau kegiatan-kegiatan tersebut.

Guna pemenuhan kebutuhan aplikasi *e-government* dan *website*, program yang dilaksanakan adalah **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik** yang dilaksanakan oleh Dinas komunikasi dan Informasi. Selain *website*, beberapa *e-government* juga telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, seperti e-sakip, e-planning, e-office, LPPK dan lain-lain serta e-government lainnya yang berhubungan dengan data sektoral.



Gambar 3.6 Tampilan e-government pada *situation room* Pemerintah Provinsi Jambi

**Permasalahan:**

1. Sistem yang tersedia sebagai sarana pengembangan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah belum dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat khususnya yang belum melek teknologi.
2. Updating data pada website dan aplikasi masih perlu dioptimalkan

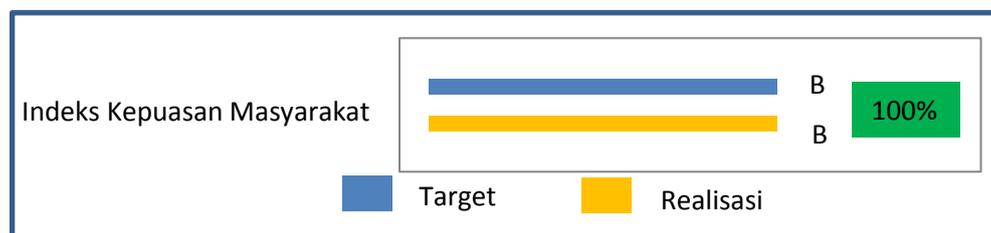
**Solusi:**

1. Masyarakat yang menggunakan media sosial jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat yang menggali informasi melalui website resmi pemerintah, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi website resmi ini melalui media sosial.
2. *Updating website* dan aplikasi akan dioptimalkan di masa yang akan datang.

## Tujuan 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebelumnya sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi maka pada tahun 2016 ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

### *Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.*



Gambar 3.7 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah yang Melayani Publik

Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan peningkatan tuntutan akan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi terus membenahi kualitas pelayanan publik seiring dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan

masyarakat. Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik dapat dilihat pada gambar 3.7.

**2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Tabel 3.10 Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016

No	Instansi	Unsur Pelayanan									Rata - Rata	Nilai Huruf
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Balitbangda	80,00	84,00	82,00	89,50	78,50	79,50	82,00	80,50	75,00	81,22	B
2	Badan Penanaman Modal dan PPT	70,00	65,00	53,00	64,00	67,00	65,00	66,00	68,00	68,00	65,11	B
3	Badan Kepegawaian Daerah	75,00	75,00	75,00	80,00	80,00	77,50	80,00	72,50	87,50	78,06	B
4	Badan Peng. Keuangan dan Aset D.	80,00	87,50	80,00	100,00	82,50	85,00	77,50	82,50	90,00	85,00	A
5	Badan perpustakaan dan Arsip Daerah	77,16	78,07	75,83	69,85	77,33	79,40	79,49	76,34	84,01	77,50	B
6	Dinas Pendidikan	75,00	80,00	72,50	72,50	75,00	80,00	80,00	72,50	75,00	75,83	B
7	Dinas kesehatan	99,28	98,55	91,67	89,49	90,94	88,04	84,06	80,43	75,00	88,61	A
8	Dinas Pekerjaan Umum	75,00	78,33	76,67	78,33	80,00	80,00	83,33	78,33	98,33	80,92	B
9	Dinas Perhubungan	76,79	80,36	67,86	89,29	76,79	80,36	89,29	83,93	83,93	80,96	B
10	Dinas Kehutanan	74,19	74,19	71,77	87,90	75,00	79,03	75,81	74,19	78,23	76,70	B
11	Dinas Perkebunan	75,00	69,23	71,15	71,15	75,00	76,92	78,85	73,08	80,77	74,57	B
12	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	93,33	94,17	93,33	94,17	97,50	94,17	96,67	95,83	93,33	94,72	A
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	81,25	87,50	81,25	75,00	81,25	75,00	75,00	75,00	87,50	79,86	B
14	Dinas Koperasi UMKM	73,81	74,40	69,05	67,26	75,00	75,60	76,19	71,43	60,12	71,43	B
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	75,00	75,00	76,79	66,07	67,86	76,79	80,36	76,79	75,00	74,41	B
16	Rumah Sakit Jiwa Daerah	82,69	80,77	84,62	90,38	82,69	84,62	90,38	76,92	94,23	85,26	A
<b>Nilai Rata-Rata IKM Provinsi Jambi</b>		<b>78,97</b>	<b>80,13</b>	<b>76,41</b>	<b>80,31</b>	<b>78,90</b>	<b>79,81</b>	<b>80,93</b>	<b>77,39</b>	<b>81,62</b>	<b>79,38</b>	<b>B</b>

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat, Biro Organisasi, 2016

- Ket:
- U1: Persyaratan pelayanan
  - U2: Prosedur pelayanan
  - U3: Waktu pelayanan
  - U4: Biaya/tarif pelayanan
  - U5: Produk/hasil pelayanan
  - U6: Kemampuan petugas pelayanan
  - U8: Maklumat pelayanan
  - U9: Mekanisme pengaduan pelayanan

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kepuasan

masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan.

Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Berbagai unsur yang ada dalam survei dapat dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang. Pelaksanaan survei IKM telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi secara berkala setiap tahun. Pada tahun 2016, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 16 SKPD memperlihatkan hasil sebagaimana tabel 3.10. di atas.

Berdasarkan tabel di atas, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2016 adalah “B” atau “Baik” dengan nilai rata-rata 79,38. Hal ini berarti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi termasuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata tahun 2016 tersebut meningkat 3,37 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peningkatan nilai rata-rata pada semua unsur pelayanan. Unsur dengan nilai tertinggi adalah mekanisme pengaduan pelayanan dan terendah adalah unsur waktu pelayanan. Untuk itu kedepan perlu perbaikan pada unsur waktu pelayanan dengan terus meningkatkan nilai pada unsur kemampuan petugas pelayanan serta unsur-unsur lainnya.

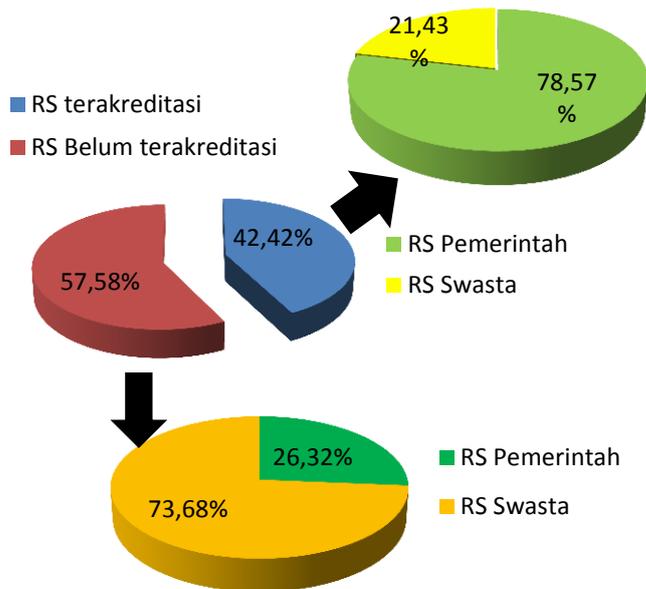
Tabel 3.11 Capaian Indikator Indeks kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks kepuasan masyarakat	-	B (76,89)	B (77,61)	B (76,01)	B	B (79,38)	100%	A	97,40

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat, Biro Organisasi, 2016

Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2016, maka capaian tahun 2016 telah memenuhi target atau terealisasi 100% dan masuk dalam kriteria **sangat tinggi**. Program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat ini antara lain adalah:

- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
- Program reformasi birokrasi
- Program-program rutin pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi



Sumber: RSUD Raden Mattaher, 2017

Gambar 3.8 Gambaran Rumah Sakit Terakreditasi di Provinsi Jambi

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit (RS) di Provinsi Jambi adalah mendorong RS Pemerintah agar terakreditasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 40 ayat 1, yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Sebagai gambaran RS terakreditasi di Provinsi Jambi,

dapat dilihat pada gambar 3.8. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat 57,58% RS di Provinsi Jambi yang belum terakreditasi dan 26,32% diantaranya adalah RS Pemerintah. Sedangkan dari 42,42% RS yang telah terakreditasi, 78,57% diantaranya adalah RS Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi perlu mendorong RS Pemerintah yang belum terakreditasi tersebut agar segera diakreditasi.

Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Rumah Sakit karena telah memenuhi standar pelayanan berstandar Internasional yang telah ditentukan. Sebagai indikator proxy pendukung IKU Gubernur, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2016 menargetkan Persentase Kab/Kota yang mempunyai minimal satu Rumah Sakit terakreditasi sebesar 20 %, dan telah terealisasi sebesar 45,5 % (5 kabupaten yang memiliki satu Rumah Sakit terakreditasi) atau persentase capaian kinerja sebesar 227,5% dengan kategori sangat tinggi. Pencapaian ini merupakan hasil pembinaan dan bimbingan akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh tim pembina akreditasi Rumah Sakit Provinsi Jambi kepada Rumah Sakit Kabupaten/Kota sebelum dilakukan survei dan bimbingan oleh Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Khusus RS Milik Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi, juga telah memenuhi target indikator kinerja proxy pendukung IKU Gubernur, dimana pada tahun 2016 RSUD Raden Mattaher telah terakreditasi paripurna atau target kinerja tercapai 100% dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi terakreditasi madya dengan capaian kinerja 75% atau belum terjadi peningkatan dibandingkan dengan akreditasi sebelumnya.

**Permasalahan:**

1. Indeks kepuasan masyarakat pada setiap perangkat daerah tidak merata. Hal ini ditunjukkan oleh perangkat daerah yang nilai unsur-unsur pelayanannya masih harus ditingkatkan.
2. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan waktu pelayanan.

**Solusi:**

1. Penerapan SOP pelayanan, yang diiringi dengan pengawasan.

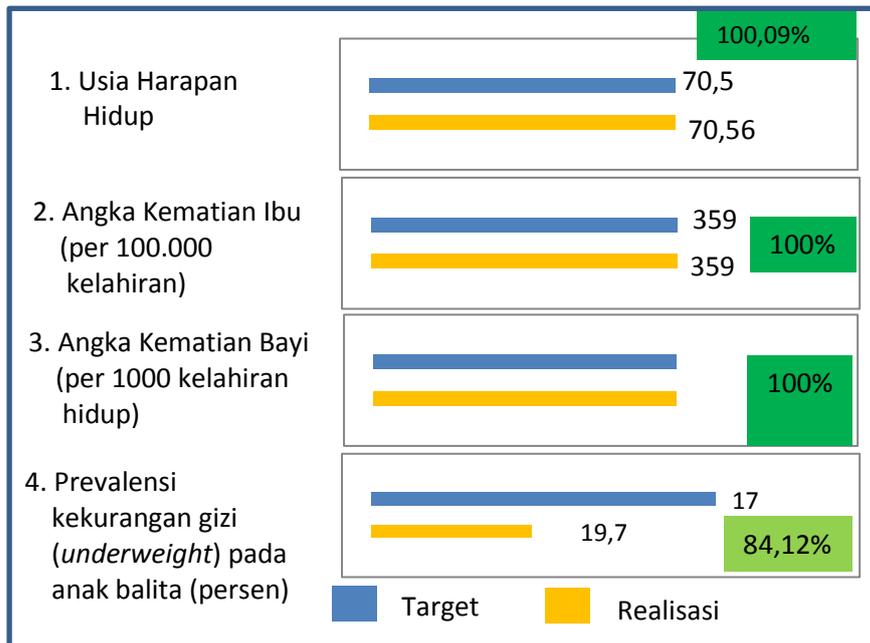
## Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumberdaya kesehatan. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### *sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat*

---

Tingkat keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi dan penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita. Tingginya capaian usia harapan hidup memperlihatkan peningkatan derajat kesehatan dan pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat khususnya sektor kesehatan yang didukung oleh sektor ekonomi, budaya dan pendidikan. Capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini:



Gambar 3.9 Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

### 3.1.1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup menjadi salah satu penanda penting keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di suatu daerah.

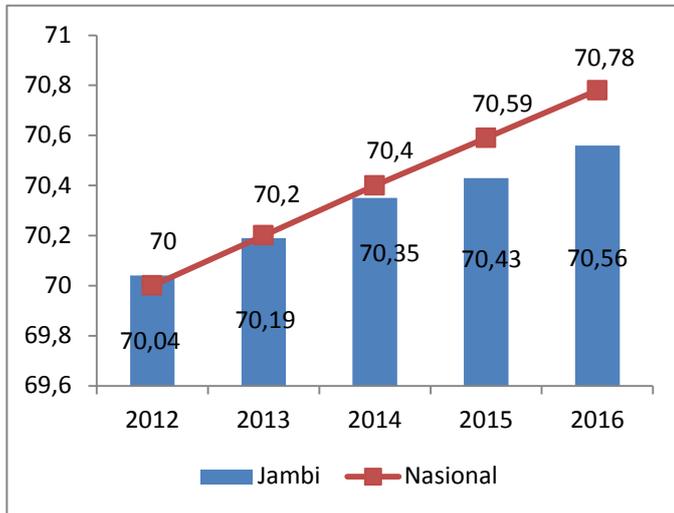
Tabel 3.12 Capaian Indikator Usia harapan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Usia Harapan Hidup*)	70,04	70,19	70,35	70,43	70,5	70,56*	100,09	72	98,0

Sumber: BPS, 2016

Ket: \*) data yang dikeluarkan tahun 2016 (kondisi tahun 2015)

Data usia harapan hidup dikeluarkan oleh BPS setiap tahun merupakan data capaian tahun sebelumnya dan untuk penghitungan tahun 2017 yang merupakan data capaian tahun 2016 belum dirilis hingga laporan ini dibuat. Bila melihat capaian usia harapan hidup Provinsi Jambi 5 tahun terakhir, terlihat peningkatan yang cukup menggembirakan. Data tahun 2016 menunjukkan peningkatan usia harapan hidup sebesar 0,13 tahun dari tahun sebelumnya, yaitu



dari 70,43 tahun menjadi 70,56 tahun atau meningkat 0,18%. Realisasi ini melebihi target tahun 2016 yaitu 70,5 tahun atau terealisasi sebesar 100,09%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sampai dengan tahun 2016 kinerja indikator usia harapan hidup telah tercapai sebesar 98%.

Sumber, BPS (data diolah), 2017

Gambar 3.10 Perbandingan capaian indikator usia harapan hidup Provinsi Jambi dengan usia harapan hidup Indonesia

Capaian kinerja ini tidak terlepas dari upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit menular dan tidak

menular, penurunan angka kematian ibu dan bayi serta perubahan pola hidup masyarakat dengan melaksanakan program-program berikut:

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Upaya kesehatan Perorangan
- Program pembiayaan dan jaminan kesehatan
- Program Kesehatan ibu dan anak
- Program kesehatan anak balita
- Program perbaikan gizi masyarakat
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Salah satu upaya perbaikan pelayanan kesehatan, adalah meningkatkan rasio dan sebaran tenaga kesehatan di Provinsi Jambi. Sampai dengan Tahun 2016, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) yang bekerja pada unit kerja/unit pelayanan kesehatan dalam wilayah administratif provinsi Jambi berjumlah 14.337 orang, terdiri atas 10.000 orang dengan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1.412 orang dengan status kepegawaian Pegawai

Tidak Tetap (PTT), 1.318 orang dengan status kepegawaian Kontrak dan 1.607 orang dengan status kepegawaian swasta.

Tabel 3.13 Sebaran SDM Kesehatan yang bekerja di Kabupaten/ Kota/ Provinsi Tahun 2016

NO	KAB / KOTA / PROV	JUMLAH	%
1	KERINCI	930	6.5
2	MERANGIN	1.129	7.9
3	SAROLANGUN	848	5.9
4	BUNGO	1.496	10.4
5	TEBO	757	5.3
6	BATANGHARI	904	6.3
7	MUARO JAMBI	1.278	8.9
8	TANJAB BARAT	749	5.2
9	TANJAB TIMUR	767	5.3
10	KOTA JAMBI	3.164	22.1
11	KOTA SEI PENUH	247	1.7
12	PROVINSI	2.068	14.4
JUMLAH		14.337	100,00

Sumber : Dinkes Provinsi Jambi, 2017

Mengacu pada Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk berdasarkan indikator Indonesia Sehat, Untuk Kategori Ketenagaan Dokter Spesialis masih di perlukan sebanyak 125 Orang, jenis ketenagaan dokter umum 336 orang, dokter gigi 202 orang, perawat 677 orang, bidan 60 orang, perawat gigi 150 orang, tenaga apoteker 133 orang, asisten apoteker 74 orang, tenaga gizi 361 orang, dan tenaga keterampilan fisik sebanyak 58 orang. Sementara rasio tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian dan tenaga keteknisian medis, jumlahnya sudah mencukupi.

Selain memenuhi rasio tenaga kesehatan, Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong agar fasilitas kesehatan tingkat pertama/puskesmas di Provinsi Jambi terakreditasi dengan melatih calon pendamping akreditasi puskesmas seluruh Kabupaten se-Provinsi Jambi. Capaian kinerja indikator dari upaya tersebut, yaitu kecamatan yang mempunyai puskesmas terakreditasi pada tahun 2016 terealisasi sebesar 1,5%, atau dibawah target sebesar 13 %, sehingga diperlukan upaya lebih intensif lagi di tahun mendatang.

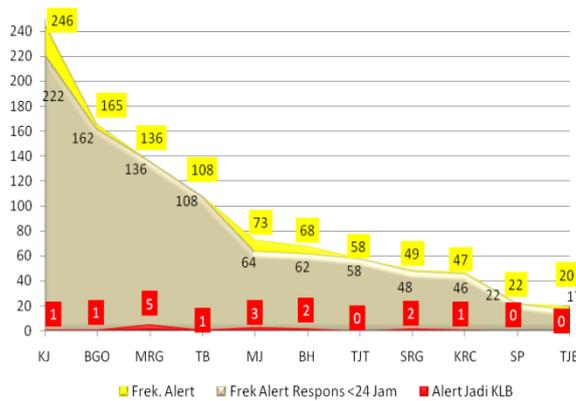
Khusus pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dengan keterbatasan sarana prasarana pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan rendah dan minat tenaga kesehatan rendah, dilakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB). Pada tahun 2016, PKB ini telah beroperasi di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka pencegahan penyakit menular, salah satu alat untuk memantau terjadi atau tidaknya peningkatan kasus dari suatu penyakit terutama penyakit yang berpotensi KLB (Kejadian Luar Biasa) yang digunakan di Provinsi Jambi adalah Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). Pada tahun 2016, semua KLB yang terjadi dalam Provinsi Jambi dilakukan verifikasi < 24 jam. Kondisi ini dimungkinkan karena kerjasama yang baik antara petugas surveillans yang ada dalam setiap level, baik Puskesmas, Kabupaten/Kota, dan Provinsi Jambi.

Tabel 3.14 Frekuensi dan CFR KLB pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2015-2016

No	Kab/ Kota	2015				2016			
		Frek	Jml kasus	Jml Kematian	CFR (%)	Frek	Jml kasus	Jml Kematian	CFR (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kerinci	1	1	1	100	1	28	0	0
2	Sungai Penuh	3	21	0	0,00	0	0	0	0
3	Merangin	9	70	0	0,00	7	73	2	2,74
4	Sarolangun	3	10	1	10	2	28	0	0,00
5	Bungo	0	0	0	0,00	1	4	0	0,00
6	Tebo	0	0	0	0,00	1	5	0	0,00
7	Batang Hari	3	52	0	0,00	2	14	0	0,00
8	Ma. Jambi	4	247	0	0,00	4	18	1	5,56
9	Tanjab Barat	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Tanjab Timur	2	8	1	100	0	0	0	0
11	Kota Jambi	6	97	0	0,00	2	23	0	0,00
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>506</b>	<b>3</b>	<b>0,59</b>	<b>20</b>	<b>193</b>	<b>3</b>	<b>1,55</b>

Sumber: Dinas Kesehatan,2017



Sumber: Dinas Kesehatan,2017

Gambar 3.11 Jumlah alerts dan alerts yang menjadi KLB per Kabupaten/Kota Tahun 2016

mendukung percepatan penurunan angka kesakitan penyakit menular maupun yang tidak menular. Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan Masyarakat guna mendukung peningkatan cakupan PHBS tatanan Rumah tangga, hasil dari cakupan kegiatan program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel di atas memperlihatkan penurunan KLB dari 31 KLB (2015) menjadi 20 KLB (2016), sementara sinyal kewaspadaan dini (alerts) yang muncul meningkat hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dari 367 alerts pada tahun 2015 menjadi 992 alerts pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan perbaikan kinerja mengingat total kewaspadaan dini yang muncul meningkat cukup tinggi tapi mampu menekan terjadinya KLB.

Berkaitan dengan perubahan pola hidup, masyarakat diberdayakan untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS ini sangat penting karena

Tabel 3.15 Hasil Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS di Provinsi Jambi Tahun 2016

NO	Kab/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Rumah Tangga	Jml Rmh Tga Yang Dipantau	Rumah Tangga Ber-PHBS	Capaian (%)
1.	Kerinci	18	65.128	32.621	23.172	71%
2.	Kota Sungai Penuh	9	22.274	11.885	8.986	76%
3.	Merangin	23	22.274	118717	7391	62%
4.	Tebo	17	79341	39041	26433	68%
5.	Bungo	18	77.737	56.158	41.072	73%
6.	Sarolangun	15	67.885	33414	18499	55%
7.	Tanjab Barat	16	77.668	22.413	12.317	55%
8.	Tanjab Timur	17	51.198	23.621	12.082	51%
9.	Batanghari	17	61.220	16.234	11.342	70%
10.	Muara Jambi	19	83.708	13.634	10.093	74%
11.	Kota Jambi	20	115.324	13.018	7.167	55%
	<b>TOTAL</b>	<b>189</b>	<b>723.757</b>	<b>269.430</b>	183.034	68%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2016

#### Permasalahan:

1. Mengacu pada Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk berdasarkan indikator Indonesia Sehat, Provinsi Jambi masih kekurangan beberapa tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum dan lain-lain.
2. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama/puskesmas di Provinsi Jambi yang terakreditasi belum memadai sehingga pelayanan kesehatan belum optimal.

#### Solusi:

1. Memperkuat pembinaan kelembagaan dengan mendorong peran serta masy dalam suatu wadah, misal Forum Kabupaten/kota sehat atau nama lain atau penghargaan yang diberikan oleh berbagai sektor.
2. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
3. Pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan.

**3.1.2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)**

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah jumlah kematian ibu akibat proses kelahiran, persalinan, dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. atau angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Tabel 3.16 Capaian Indikator Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016			
					Target	Realisasi		
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	359	359*)	359*)	359*)	359*)	359*)	100,00	99,16

Sumber: SDKI, 2012



Sumber: Dinas Kesehatan, 2016

Gambar 3.12 Proyeksi Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Jambi Tahun 2011-2015

AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah

kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan SDKI terakhir yaitu SDKI tahun 2012, AKI Provinsi Jambi adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena data ini adalah survey terakhir maka capaian ini masih dipakai untuk data capaian tahun 2016. Persentase capaian realisasi ini adalah 100% atau **sangat tinggi** karena sesuai dengan target tahun 2016 sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jambi yang dirilis pada triwulan II Tahun 2016, laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu (hamil, bersalin, dan nifas) di Provinsi Jambi tahun 2015 adalah 56 kasus dengan jumlah kelahiran hidup

sebanyak 69.109 kelahiran hidup. Jika diproyeksikan, maka angka kematian ibu di Provinsi Jambi tahun 2015 adalah 81 per 100.000 kelahiran hidup. Angka proyeksi ini meningkat dibandingkan tahun 2014, dimana pada tahun tersebut angka proyeksi kematian ibu adalah 75 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu terbanyak terdapat di Kabupaten Merangin (10 kasus) sedangkan paling sedikit terdapat di Kabupaten Tebo dan Kota Sungai Penuh masing-masing 2 kasus.

Program-program yang dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian ibu adalah:

1. Program Kesehatan Ibu dan Anak
2. Program Perbaikan gizi Masyarakat
3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

#### Permasalahan:

1. Proyeksi Angka Kematian Ibu berdasarkan laporan jumlah kematian ibu (hamil, bersalin, dan nifas) pada fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan peningkatan

#### Solusi:

1. Perlu diteliti lebih lanjut faktor penyebab peningkatan proyeksi Angka Kematian Ibu perlu di Provinsi Jambi, apabila faktor penyebab berasal dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan, maka diperlukan koordinasi dengan sektor lain dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang terkait dalam penanganannya.

### 3.1.3. Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)

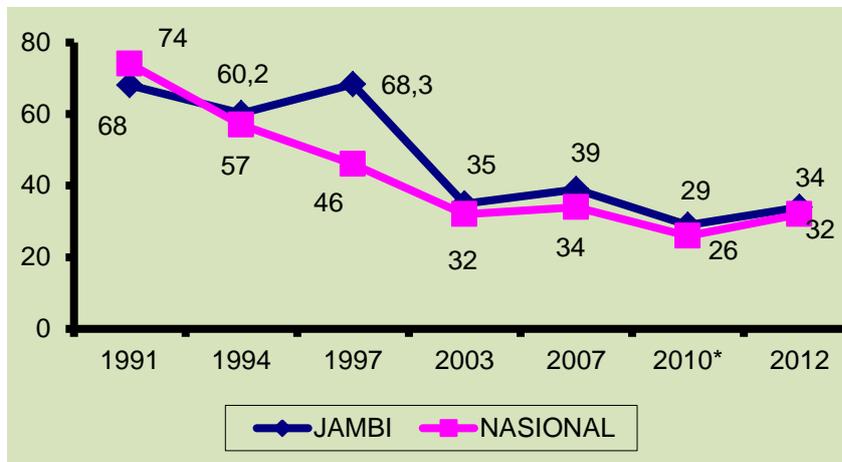
Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)* dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tingkat provinsi maupun nasional. Sama halnya dengan AKI, AKB juga didapatkan dari SDKI yang dilakukan 5 tahun sekali.

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilaksanakan 5 tahun sekali, terjadi kecenderungan penurunan AKB sejak tahun 1991 hingga tahun 2012. Oleh karena data ini adalah survey terakhir maka capaian ini masih dipakai untuk data capaian tahun 2016. Persentase capaian realisasi ini adalah 100% atau **sangat tinggi** karena sesuai dengan target tahun 2016 sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan AKB, diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Perbaikan status ekonomi masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi terhadap penurunan kematian bayi.

Tabel 3.17 Capaian Indikator Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016	
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi			% capaian
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	34	34 <sup>*)</sup>	34 <sup>*)</sup>	34 <sup>*)</sup>	34 <sup>*)</sup>	34 <sup>*)</sup>	100,00	32	99,16

Sumber: SDKI, 2012



Sumber: SDKI Thn 2012, \* Hasil Sensus Penduduk 2010

Gambar 3.13 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 1991-2012

Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jambi yang dirilis pada triwulan II Tahun 2016, laporan dari fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa jumlah bayi yang meninggal di Provinsi Jambi tahun 2015 adalah 222 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 69.109 kelahiran hidup. Jika diproyeksikan, maka angka kematian bayi yang dilaporkan di Provinsi Jambi tahun 2015 adalah 3 per 1.000 kelahiran hidup. Angka proyeksi ini meningkat dibandingkan tahun 2014, dimana pada tahun tersebut angka proyeksi kematian bayi adalah 1 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah bayi yang meninggal paling banyak di laporkan terdapat di Kabupaten Merangin (37 orang) sedangkan paling sedikit terdapat di Kabupaten Sarolangun (0 orang).

Upaya kesehatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Jambi sudah cukup banyak, diantaranya adalah PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di puskesmas-puskesmas yang ada di Provinsi Jambi dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 24 Jam pada rumah sakit milik pemerintah daerah (RSUD). Dari 13 RSUD yang ada di Provinsi Jambi, 11 diantaranya telah melaksanakan PONEK 24 jam. Faktor penyebab 2 RSUD yang belum melaksanakan PONEK 24 jam tersebut adalah tenaga

dokter spesialis kandungan dan anak yang bekerja masih separuh waktu sehingga pelayanan PONEK belum optimal.

Selain itu dilakukan pula imunisasi yang merupakan kegiatan rutin dan terintegrasikan dalam pelayanan dasar di Puskesmas, Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan lainnya termasuk di pos pelayanan terpadu (Posyandu). Imunisasi juga telah memberikan kontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan anak balita khususnya yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis, tetanus neonatorum, polio dan penyakit campak. Hal tersebut akan lebih cepat tercapai apabila cakupan imunisasi rutin (sasaran bayi, ibu hamil dan anak sekolah) dapat dipertahankan tetap tinggi setiap tahun dan merata sampai ke tingkat desa/kelurahan (UCI Desa).

Adapun program-program yang dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian bayi adalah:

1. Program Kesehatan Ibu dan Anak
2. Program Perbaikan gizi Masyarakat
3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

**Permasalahan:**

1. Sarana, prasarana, sumber daya manusia pendukung PONEK 24 jam masih terbatas.

**Solusi:**

1. Melaksanakan pelatihan workshop PONEK 24 Jam di Rumah Sakit
2. Menganggarkan dana dan mensosialisasikan program workshop PONEK 24 Jam bagi Rumah Sakit yang belum mengikuti workshop PONEK
3. Monitoring dan evaluasi program PONEK melalui On the Job Training (OJT) setiap 6 bulan sekali bagi Rumah Sakit yang sudah mengikuti workshop PONEK melalui monev program pelayanan kesehatan perorangan

#### 3.1.4. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita (persen)

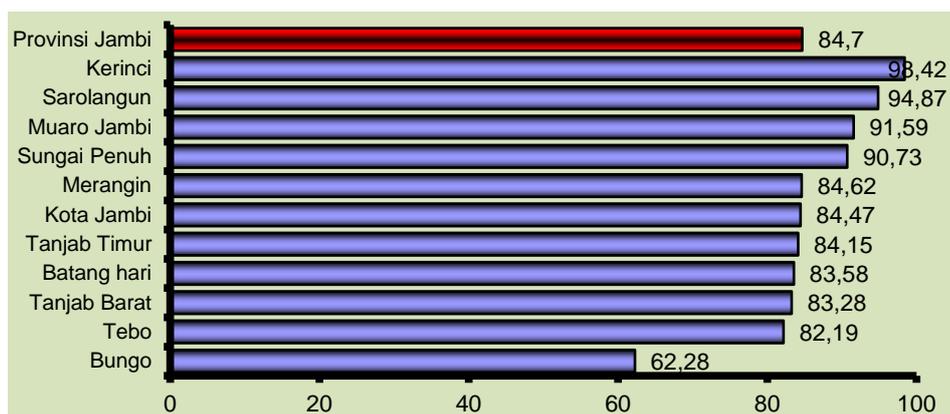
Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Data Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita merupakan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan tiga tahun sekali. Data terakhir hasil Riskesdas Tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Provinsi Jambi adalah 19,7%. Oleh karena data ini merupakan data terakhir yang dirilis maka capaian pada tahun 2016 masih menggunakan data ini. Berdasarkan data tersebut, persentase capaian realisasi pada tahun 2016 adalah 84,12% atau masuk dalam **kategori tinggi**, sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka sampai dengan tahun 2016, kinerja atas indikator ini baru mencapai 72,35% atau masih dalam kategori sedang.

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita (persen)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (persen)	19,6 (Riskesdas 2010)	19,7 (Riskesdas 2013)	19,7 (Riskesdas 2013)	19,7 (Riskesdas 2013)	17	19,7 (Riskesdas 2013)	84,12	15	72,35

Sumber: Riskesdas, 2013



Sumber : Profil Kesehatan Prov. Jambi, 2016

Gambar 3.14 Persentase cakupan kunjungan balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Data hasil Riskesdas tahun 2013 di atas menunjukkan adanya peningkatan 0,1% prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dibandingkan hasil Riskesdas Tahun 2010 yaitu

sebesar 19,6%. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan angka ini, diantaranya adalah memberikan pelayanan kesehatan pada anak balita meliputi; pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala; penyuluhan pada orang tua (kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, pendidikan seksual yang dimulai sejak balita atau sejak anak mengenali identitasnya sebagai laki-laki atau perempuan, perawatan anak saat sakit, dan menjauhkan anak dari bahaya); penyuluhan cara menstimulasi perkembangan anak; imunisasi dan upaya pencegahan penyakit; pemberian vitamin A dimana Kapsul Vitamin A berwarna merah diberikan 2 kali dalam setahun; dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.

Berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Jambi yang dikeluarkan pada pertengahan 2016, cakupan pelayanan kesehatan anak balita tertinggi berada pada Kabupaten Kerinci yaitu 98,42% dan terendah pada Kabupaten Bungo yaitu 62,28%. Sementara itu untuk pemberian makanan tambahan untuk balita kurus pada tahun 2016 teralisasi sebesar 93,15%.

Adapun program yang telah dilaksanakan untuk penurunan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita ini adalah sebagai berikut:

- Program kesehatan anak balita
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

#### **Permasalahan:**

1. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun-temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
2. Integrasi program gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di tingkat pelaksana (puskesmas dan jaringannya) belum optimal.

#### **Solusi:**

1. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.
2. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan dilaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.

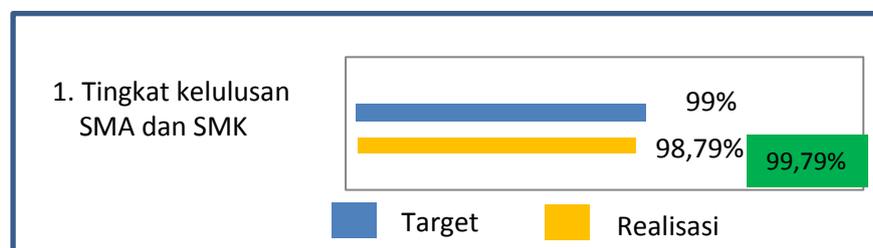
## Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

### *Sasaran 4.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah*

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat terampil dan produktif yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat strategis untuk menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung. Dalam era globalisasi, keunggulan kompetisi suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan bidang pendidikan dibagi sesuai dengan tingkat pemerintahan, dimana Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan menengah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2016 fokus pada peningkatan kualitas pendidikan menengah. Capaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan menengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.15 Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah

## 4.1.1. Tingkat Kelulusan SMA dan SMK

Indikator untuk mengukur keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan menengah adalah tingkat kelulusan peserta didiknya. Untuk Provinsi Jambi, tingkat kelulusan SMA dan SMK pada tahun 2016 adalah 98,79% dengan rincian tingkat kelulusan SMA sebesar 99,14% dan tingkat kelulusan SMK sebesar 98,43%. Tingkat kelulusan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yang baru mencapai 94%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka capaian realisasinya mencapai 99,79% atau termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021 juga termasuk dalam kategori sangat tinggi karena telah mencapai 99,29%.

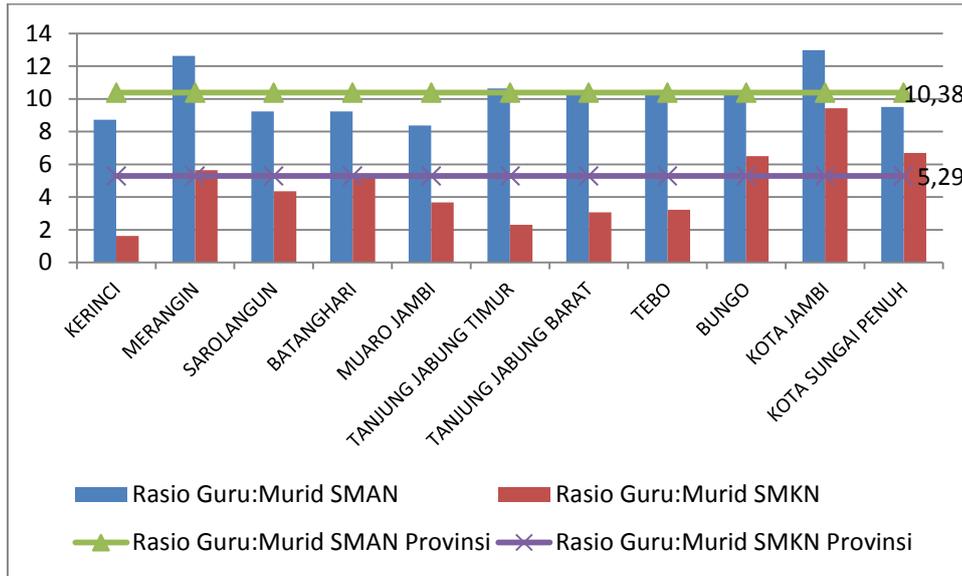
Peningkatan tingkat kelulusan pada tahun 2016, selain disebabkan dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan juga sedikit terpengaruh oleh kebijakan bahwa Ujian Nasional tidak menjadi salah satu penentu kelulusan seorang siswa. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang diambil turut berpengaruh terhadap capaian kinerja.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016		% capaian		
					Target	Realisasi			
Tingkat Kelulusan SMA dan SMK	NA	NA	NA	94%	99%	98,79 %	99,79%	99,5%	99,29%

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Jambi, 2017

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah menengah di Provinsi Jambi, antara lain dengan meningkatkan sarana prasarana sekolah, pemberian beasiswa dan penyediaan guru berkualitas. Sampai dengan tahun 2016, persentase guru SMA dan SMK yang telah bersertifikasi pendidik adalah sebesar 27% dengan persentase guru SMA dan SMK berkualifikasi S1 ke atas sebanyak 67%.

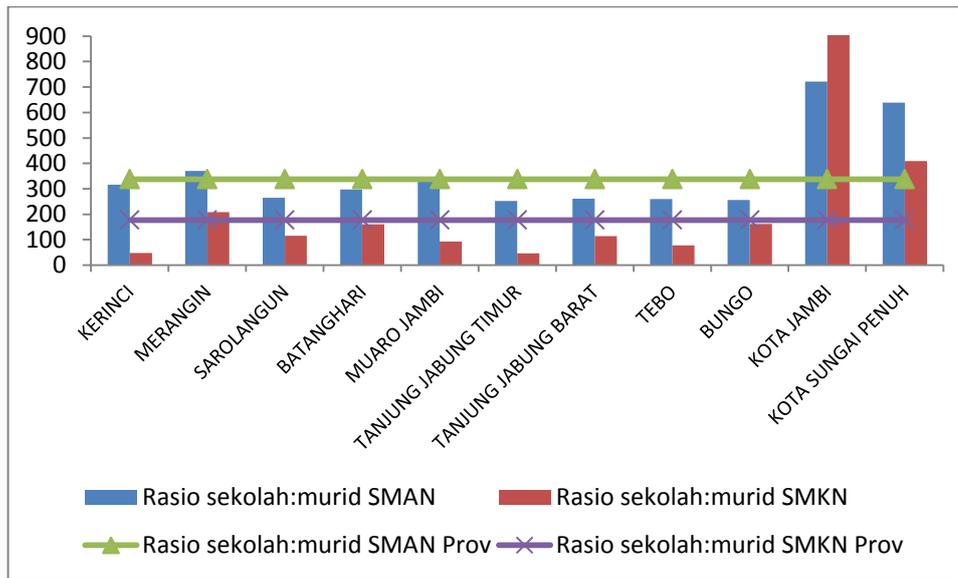


Sumber: Jambi Dalam Angka, 2016

Gambar 3.16 Rasio Guru dengan Murid SMAN dan SMKN pada kabupaten/ kota se Provinsi Jambi Tahun 2015

Bila dilihat sebaran rasio guru dengan murid SMA Negeri di kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi, kabupaten/kota dengan rasio masih dibawah provinsi adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Sei. Penuh. Sedangkan rasio antara guru dan murid SMK Negeri pada kabupaten/ kota yang masih di bawah provinsi adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo. Ketidakmerataan distribusi guru ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi dan melalui kewenangannya pada pendidikan menengah akan dilakukan redistribusi guru maupun re-engineering SMK pada kabupaten dengan rasio guru : murid SMA tinggi tapi rasio guru : murid SMK rendah.

Sementara itu, rasio antara sekolah dengan murid SMA Negeri maupun antara sekolah dengan murid SMK Negeri masih relatif baik. Bila dilihat pada grafik di atas, maka wilayah yang membutuhkan penambahan unit sekolah baru ataupun ruang kelas baru hanya pada Kota Jambi dan Kota Sei. Penuh. Sedangkan pada kabupaten - kabupaten lain relatif masih dalam jumlah ideal, bahkan pada Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo, jumlah murid yang bersekolah di SMK masih sedikit.



Sumber: Jambi Dalam Angka, 2016

Gambar 3.17 Rasio sekolah dengan murid SMAN dan SMKN pada kabupaten/ kota se Provinsi Jambi Tahun 2015

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- Program Pendidikan SMA
- Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Program Pendidikan SMK
- Program BOSDA
- Program manajemen pelayanan pendidikan

**Solusi:**

1. Pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke PT harus terus dilakukan dan ditingkatkan agar kendala dari segi ekonomi tidak ditemukan lagi.

**Permasalahan:**

1. Ujian Nasional berbasis komputer merupakan salah satu kendala bagi SMA dan SMK di Provinsi Jambi, baik dari segi sarana prasarana juga kesiapan siswa dalam menghadapinya.

2. keterbatasan kualitas sarana prasarana sekolah dan guru menyebabkan kualitas lulusan sekolah dari Provinsi Jambi sulit bersaing dengan lulusan daerah lain yang telah maju untuk melanjutkan pendidikan ke PT terakreditasi A.

**Solusi:**

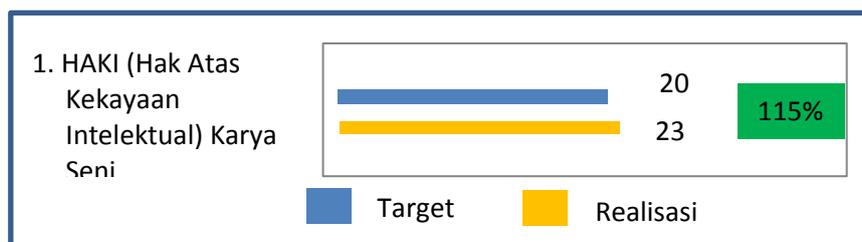
1. Penyediaan kelengkapan sarana prasarana Ujian Nasional berbasis komputer serta mengintensifkan *try out* menggunakan metode tersebut.
2. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.

## Tujuan 5 Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis

### Sasaran 5.1. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan Seni dan budaya

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: 42 Tahun 2009 dan Nomor : 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelestarian kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, yang meliputi aspek-aspek: kesenian; kepurbakalaan; kesejarahan; permuseuman; kebahasaan; kesusastraan; tradisi; kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;kepustakaan;kenaskahan;danperfilman.

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khas Melayu Jambi, pengakuan atas hak kekayaan intelektual (HAKI) karya seni perlu terus dilakukan agar karya seni khas Provinsi Jambi tidak diakui oleh daerah/ negara lain. Capaian atas sasaran Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.18 Capaian sasaran Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya

5.1.1. HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) karya Seni

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Karya Seni

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
HAKI karya seni	NA	NA	NA	10	20	23	115%	70	32,86%

Sumber: Disbudpar Prov. Jambi, 2017

Tabel 3.21 HAKI Karya Seni Provinsi Jambi Tahun 2016

NO	KARYA CIPTA/INOVASI TEKNOLOGI, SOSIAL BUDAYA	NAMA INISIATOR (PERORANGAN/KEL/MASYARAKAT)	ALAMAT INISIATOR (PERORANGAN/KEL/MASYARAKAT)
1	LAGU NEGERI JAMBI	RIVIANDY	JAMBI
2	LAGU MAKMURNYO NEGERI	RIVIANDY	JAMBI
3	LAGU NEGRI PUSAKO	R.IRWANSYAH	JAMBI
4	LAGU SEKAPUR SIRIH	MARZUKI	JAMBI
5	LAGU BUDAYO JAMBI	A.LATIF	JAMBI
6	LAGU SEMANGGANG BILAH	KEMAS MUHAMMAD SHOLIHIN	JAMBI
7	LAGU BUDAYO JAMBI	A.LATIF	JAMBI
8	LAGU PUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH	YUSRIZAL BURHAN	JAMBI
9	LAGU TANAH PILIH	FERRY FEBRIANSYAH DAN EKO FERDIANSYAH	JAMBI
10	LAGU NYANYIAN ANAK RANTAU	A.LATIF	JAMBI
11	NASKAH DRAMA DOSA YANG TERSISA	DIDIN SIROJUDIN	JAMBI
12	NASKAH DRAMA KEPOMPONG	DIDIN SIROJUDIN	JAMBI
13	NASKAH DRAMA MENGGUGAT JALAN SETAPAK	DIDIN SIROJUDIN	JAMBI

Sumber: Disbudpar Prov. Jambi, 2017

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khususnya budaya khas Melayu Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah menggali keragaman budaya yang ada serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelompok-kelompok kesenian dan seniman serta karya cipta/ inovasi teknologi dan sosial budaya.

Pada tahun 2015, HAKI karya seni di Provinsi Jambi baru mencapai 10 HAKI. Jumlah ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 23 HAKI atau terjadi penambahan 13 HAKI baru. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 20 HAKI sehingga persentase capaian mencapai 115% atau termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Namun bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka sampai dengan tahun 2016 capaian kinerja baru mencapai 32,86% atau termasuk dalam kategori sangat rendah. Adapun daftar 13 HAKI karya seni yang dikeluarkan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.22.

Capaian ini merupakan cerminan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan seniman dan penggiat seni di Provinsi Jambi. Selain HAKI, 6 karya budaya tradisi tak benda Jambi ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional pada tahun 2016. Keenam karya budaya tak benda tersebut adalah upacara asyeik, musik kalinong, tauh (betauh), tari kain kromong, musik kromong mandi angin dan tale nek jei (tale keberangkatan haji)

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah:

- Program Pelestarian dan Pengembangan kebudayaan
- Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
- Program pengelolaan keragaman budaya
- Program pengelolaan kekayaan budaya

#### **Permasalahan:**

1. Pada dasarnya Provinsi Jambi kaya akan budaya dan seni, namun belum tergali secara maksimal. Karya seni dan budaya tersebut masih banyak yang belum didaftarkan untuk mendapatkan HAKI ataupun pengakuan sebagai karya budaya baik secara nasional maupun internasional, sehingga riskan untuk diakui oleh orang atau daerah lain

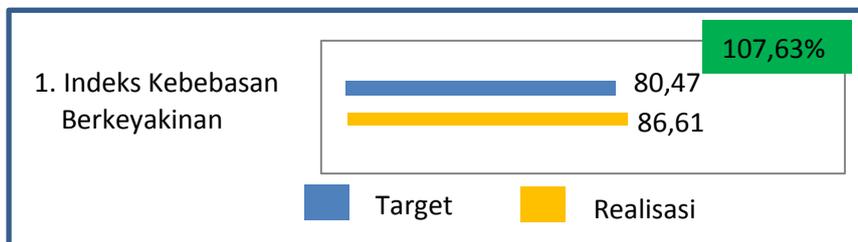
#### **Solusi:**

1. Di tengah arus globalisasi ini, sudah sewajarnya dilakukan pelestarian budaya serta pendaftaran HAKI atas karya seni atau karya budaya sebagai wujud kepedulian dan penghargaan atas karya seseorang atau tradisi suatu daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi harus terus menggali dan memfasilitasi pendaftaran HAKI karya seni dan pendaftaran karya budaya untuk mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.

Sasaran 5.2. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif melalui pembinaan dan pemantauan orang asing, menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik Adapun capaian sasaran meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.19 capaian sasaran meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama

5.2.1. Indeks Kebebasan Berkeyakinan

Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebebasan Berkeyakinan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016 Target	2016 Realisasi	2016 % capaian		
Indeks kebebasan berkeyakinan	84,49	79,11	76,67	76,67*)	80,47	86,61*)	107,63%	99,47	87,08%

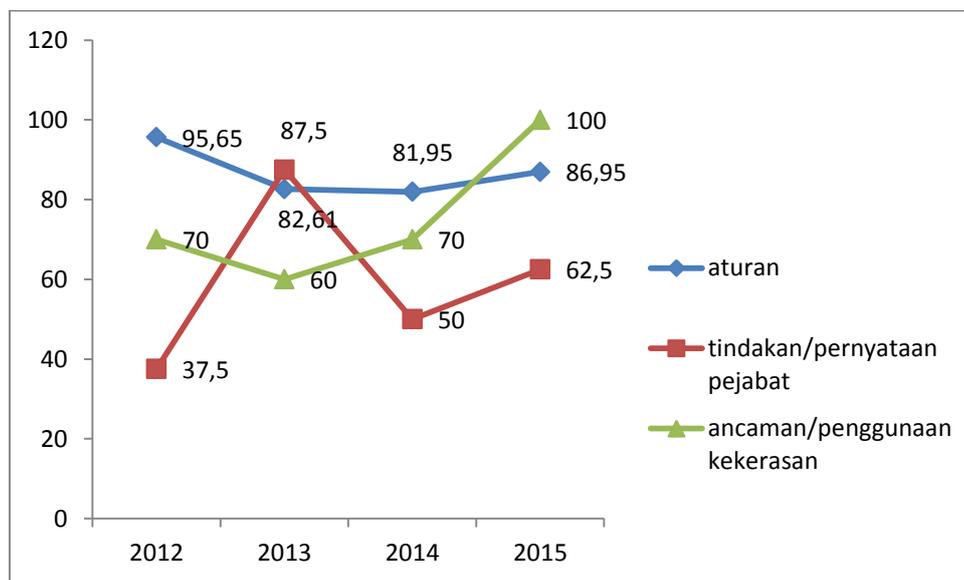
Sumber: BPS, 2016

Ket: \*) data tahun 2015 yang dirilis tahun 2016

Indeks kebebasan berkeyakinan dihitung berdasarkan tiga hal, yaitu adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama, tindakan/ pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama, serta ancaman/ penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama. Indeks ini dikeluarkan setiap tahun dalam bentuk indeks komposit dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan data yang dikeluarkan pada tahun tertentu

(n) merupakan data kondisi tahun sebelumnya (n-1). Oleh sebab itu, data yang dicantumkan sebagai capaian tahun 2016 merupakan data yang dikeluarkan pada Agustus 2016 dan merupakan kondisi tahun 2015.

Berdasarkan data indeks kebebasan berkeyakinan di atas, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi tren penurunan indeks dan mengalami perbaikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2016 (kondisi tahun 2015) realisasi indeks kebebasan berkeyakinan Provinsi Jambi terealisasi sebesar 86,61 atau persentase capaian sebesar 107,63% dan masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka capaian ini telah masuk dalam kategori tinggi karena sudah mencapai 87,08%.



Sumber: BPS, 2016

Gambar 3.20 Perkembangan komponen indeks kebebasan berkeyakinan Provinsi Jambi

Indeks kebebasan berkeyakinan dibentuk oleh 3 variabel. Bila dilihat per variabel pembentuk indeks, terlihat bahwa aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya sudah mulai berkurang sehingga meningkatkan skor variabel tersebut. Skor variabel tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan agamanya juga mengalami peningkatan walaupun menjadi pembentuk indeks dengan skor terkecil. Skor terbaik diberikan oleh variabel ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya terkait dengan ajaran agama dimana telah mencapai 100% yang artinya tidak ada lagi ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan terkait agama di Provinsi Jambi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan berkeyakinan adalah pengoptimalan peran Forum Komunikasi Umat Beragama

(FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), sehingga potensi-potensi konflik terkait keagamaan atau permasalahan terkait SARA dapat segera dipecahkan bersama melalui musyawarah untuk mufakat. Adapun program pendukung pencapaian indikator kinerja adalah **program pengembangan wawasan kebangsaan.**

#### Permasalahan;

1. Hubungan antar umat beragama merupakan hubungan yang sensitif dan rentan konflik. Isu-isu agama yang banyak beredar saat ini berpotensi menurunkan indeks kebebasan berkeyakinan.

#### Solusi:

1. Optimalisasi FKUB dan FPK sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan dan memelihara toleransi antar umat beragama

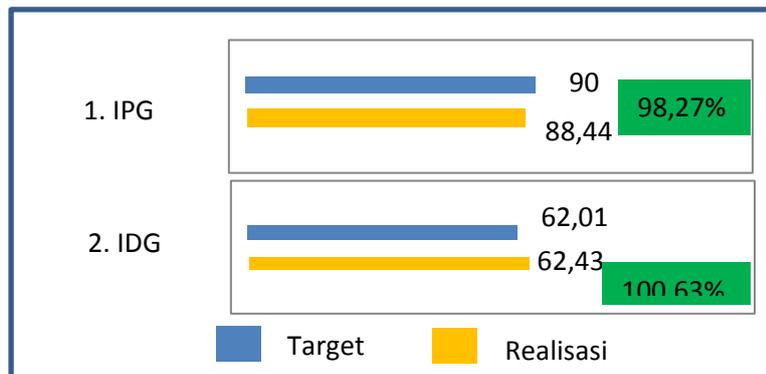
## Tujuan 6 Meningkatkan kualitas SDM Perempuan

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

### *Sasaran 6.1. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan*

Dalam SDGs, isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan dengan target pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap individu khususnya perempuan dan anak; pengakhiran diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender; serta kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya.

Dalam rangka mendukung target SDGs tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan sebagai salah satu sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Capaian sasaran ini pada tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.21 Capaian sasaran meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

### 6.1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan manusia berbasis gender merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian dunia karena perempuan seringkali mengalami diskriminasi seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, subordinasi, dan adanya upaya marginalisasi perempuan. Salah satu ukuran pencapaian pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan gender (IPG) yang merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, demikian pula sebaliknya.

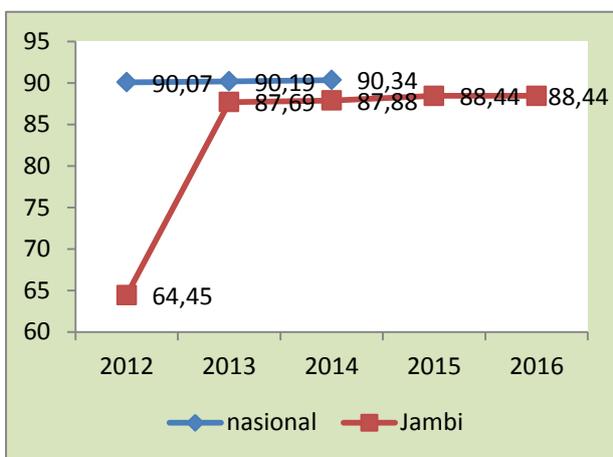
Penghitungan IPG dilakukan setiap tahun dan data yang dikeluarkan pada tahun bersangkutan menggambarkan kondisi tahun sebelumnya. IPG Provinsi Jambi yang dirilis pada tahun 2016 (kondisi Tahun 2015) adalah 88,44 atau masih dibawah target dengan tingkat capaian sebesar 98,27% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 juga masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 93,08%.

Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	64,45	87,69	87,88	87,88*)	90	88,44*)	98,27%	95,01	93,08%

Sumber: BPS, 2017

\*) data tahun n-1



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.22 IPG Provinsi Jambi dibandingkan dengan IPG Nasional

Capaian IPG Provinsi Jambi ini masih dibawah capaian nasional sebagaimana digambarkan pada gambar di sebelah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih efektif guna mendorong capaian ini lebih baik lagi. Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun 2016 adalah **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A),

pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan, perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan, Gerakan Sayang Ibu dan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Selain itu dukungan program-program lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan perempuan turut ambil bagian dalam pencapaian IPG di Provinsi Jambi.

**Permasalahan:**

1. IPG Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun belum memuaskan karena masih menunjukkan gap yang cukup lebar dan masih di bawah capaian nasional. Salah satu penyebabnya adalah budaya masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua yang masih kental di wilayah-wilayah tertentu.

**Solusi:**

1. Sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh komponen masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender harus terus dilakukan seiring dukungan kebijakan yang tidak memihak salah satu gender .
2. Perluasan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, sehingga pola hidup tradisional yang tidak mendukung kesetaraan gender perlahan dapat berubah.

**6.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dan cenderung menguntungkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPG yang lebih rendah dari IPM. Di samping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian.

Tabel 3.24 Capaian Kinerja indikator Indeks pemberdayaan gender (IPG)

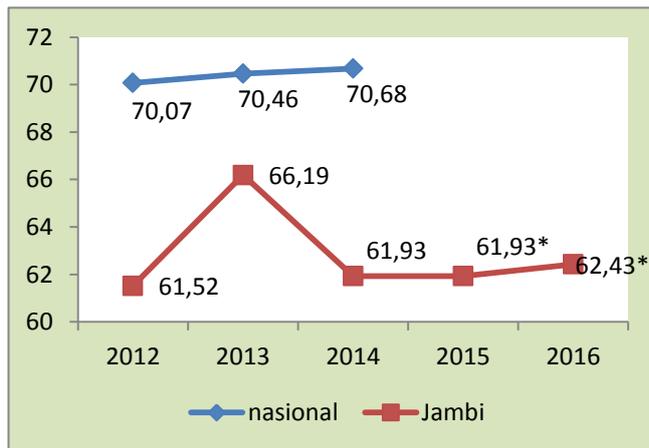
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,52	66,19	61,93	61,93*)	62,01	62,43**	100,67%	67,01	93,17%

Sumber: BPS, 2017

Ket: \*) data tahun 2014 yang dirilis tahun 2015

\*\* data tahun 2015 yang dirilis tahun 2016

Sama halnya dengan IPG, penghitungan IDG juga dilakukan setiap tahun dan data yang dikeluarkan pada tahun bersangkutan menggambarkan kondisi tahun sebelumnya. IDG Provinsi Jambi yang dirilis pada tahun 2016 (kondisi Tahun 2015) adalah 62,43 atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100,67% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 juga masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 93,17%.



Sumber: BPS, 2016

Gambar 3.23 IDG Provinsi Jambi dibandingkan dengan IDG Nasional

Capaian IDG Provinsi Jambi sebagaimana digambarkan pada gambar 3.23, masih berada di bawah capaian nasional dengan capaian yang berfluktuatif. Bila digambarkan dalam diagram pengelompokkan capaian IPM dan IDG, maka Provinsi Jambi masuk dalam kuadran 3 yaitu provinsi dengan IPM dan IDG di bawah rata-rata nasional. Dari 3 komponen pembentuk IDG, yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan; komponen dengan nilai terendah adalah keterlibatan

perempuan di parlemen, disusul oleh komponen sumbangan pendapatan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan dan pendapatan perempuan masih jauh di bawah laki-laki.

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti **program pemberdayaan tenaga kerja, program perwujudan demokrasi makin kokoh** dan lain-lain.

**Permasalahan:**

1. Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dan terbatasnya jumlah perempuan sebagai tenaga profesional.

**Solusi:**

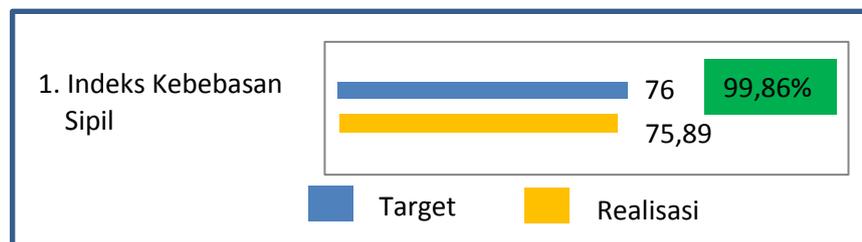
1. Perluasan akses bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia profesional sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.

## Tujuan 7 Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

### *Sasaran 7.1. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum*

Situasi yang kondusif adalah prasyarat bagi kelangsungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk itu perlu diciptakan stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini tidak terlepas pula dari suasana politik, sehingga kesadaran politik dan hukum ikut mewarnai stabilitas keamanan suatu wilayah. Capaian sasaran meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.24 Capaian sasaran meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum

#### 7.1.1. Indeks Kebebasan Sipil

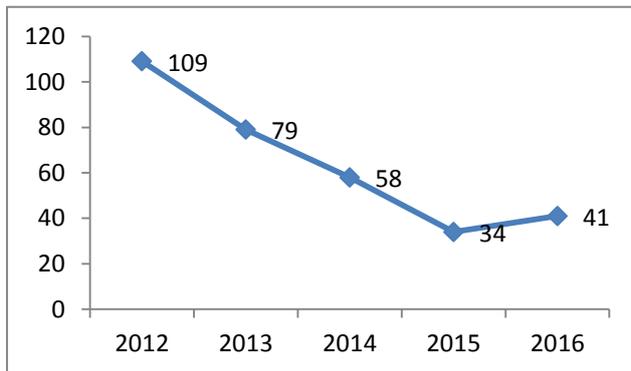
Indeks Kebebasan sipil merupakan indeks komposit dari Indeks Demokrasi Indonesia dan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Sama halnya dengan data-data yang lain yang dikeluarkan oleh BPS, dimana data yang dirilis pada tahun  $n$  merupakan data tahun  $n-1$ , maka capaian tahun 2016 yang dituliskan pada tabel di bawah ini merupakan kondisi tahun 2015.

Tabel 3.25 Capaian Indikator Indeks Kebebasan Sipil

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Kebebasan sipil	86,23	84,95	78,23	75,89	62,01	75,89*)	99,86%	77,9	97,42%

Sumber: BPS, 2016

Ket: \*) data tahun 2015 yang dirilis tahun 2016



Sumber: Satpol PP Prov. Jambi, 2017

Gambar 3.25 Jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi

aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dan indikator ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dengan skor 0 pada kedua indikator tersebut. Kedua indikator dengan skor 0 tersebut merupakan indikator pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, atau dapat disimpulkan bahwa masih sering dijumpai aksi unjuk rasa dengan kekerasan di Provinsi Jambi baik oleh aparat pemerintah maupun oleh masyarakat.



Gambar 3.26 Salah satu aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indeks kebebasan sipil di Provinsi Jambi menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi hampir pada seluruh indikator variabel, kecuali indikator ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama dan indikator aturan tertulis yang diskriminatif

dalam hal gender, etnis dan kelompok yang memiliki skor 100. Skor terendah berada pada indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh

aparatus pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dan indikator ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dengan skor 0 pada kedua indikator tersebut. Kedua indikator dengan skor 0 tersebut merupakan indikator pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, atau dapat disimpulkan bahwa masih sering dijumpai aksi unjuk rasa dengan kekerasan di Provinsi Jambi baik oleh aparat pemerintah maupun oleh masyarakat.

Bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah tersebut terus menurun dalam lima tahun terakhir, dan hanya terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2016 yaitu dari 34 kali unjuk rasa pada tahun 2015 menjadi 41 kali pada tahun 2016. Penurunan jumlah unjuk rasa ini juga berimplikasi pada penurunan indeks kebebasan sipil di Provinsi Jambi.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan. Adapun program yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan

**Permasalahan:**

1. Penurunan Indeks kebebasan sipil yang terjadi terus menerus setiap tahun di Provinsi Jambi akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Provinsi Jambi. Pada akhirnya hal ini juga akan berdampak pada situasi ekonomi dan sosial di Provinsi Jambi.

**Solusi:**

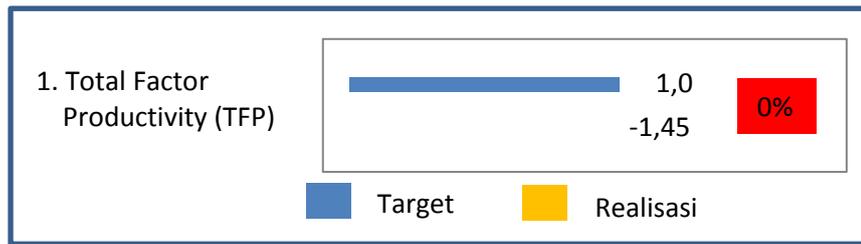
1. Tindak kekerasan dalam hal apapun sudah tidak layak dilakukan pada era demokrasi, untuk itu pendekatan persuasif dan optimalisasi peran Forum komunikasi dan Forum kebangsaan yang ada di Provinsi Jambi harus terus dilakukan.

## Tujuan 8 Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi seringkali menjadi penentu kemajuan suatu daerah. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga digunakan sebagai daya saing suatu daerah. Daya saing bukan lagi ditentukan oleh sumber daya alam dimiliki tetapi lebih ditentukan oleh cara suatu daerah berinovasi teknologi untuk mengelola sumber daya alam tersebut.

### *Sasaran 8.1. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)*

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur sejauhmana sentuhan IPTEK dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah *Total Factor Productivity (TFP)*. Penggunaan *Total Factor Productivity (TFP)* sebagai sebuah metode untuk mengukur peranan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi cukup beralasan. TFP dinilai oleh para penggunanya sebagai sebuah ukuran produktivitas menyeluruh yang telah mendapat pengakuan dan diterima tidak hanya dalam pembuktian teoretis, melainkan juga dalam praktik pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi. Capaian sasaran meningkatnya TFP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.27 Capaian sasaran Meningkatnya TFP

8.1.1. Total Factor Productivity (TFP)

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Solow, faktor input tenaga kerja dan modal adalah determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di luar tenaga kerja dan modal, ada faktor yang sering disebut dengan total factor productivity (TFP) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain total TFP menjelaskan peranan faktor lain diluar faktor tenaga kerja dan modal.

Di balik konsep TFP ini, sebenarnya yang mau diketahui adalah pengaruh *technological progress* (perkembangan teknologi) seperti penguasaan teknologi produksi, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja, kemampuan penguasaan teknologi dan lain sebagainya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara empiris jelas tidak mudah untuk mengetahui pengaruh dan peran teknologi ini karena sifatnya yang *embodied* kedalam peran modal dan tenaga kerja itu sendiri. Akan tetapi "pesan" penting berkaitan dengan upaya mendekomposisi peran teknologi dalam proses ini sesungguhnya adalah untuk mengetahui peran *managerial* dalam setiap proses produksi. Dengan demikian, perumusan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas akan lebih mudah.

Tabel 3.26 Capaian Indikator Total Factor Productivity (TFP)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Total Factor Productivity (TFP)	NA	NA	NA	NA	1,0	-1,45	0%	77,9	0%

Sumber: Bappeda Prov. Jambi (hasil analisis), 2017

Realisasi indikator TFP Provinsi Jambi pada tahun 2016 adalah sebesar -1,45 atau terealisasi 0% dan termasuk dalam kategori **sangat rendah**. Nilai TFP yang negatif secara umum menunjukkan bahwa penguasaan teknologi di Provinsi Jambi masih lemah atau dengan kata lain faktor teknologi sangat kecil bahkan tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan TFP di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Namun demikian, kelesuan ekonomi dan tuntutan pengurangan tingkat pengangguran merupakan sisi yang saling bertolakbelakang dan tidak terpisahkan. Kemajuan teknologi akan berpengaruh terhadap pengurangan kebutuhan tenaga kerja yang bila tidak didukung oleh pertumbuhan yang tinggi akan menimbulkan banyak pengangguran. Adapun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan TFP adalah

1. Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan.
2. Program Penelitian dan Pengembangan
3. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah

**Permasalahan:**

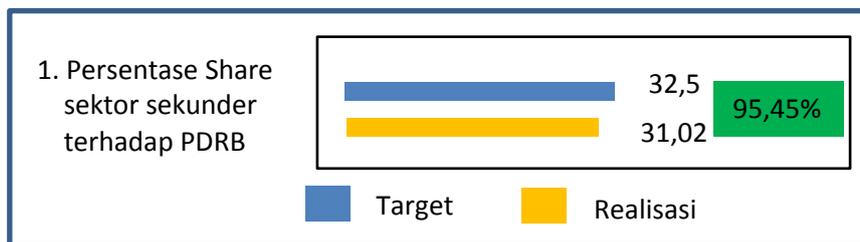
1. Penguasaan teknologi di Provinsi Jambi masih rendah, sehingga tidak mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di saat perekonomian dunia mengalami kelesuan.

**Solusi:**

1. Pelaku industri, khususnya industri pengolahan perlu meningkatkan pengembangan dan penelitian untuk melakukan inovasi, adopsi teknologi dan pengembangan teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan TFP

*Sasaran 8.2. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah*

Perubahan struktur ekonomi disebut juga transformasi struktural, yang berarti rangkaian perubahan ekonomi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Capaian sasaran perubahan struktur ekonomi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.28 Capaian sasaran perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah

**8.1.1. persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB**

Struktur ekonomi Provinsi Jambi masih ditopang oleh sektor primer. Hal ini bisa dilihat dari share sektor primer terhadap PDRB Provinsi Jambi. Bila ingin mewujudkan perubahan struktur ekonomi atau mengurangi share sektor primer dan mengalihkannya pada sektor sekunder maka indikator yang bisa dijadikan alat ukur adalah besarnya presentase share sektor sekunder terhadap PDRB.

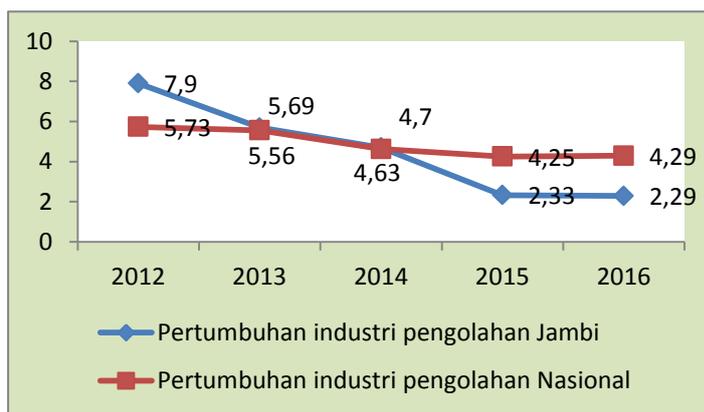
Bila dilihat dari persentase capaian kinerja tahun 2016, persentase realisasi indikator ini masih dalam kategori **sangat tinggi** karena mencapai 95,47%, namun masuk dalam kategori sedang bila dibandingkan dengan target akhir.

Tabel 3.27 Capaian Indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Persentase share sektor sekunder terhadap PDRB	18,34	18,70	18,92	18,38	19,0	18,14	95,47	24,0	75,58

Sumber: BPS, data diolah, 2017

Berdasarkan data capaian indikator ini, sebagaimana tergambar pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 walaupun dalam angka yang sangat kecil.



Sumber: Disperindag, 2017

Gambar 3.29 Pertumbuhan Industri Pengolahan Provinsi Jambi dibanding Nasional 2012-2016

Namun tren penurunan share sektor ini mulai terlihat pada tahun 2015 dan terus menurun hingga tahun 2016. Oleh karena peningkatan dan penurunan share ini sangat kecil, dapat pula disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun belum terjadi perubahan struktur ekonomi di Provinsi Jambi.

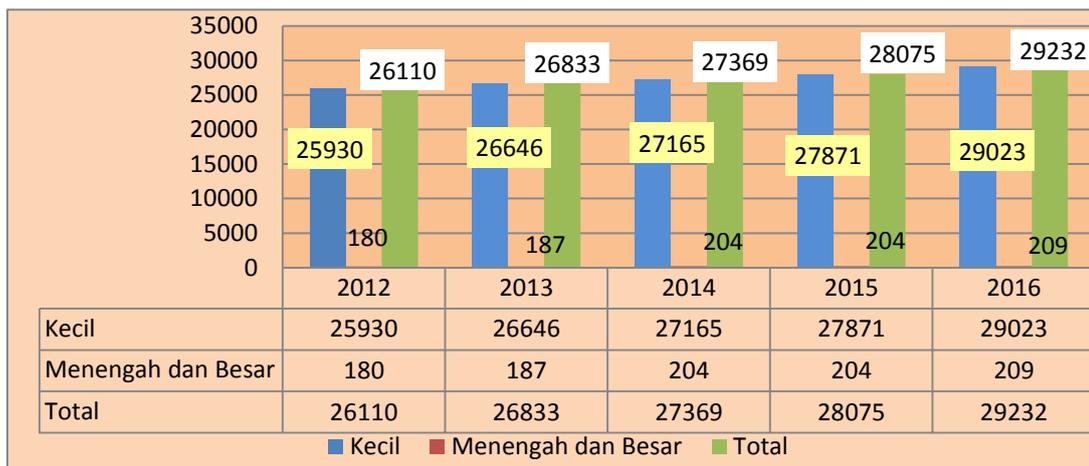
Penurunan share sektor sekunder ini sejalan dengan pertumbuhan sektor industri Pengolahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang terus menurun, dimana pada tahun 2012 pertumbuhan sektor industri pengolahan sangat menggembirakan yaitu sebesar 7,90 persen, lebih tinggi bila

dibandingkan dengan pertumbuhan industri pengolahan nasional yang berada pada angka 5,73. Namun mulai tahun 2013 pertumbuhan industri pengolahan di Provinsi Jambi terus menurun dibawah pertumbuhan nasional, dengan pertumbuhan sebesar 5,69 persen pada tahun 2013; 4,7 persen pada tahun 2014; 2,33 persen pada tahun 2015 dan terus menurun hingga 2,29 persen pada tahun 2016. Penyebab utama menurunnya pertumbuhan industri pengolahan Jambi mulai tahun 2013 hingga 2016 disebabkan karena melemahnya permintaan akibat perekonomian global yang sedang lesu, dan tren penurunan harga komoditas unggulan Jambi seperti kelapa sawit dan karet.

Pada dasarnya upaya untuk menggeser share tertinggi pada PDRB Provinsi Jambi dari sektor primer ke sektor sekunder telah dilakukan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan upaya menumbuhkan sektor industri di Provinsi Jambi dalam jangka panjang, melalui penyediaan kawasan di Ujung Jabung, penyiapan sarana prasarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, air dan energi. Namun karena upaya ini adalah upaya jangka panjang, maka belum bisa dirasakan dampaknya karena masih dalam tahap pembangunan.

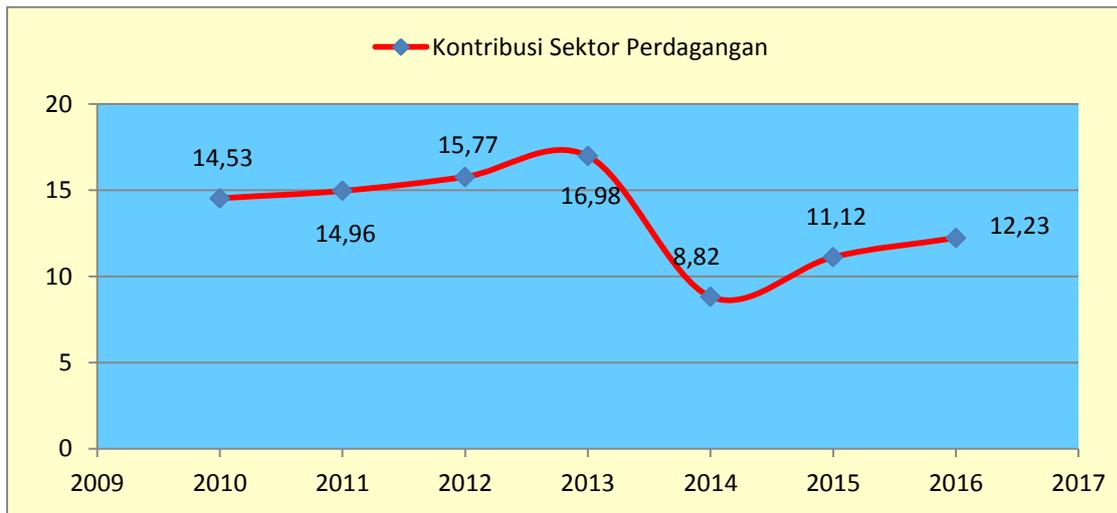
Upaya jangka pendek yang telah dilakukan pada tahun 2016 adalah mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN dan memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan. Upaya-upaya lainnya antara lain

1. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat dengan cara penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan.
2. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan. Dengan cara mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.



Sumber: Disperindag, 2017

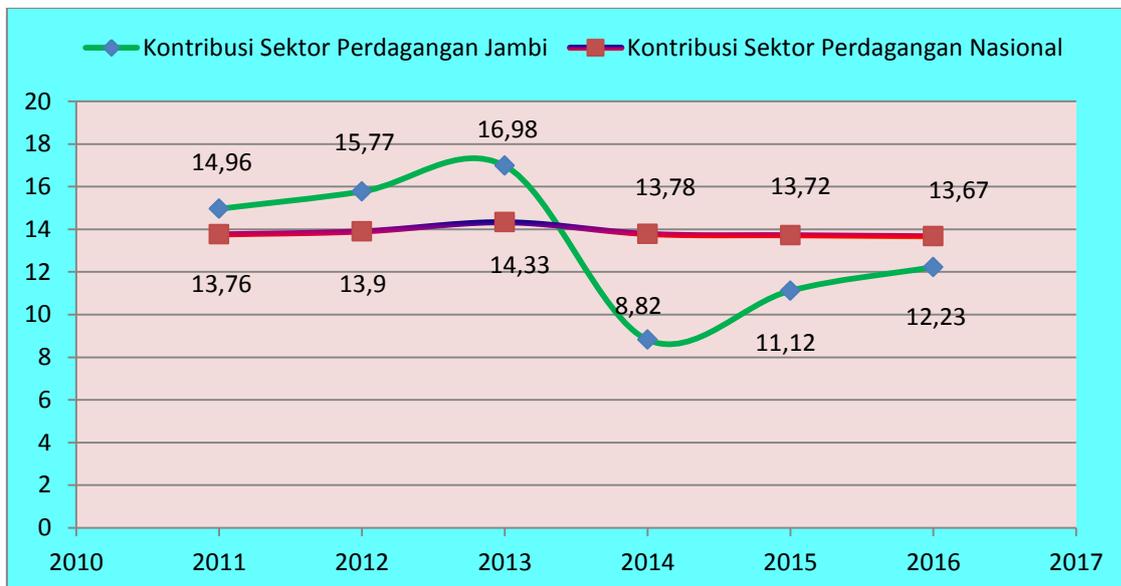
Gambar 3.30 perkembangan Unit usaha perindustrian



Sumber: Disperindag, 2017

Gambar 3.31 Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi

Adapun perkembangan jumlah Unit Usaha dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk semua skala industri baik industri kecil, industri menengah maupun industri besar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk industri Kecil perkembangan jumlah unit usaha pada tahun 2015 sebanyak 27.871 unit usaha meningkat sebesar 4,1 persen atau 1.152 unit usaha menjadi 29.023 Unit Usaha di tahun 2016.



Sumber: Disperindag, 2017

Gambar 3.32 Kontribusi sektor Perdagangan di Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional

Pertumbuhan industri juga memiliki korelasi dengan perdagangan, karena industri bertumbuh dalam rangka memenuhi kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2016 adalah sebesar 12,23 persen dengan nilai mencapai Rp 5.595,2 Trilyun terhadap Total Produk Domestik Regional Bruto ADHB Provinsi Jambi tahun 2016 yang mencapai nilai Rp 45.735,3 Trilyun. Pada gambar 3.32 dapat dilihat kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi sejak tahun 2010 sampai tahun 2016.



Gambar 3.33 beberapa pelatihan yang dilaksanakan untuk pengusaha IKM

Perkembangan kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2011 hingga 2013 berada diatas kontribusi sektor perdagangan nasional, dimana kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2011 mencapai 14,96 persen, tahun 2012 mencapai 15,77 persen dan 2013 mencapai 16,98 persen sedangkan kontribusi sector perdagangan nasional pada tahun 2011 mencapai 13,76 persen, tahun 2012 mencapai 13,9 persen dan 2013 mencapai 14,33 persen. Namun pada mulai tahun 2014 – 2016 kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi berada dibawah sektor perdagangan nasional. Hal ini tergambar pada gambar di atas.

Berkaitan dengan kontribusi sektor perdagangan tersebut diatas, hal-hal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi antara lain :

1. Fasilitasi Pelaku Usaha
2. Promosi
3. Advokasi dan Peningkatan Kerjasama (Kemitraan)

Guna mendukung pencapaian indikator kinerja ini program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
2. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

#### Permasalahan:

1. Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB belum sesuai dengan harapan, karena sektor primer belum bergeser dan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap

PDRB Provinsi Jambi. Hal ini terkait dengan belum berkembangnya teknologi di Provinsi dan kurangnya sarana prasarana penunjang industri.

**Solusi:**

1. Penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri sedang mendorong penguasaan teknologi di Provinsi Jambi.
2. Dalam hal peningkatan usaha industri kecil, menengah dan besar maka perlu penumbuhan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan sistem pendukung usaha, Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, Pemberdayaan usaha skala mikro

## Tujuan 9 Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian

Kondisi eksisting Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi andalan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk berasal dari sektor pertanian. Namun masalah krusial yang muncul adalah kesejahteraan petani belum sesuai harapan.

### *Sasaran 9.1. meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal*

Cadangan pangan pemerintah daerah, telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub nomor 12 Tahun 2013. Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2013 tersebut, untuk tahun 2013 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia di Badan Ketahanan Pangan sebesar 70 ton bekerjasama dengan Perum Bulog dalam hal pengelolaannya, dan pada tahun 2014 telah dilaksanakan penambahan cadangan pangan sebanyak 20 ton, sehingga total cadangan pangan pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2014 menjadi 90 ton. Dari total cadangan pemerintah daerah tersebut, telah digunakan sebanyak 12,8 ton untuk membantu masyarakat rawan pangan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga stok cadangan pangan pemerintah per 31 Desember 2015 sebesar 77,2 ton. Adapun capaian sasaran meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal di Provinsi Jambi tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.34 Capaian sasaran meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal

### 9.1.1. Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/hari)

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Berdasarkan neraca bahan makanan Provinsi Jambi tahun 2016 yang berasal dari angka tetap 2015 atau kondisi 2015, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita adalah sebesar 2.854 kkal/kapita/hari dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 80,53. Rincian ketersediaan energi terdiri dari bahan nabati 2.727 kkal/kapita/hari dan bahan hewani sebesar 126 kkal/kapita/ hari. Hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012) dan ketersediaan protein minimal 57 gram/kap/hari, namun belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 3.208 kkal/ kapita/hari atau terealisasi sebesar 88,96 dan masuk dalam **kategori tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan sebesar 3.217 kkal/kap/hari maka capaian ini baru mencapai 88,72% atau kategori tinggi.

Tabel 3.28 Capaian indikator ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Ketersediaan Energi(Kkal/Kap/hari)	3.113	3.186	3.217	3.204	3.208	2.854*	88,96	3.217	88,72

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Ket: \*Berdasarkan neraca bahan makanan tahun 2016 (Angka tetap 2015)

Ketersediaan ini juga belum memenuhi standar pola pangan harapan, dan belum sesuai komposisi pangan yang diinginkan, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.29 Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2016 (Angka Tetap 2015)

No.	Kelompok Bahan	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)*	Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari)
	Pangan		
1	Padi-Padian	1.319	1.200
2	Umbi-Umbian	152	144
3	Pangan Hewani	118	288
4	Minyak dan Lemak	716	240
5	Buah/Biji Berminyak	217	72
6	Kacang-Kacangan	57	120
7	Gula	133	120
8	Sayuran dan Buah	143	144
9	Lain-Lain		72
	Jumlah	2.854	2.400

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2017

Ket \* : Angka Tetap 2015.

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan angka tetap produksi bahan pangan tahun 2016 ketersediaan energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang, masih didominasi oleh kelompok padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula, sedangkan ketersediaan dari kelompok bahan pangan hewani, kacang-kacangan masih belum terpenuhi.

Ketersediaan bahan pangan dari kemampuan produksi daerah dan kebutuhan konsumsi penduduk Tahun 2015 (Angka Tetap) dan Angka Ramalan II Tahun 2016 pada beberapa komoditi strategis bila dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan PPH, secara rinci dapat dilihat pada tabel Ketersediaan Pangan dari Kemampuan Produksi Daerah, seperti yang ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.30 Kondisi Ketersediaan dari Kemampuan Produksi Tahun 2015 (ATAP) dan Tahun 2016 (ARAM II), Jumlah Konsumsi Penduduk dan Kebutuhan Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Komoditas	2015				2016*			
		Ketersediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdasarkan PPH		Ketersediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdasarkan PPH	
				Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi			Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi
1	Padi	304.442	318.096	348.723	312.389	452.879	323.410	354.553	317.620
2	Jagung	45.769	1.021	955	856	98.434	1.038	971	870
3	Kedelai	6.172	15.990	36.666	32.846	15.113	16.257	37.279	33.396
4	K. Tanah	1.007	340	1.030	923	1.828	346	1.047	938
5	K. Hijau	119	340	1.381	1.237	343	346	1.404	1.257
6	Ubi Kayu	41.640	17.691	102.451	91.779	54.056	17.986	104.164	93.314
7	Ubi Jalar	69.866	5.443	25.949	23.246	77.300	5.534	26.382	23.634
8	Daging								
	Ruminansia	7.942	3.742	6.550	5.868	74.961	3.805	6.660	5.966
	Unggas	22.366	26.786	36.480	32.680	51.628	27.326	37.089	33.226
9	Telur	18.301	25.856	39.846	35.696	19.578	6.280	40.512	36.292
10	Ikan	93.897	83.692	137.546	123.129	105.681	85.090	139.846	126.278

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 ketersediaan bahan pangan pada beberapa komoditas seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar, daging ruminansia serta ikan telah mencukupi kebutuhan penduduk. Namun demikian komoditi padi/beras kedelai, kacang hijau, daging unggas dan telur masih belum terpenuhi. Kebutuhan ikan yang secara konsumsi telah memenuhi kebutuhan namun bila mengacu pada pola pangan harapan ketersediaan ikan masih belum mencukupi.

Turunnya ketersediaan energi ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada tahun 2015 dan kemarau panjang yang menyebabkan produktivitas pertanian di provinsi Jambi secara umum menurun. Walaupun demikian, pada tahun 2016 Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan di Provinsi Jambi dengan melakukan **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** yang dipadukan dengan **Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan Program peningkatan produksi ternak.**

#### Permasalahan:

1. Penurunan ketersediaan energi harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi, hal ini berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional yang ingin mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

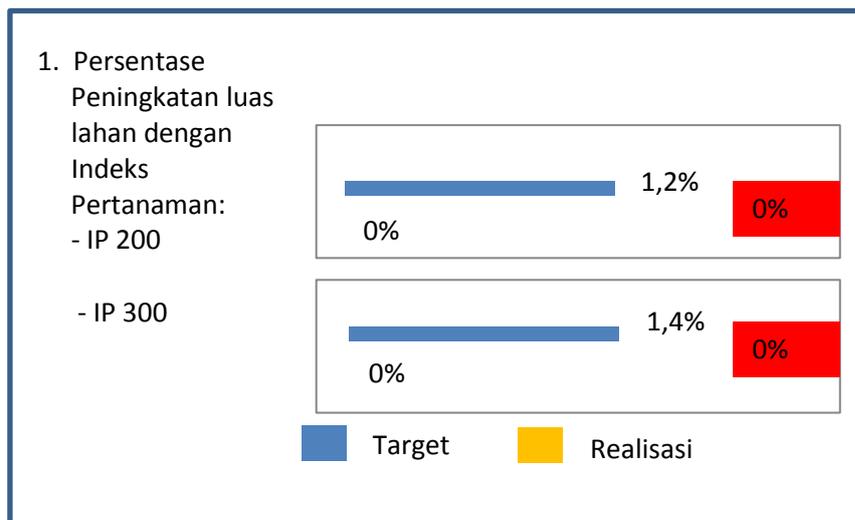
**Solusi:**

1. Meningkatkan upaya peningkatan produksi pangan dan pengawasan distribusi pangan agar harga di tingkat konsumen tidak melambung tinggi.

**Sasaran 9.2. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan**

Pertanian secara umum merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa. *Pertama*, kontribusi produk, dimana produk-produk pertanian sangat menentukan pengembangan sektor ekonomi lainnya melalui penyediaan makanan (konsumsi) dan penyediaan bahan baku (keterkaitan produksi) bagi kegiatan industri. Dalam konteks ekonomi makro, sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap PDRB. *Kedua*, kontribusi pasar, yaitu besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan intensitas pembangunan pertanian merupakan sumber pertumbuhan yang penting bagi pasar domestik untuk produk-produk dari industri, termasuk pasar untuk barang produsen (input produksi pertanian) maupun barang konsumsi. *Ketiga*, kontribusi faktor-faktor produksi, dimana sektor pertanian dianggap sebagai sumber modal investasi melalui proses transfer surplus modal dari pertanian ke sektor non pertanian, proses transfer tenaga kerja dari pertanian ke sektor non pertanian, dalam proses pertumbuhan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja pertanian (pedesaan) ke sektor industri dan jasa (perkotaan) karena terjadi perbedaan tingkat produktivitas diantara dua sektor tersebut. *Keempat*, kontribusi devisa yaitu sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau ekspansi produksi komoditas-komoditas pertanian yang menggantikan impor (substitusi impor).

Khusus untuk tanaman pangan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berbenah untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga dijadikan salah satu sasaran daerah. Adapun capaian sasaran persentase peningkatan luas lahan dengan indeks pertanaman Indeks Pertanaman (IP) 200 dan IP 300 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.35 Capaian sasaran meningkatnya indeks pertanian pada lahan tanaman pangan

### 9.2.1. persentase peningkatan luas Lahan dengan IP 200 dan IP 300

Pemerintah Provinsi Jambi berkeinginan meningkatkan produksi beras secara berkelanjutan, salah satu skenario yang dilaksanakan adalah memperluas areal tanam melalui peningkatan indeks pertanian (IP) menjadi IP 200 dan IP 300. Indeks pertanian (IP) menunjukkan kekerapan pertanian pada sebidang lahan. Kendala yang sering muncul dalam peningkatan Indeks Pertanian padi, antara lain, 1) Ketersediaan air sepanjang tahun di beberapa daerah, 2) Serangan hama dan penyakit (akibat dari masa tanam yang berbeda dengan tanaman sekitarnya), 3) Penggunaan benih varietas genjah dengan pilihan varietas terbatas, 4) Teknologi dan alat olah tanah yang terbatas.

Tabel 3.31 Capaian indikator persentase peningkatan luas lahan dengan IP 200 dan IP 300

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Persentase peningkatan luas lahan dengan IP:									
- IP 200	NA	NA	NA	(35.061Ha)	1,2	0*	0*	(37.662Ha)	0*
- IP 300	NA	NA	NA	(1.400 Ha)	1,4	0*	0*	(1.521,79 Ha)	0*

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi, 2017

Ket: \*data tahun 2016/ kondisi tahun 2015, data kondisi tahun 2016 belum dirilis

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi indikator ini adalah 0%. Realisasi 0 terhadap indikator peningkatan menunjukkan bahwa realisasi tahun 2016 sama dengan realisasi tahun 2015. Pada tahun 2017 BPS belum merilis data luas lahan pertanian baik secara umum maupun lahan dengan IP 200 dan IP 300. Oleh karena data realisasi tahun 2016 tidak didapat sehingga digunakan data tahun 2015 dan hal ini menyebabkan seolah-olah tidak ada peningkatan di tahun 2016 atau nol atau **sangat rendah**.

Pada dasarnya, pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal untuk merealisasikan target pada indikator ini, hal ini dapat dilihat pada capaian indikator sektor pertanian pendukungnya yang digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.32 Capaian sektor pertanian tanaman pangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Capaian Setiap tahun	
				2015	2016
1	2	3	4	5	6
1.1	Persentase peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman (IP 200)	%	35.061	35.061	35.061
1.2	Persentase peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman (IP 300)	%	1.400	1.400	1.400
1.3	Produktivitas padi	Kwt/ha	44,31	44,31	45,02
1.4	Produktivitas jagung	Kwt/ha	60,94	60,94	56,68
1.5	Produktivitas kedele	Kwt/ha	13,72	13,72	13,49
1.6	Peningkatan Nilai Produktivitas Tanaman Pangan	Kw/Ha	3	3	-
1.7	Nilai Peningkatan Produksi padi	Ton GKG	541.486	541.486	791.133
1.8	Nilai Peningkatan Produksi jagung	Ton GKG	51.724	51.712	81.639
1.9	Nilai Peningkatan Produksi kedelai	Ton GKG	6.732	6.732	9.361
1.10	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%			
	- Tanaman Sayur-sayuran	Ton	365.614	365.614	266.660* **
	- Tanaman Buah-buahan	Ton	366.221	366.221	296.057* **
	- Tanaman Biofarmaka	Kg	3.379.582	3.379.582	6.490.00 0***
	- Tanaman Hias	Tangkai	26.299	26.299	45.918** *
1.11	Persentase peningkatan dan pengetahuan	%	0,20	0,20	0,20

	keterampilan SDM Pertanian				
1.12.A	Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Pangan	%	105,35	105,35	107,94
1.12.B	Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Hortikultura	%	101,74	101,74	103,95

Sumber : Berita Resmi Statistik Tahun 2016 dan Berita Resmi Statistik Januari 2017,  
Berita Resmi Statistik November 2016  
Bidang Lingkup Dinas Pertanian Tahun 2016

Catatan : \* Berdasarkan angka BPS untuk Triwulan III Tahun 2016

\*\* Berdasarkan angka BPS untuk Angka Ramalan II (ARAM II) Tahun 2016

\*\*\* Berdasarkan angka Tetap 2015

Produktivitas jagung mengalami penurunan dari Tahun 2015 sebesar 4,26 Kw/Ha (6,99%), Produktivitas Kedele sebesar 0,23 Kw/Ha (1,68%), Peningkatan Nilai Produktivitas Tanaman Pangan belum mengalami peningkatan karena adanya penurunan produktivitas pada komoditi jagung dan kedele, Produksi Hortikultura pada komoditi sayur-sayuran sebesar 98.954 Ton (27,07%) dan buah-buahan sebesar 70.164 Ton (19,16%) sehingga persentase peningkatan produk hortikultura tidak tercapai.

Pada angka Nilai Tukar Usaha Pertanian Tanaman Pangan (NTUP-P) mengalami kenaikan dari Tahun 2015 sebesar 2,59 (2,46%), dan telah melebihi dari target RPJMD untuk tahun 2016 sebesar sebesar 2,59 (2,46%); begitu pula dengan Nilai Tukar Usaha Pertanian Tanaman Hortikultura (NTUP-H) yang mengalami kenaikan dari Tahun 2015 sebesar 2,21% (2,17%) dan telah melebihi target RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 2,21% (2,17%).

Untuk Produksi tanaman pangan mengalami peningkatan dari Tahun 2015 yaitu pada komoditi padi sebesar 249.647 Ton (46,10%) dan melebihi dari target RPJMD sebesar 125.094 Ton (18,78%), komoditi jagung sebesar 29.927 Ton (57,87%) dan melebihi dari target RPJMD sebesar 24.743 Ton (43,49%) dan komoditi kedelai sebesar 2.629 Ton (39,05%) dan melebihi dari target RPJMD 2.629 Ton (39,05%). Hal ini disebabkan pemanfaatan air dan pengelolaan lahan yang telah membaik dengan adanya kegiatan perbaikan jaringan irigasi, cetak sawah, pembinaan Perkumpulan Petani Pemanfaat Air (P3A) dengan Tata Air Mikro (TAM) serta optimasi lahan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), penggunaan pupuk yang sesuai arahan dengan pembinaan penggunaan pupuk enam tepat (6T), penggunaan bibit unggul juga telah disadari oleh sebahagian petani di Provinsi Jambi akan pengaruh terhadap peningkatan produksi, sistim budidaya dan penanganan pasca panen yang mulai membaik dengan adanya kegiatan survey susut hasil yang menyebabkan produktivitas dapat meningkat walaupun pada tahun 2016 kondisi cuaca yang cukup ekstrim dan tidak menentu, dimana pada awal tahun mengalami kemarau yang panjang dan pada akhir tahun mengalami curah hujan yang cukup tinggi sehingga di beberapa Kabupaten mengalami banjir.

Adapun program yang telah dilaksanakan guna mendukung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

2. Program Peningkatan Produksi pertanian/ perkebunan
3. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

#### Permasalahan:

1. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumberdaya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Menurunnya penggunaan lahan sawah setiap tahunnya rata-rata sebesar 4.909 Ha (2,95%) dan ini terjadi penggunaan lahan irigasi rata-rata pertahun sebesar 105 Ha (0,25%), lahan non irigasi rata-rata pertahun sebesar 4.814 Ha (3,84%). Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan (sawit dan karet) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (*Illegal Mining*). Perkembangan penggunaan lahan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33 Perkembangan Luas Lahan Pertanian di Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015

Tahun	Lahan Sawah (Ha)		Jumlah	Lahan Pertanian	Lahan Pertanian
	Irigasi	Non Irigasi		Bukan Sawah	
2010	41.333	125.312	166.645	3.000.221	3.166.866
2011	42.884	126.715	169.599	3.033.112	3.202.711
2012	46.075	120.686	166.761	3.559.486	3.726.247
2013	47.957	119.666	167.623	3.876.078	4.043.701
2014	40.390	111.154	151.544	3.837.317	3.988.861
2015	40.703	96.429	137.132	3.871.833	4.008.965
Perkembangan 2010 - 2015 (Rata-rata pertahun)					
Ha	-105	-4.814	-4.919	145.269	140.350
%	-0,25	-3,84	-2,95	4,84	4,43

Sumber : BPS 2016 (data diolah)

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik.

Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

## 2. Masih beragamnya produktivitas tanaman pangan yang dihasilkan petani

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.
- Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.
- Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :
  - Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
  - Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
  - Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
  - Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.
  - Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
- Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.
- Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.
- Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

Uraian penjelasan di atas didukung oleh data ketersediaan alat dan mesin pertanian terhadap kebutuhan alat dan mesin pertanian di Provinsi Jambi Tahun 2016 pada tabel berikut.

Tabel 3.34 Kebutuhan dan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan pada Tahun 2016 di Provinsi Jambi

NO	NAMA ALSINTAN	BUTUH (UNIT)	TERSEDIA (UNIT)	KURANG (UNIT)	PERSENTASE KETERSEDIAAN	PERSENTASE KEKURANGAN
1	HAND TRAKTOR	6.498	2.231	4.979	34,33	76,62
2	POWER TRESHER	6.498	1.176	5.322	18,10	81,90
3	POMPA AIR	6.498	887	5.886	13,65	90,58
4	RMU	650	512	138	78,79	21,21
5	TRAKTOR RODA 4	771	34	761	4,41	98,70
6	CULTIVATOR	7.713	52	7.663	0,67	99,35
7	TRANSPLANTER	7.713	88	7.703	1,14	99,87
PERSENTASE RATA-RATA					21,58	81,18

Sumber : *Disperta 2016 (Data diolah)*

### 3. Masih berfluktuatifnya Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura yang dihasilkan

Tanaman hortikultura, khususnya buah – buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur- sayuran, pada saat–saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.

- Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
- Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
- Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

### 4. Relatif masih terbatasnya Managerial Usaha Tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah.

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi

demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Disadari saat ini tingkat pendidikan dan keterampilan petani masih ada yang rendah. Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta masih ada yang belum memiliki wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi sangat tergantung pada bantuan/pemberian pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait dengan rendahnya pendidikan dan kurang dikembangkannya kearifan lokal (*indigenous knowledge*).

Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain :

- Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
- Masih relative Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten / Kota.

#### 5. Persaingan produk import

Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi Jambi umumnya masih relatif rendah sehingga senantiasa dihadapkan persaingan dipasaran regional dan nasional serta internasional. Rendahnya daya saing tersebut antara lain disebabkan oleh :

- Kualitas dan Mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan umumnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi memenuhi standar kualitas ekspor
- Tingkat efesiensi usaha tani saat ini masih perlu diupayakan secara terus menerus agar harga satuan produk yang dihasilkan dapat dapat bersaing dipasaran.
- Masih Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
- Produksi buah-buahan dan sayur – sayuran sering melimpah pada waktu panen raya sehingga sangat sulit untuk dipasarkan dengan harga yang wajar, baik pada pasar regional maupun ekspor.

#### 6. Rendahnya Nilai tambah produk.

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usahatani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dengan menghasilkan beras dan masih relative jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik. Beberapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk tersebut adalah :

- Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
- Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.
- Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.
- Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (*innovation*) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdani, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga mubajir dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (*Good Handling Procedure*) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.
- Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan (terutama benih yang berasal dari CBN Pusat) sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.

#### 7. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

#### 8. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

- Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :
- Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
- Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
- Peralatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
- Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai

- Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
- Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD untuk komoditas Kacang Tanah dari Balit Kabi.
- Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
- Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
- Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
- Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

#### 9. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui . Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT. Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh :

##### a. Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.

- Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.
- Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsin (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

##### b. Masih Kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan

- Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :
- Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
- Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
- Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).

- Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

**Solusi:**

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan dengan melakukan akselerasi peningkatan produksi dan Sekolah lapang Pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) padi, jagung, kedele, perbanyak benih sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, dan kegiatan pembinaan perlindungan OPT.
2. Perbaiki infrastruktur pertanian (optimalisasi pemanfaatan lahan, Pembuatan Tata Air Mikro, rehab Jaringan Irigasi Pertanian serta cetak sawah), Pembinaan dan pengembangan Kedelai dan Jagung.
3. Pembinaan kualitas mutu dan gabah dalam rangka peningkatan rendemen beras di Provinsi Jambi, perbanyak bibit buah-buahan (duku, durian dan jeruk), ekspos hasil pertanian, pelestarian plasma nutfah, pengembangan varietas unggul nenas Tangkit, pembinaan dan pengembangan buah unggulan, pembinaan dan pengembangan agribisnis hortikultura, pengembangan hortikultura pada daerah agrowisata, pengembangan KAHS, analisa usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan usaha pengolahan dan pasca panen, pemantauan harga gabah, usaha perbaikan pasca panen tanaman pangan, penyediaan benih untuk rawa lebak melalui penumbuhan penangkaran benih.
4. Menyediakan Benih yang Bermutu dari varietas Unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan benih yang bermutu menggunakan produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura serta pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi.
5. Meningkatkan Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan melakukan penangkaran benih di tingkat petani, pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyak benih sumber padi varietas unggul lokal.
6. Menumbuhkembangkan Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu dengan mengoptimalkan Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyak benih pokok dan benih sebar, Perbanyak benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS , jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyak benih palawija Alai Ilir.
7. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan membuat demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju.
8. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan secara selektif dengan melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/ tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan

penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan *renovasi lahan sulfat masam* dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada. Peningkatan kesuburan Lahan juga harus terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.

9. Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.
10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul). Hal ini dilakukan mengingat produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Pertumbuhan produktivitas padi rata – rata di Jambi (ARAM II 2016) relatif lebih tinggi dibandingkan rata – rata di provinsi di Sumatera dan rata- rata di Tingkat Nasional. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan. Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat.
11. Keterbatasan modal petani untuk membeli saprodi dilakukan dengan memberikan bantuan Benih , dan saprodi lainnya secara selektif. Namun demikian petani diupayakan menggunakan pupuk alami dengan menggunakan trchokompos dan pengendalian OPT dengan Herbisida alami pula yang tersedia disekitar tempat tinggal.
12. Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan benih unggul bermutu terus dilakukan, agar ketersediaan benih secara 6 tepat bisa terpenuhi, diantaranya mengupayakan kegiatan penangkaran benih di setiap kecamatan dan Kabupaten atau di sentra produksi. Meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi petani dalam mewujudkan efisiensi biaya produksi dan meningkatkan produksi pertanian melalui SLPHT, penerapan PHT dan penggunaan bahan saprodi / pengendali OPT yang sifatnya ramah lingkungan, efisiensi dan efektif seperti penggunaan kompos jerami (*Trichokompos*) sebagai sumber pupuk serta penggunaan agen hayati / biopestisida dalam pengendalian OPT.
13. Mendorong Sinergitas Antar Subsystem Agribisnis. Keberhasilan pengembangan sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan sangat tergantung pada keterpaduan secara utuh antar subsistem (sarana prasarana, on farm, pengolahan dan pemasaran hasil, serta penunjuang). Integrasi antara sub sistem agribisnis tersebut harus dimulai dan dievaluasi termasuk dalam aspek pembiayaan. Disamping itu untuk menjadikan usaha produksi sebagai

pendapatan yang handal, sub sistem produksi harus dilakukan dengan skala ekonomis dengan menerapkan teknologi maju dan dikelola secara profesional.

14. Mempercepat transfer teknologi dan tepat sasaran melalui bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan ke petani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.
15. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder. Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahanya didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan stakeholder, sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.
16. Pemberdayaan petani dan masyarakat. Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu kapasitas aparat pertanian di daerah masih belum memadai untuk dapat mendorong dan mengkoordinasi pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan upaya – upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/pelatihan dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan. Pola pembangunan yang ditetapkan selama ini yang masih diwarnai pendekatan pemberian yang bersifat cuma – cuma sudah mulai dikurangi. Pembangunan saat ini sudah diarahkan dengan pendekatan program dengan melibatkan peran aktif dan sharing dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang seluas – luasnya. Bantuan alsintan sudah mulai dalam bentuk Bantuan Uang muka Alsin (BUMA), dimana petani atau kelompok tani harus menyiapkan dulu dana tambahan pembelian alat, baru dana dari pemerintah diberikan ke kelompok tersebut.
17. Kelembagaan pangan dan agribisnis guna menopang pemberdayaan petani, seperti kelembagaan produksi khususnya kelompok tani, Kelembagaan irigasi khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Kelembagaan lumbung pangan desa

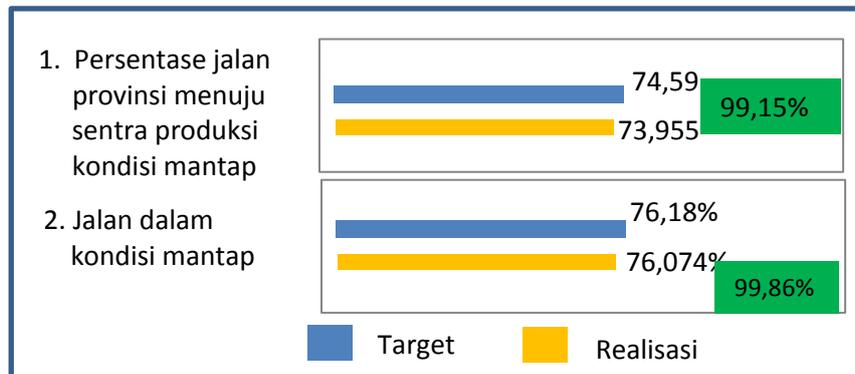
## Tujuan 10 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendukung daya saing. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah. Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta merupakan aspek penting peningkatan produktivitas sektor produksi.

**Sasaran 10.1. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian**

Infrastruktur transportasi dalam fungsinya sebagai fasilitas publik memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yaitu: (1) mendorong pemerataan pembangunan, (2) melayani kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, (3) memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa; dan (4) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan sektor antara, infrastruktur transportasi menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi, merupakan prasarana penghubung antar daerah dan memudahkan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang antar daerah.

Capaian sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian di Provinsi Jambi tahun 2016, dapat dilihat pada capaian indikator sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 3.36 Capaian sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian

**10.1.1. Persentase Jalan Provinsi menuju Sentra Produksi Kondisi Mantap**

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral. Apabila tidak mampu dilaksanakan berakibat pada aktifitas barang dan orang akan terhambat. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan tahun 2015 adalah 1129,906 km.

Tabel 3.35 Capaian indikator Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	NA	NA	NA	73,51	74,59	73,955	99,15	80,0	92,44

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2017

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Capaian indikator persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap pada tahun 2016 adalah sebesar 73,955% atau 583,843 km dari total panjang jalan menuju sentra produksi sepanjang 789,462 km. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2016 sebesar 74,59%, maka persentase capaian ini mencapai 99,15% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini telah mencapai 92,44% atau sangat tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan capaian indikator ini, diantaranya meningkatkan dan memelihara kualitas jalan-jalan menuju sentra produksi yang diiringi dengan pengawasan yang baik. Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah **Program Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan**.

#### Permasalahan:

1. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.

#### Solusi:

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.

### 10.1.2. Jalan dalam Kondisi Mantap

Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2016 difokuskan pada pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2016 jalan dalam kondisi mantap adalah sepanjang 859,561 km dari total panjang jalan kewenangan Provinsi Jambi sepanjang 1129,906 km atau mencapai 76,074% dengan rincian jalan kondisi baik sepanjang 439,099 km dan kondisi sedang 420,462 km. Sedangkan panjang jalan kewenangan provinsi yang dalam kondisi rusak sepanjang 270,344 km, dengan rincian jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 177,809 km dan kondisi rusak berat sepanjang 92,535 km.

Tabel 3.36 Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Jalan dalam kondisi mantap	72,83	74,11	74,82	75,56	76,18	76,074	99,86	82,52	92,19

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2017

Persentase capaian hasil yang dicapai terhadap upaya peningkatan kondisi jalan dalam kondisi Mantap tahun 2016 adalah 99,86% bila dibandingkan dengan target sebesar 76,18% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021 maka capaian sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 92,19% atau kategori sangat tinggi.

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan **Program Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan** dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan berikut:

- jalan Merlung-Lubuk Kambing-Simp.Niam (eff.3.50 km)
- Jalan Sei.Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Bts.Riau (eff.3.50 km)
- Jalan Simp.lagan-Jalan Zona V (Simp.Plabi) (eff.3.50 km)
- Jalan Ma.sabak/dermaga-ds.Rantau Rasau (eff.3 km)
- Jalan Desa Rantau rasau-Ds.Simpang (eff.2 km)
- Pembangunan jalan Ds.Simpang-Ujung jabung (eff.2 km)
- Pembangunan akses jalan pelabuhan nipah panjang (eff.1.50 km)
- Peningkatan structural jalan Sp.Pudak-Suak kandis(eff.2.50 km)
- Jalan sp.Talang duku-Desa kemingking dalam (eff.0.70 km)
- Jalan Ma.Bungo-Peninjauan-Junction-Rantau ikil-Bts. Sumbar (eff.3.25 km)
- Jalan Peninjauan-Lubuk mengkuang-TKA(Bts.sumbar)(eff.3.25 km)
- Jalan Ma.Tebo-Simp.logpon (eff.4.50 km)

- *Jalan Simp.logpon-Padang lamo-Tanjung (eff.4 km)*
- *Jalan simp.sawmil-simp.logpon (eff.4.50 km)*
- *Jalan Simp.Betung bedarah-Pintas-Btd.Kab.Tebo/Kab.Bungo (eff.3 km)*
- *Jembatan Alang-alang (P.51m')*
- *Jembatan Alahan (P.50m')*
- *Jembatan Sei.Kota Raja (P.60m')*
- *Jembatan Serdang, sei.Pemusiran (P.60m')*
- *Jalan Sp.Pelawan –sei.Salak (eff.2 km)*
- *Jalan Sei.Salak-Pkn.Gedang/btg.Asai (eff.1.50km)*
- *Jalan pkn.Gedang-Ma.Talang (eff.1km)*
- *Pembukaan jalan Ma.Talang-Sei.Keradak-Beringin tinggi-Jangkat (eff.2km)*
- *Jalan Pauh-air hitam-Bts.Kab.Sarolangun/Kab.Merangin (eff.3km)*
- *Jalan Pauh –Lubuk Napal-Sipintun-Bts.Sumsel (eff.2.50km)*
- *Jalan Simp.Rengas-Ma.Siau-Dsn.Tuo-Jangkat (eff.1,40 km)*
- *Jalan simp.kodim-simp.Talang Kuwo (eff.6,14 km)*
- *Jalan simp. Talang kawo-simp.Pulau Rengas ulu (11,08 km)*
- *Peningkatan struktur jalan Tempino-Ma.Bulian (eff.5 km)*
- *Jalan Simp.Panerokan-Sei.Bahar (eff.3,50 km)*
- *Jalan Sei.Duren-Sei.Buluh (eff.2 km)*
- *Penanganan Longsoran Ds.Kilangan (eff.41 km)*
- *Jalan Sei.Penuh-Bts.Sumbar (eff.8 km)*
- *Jalan Sulak deras-Bts.Sumbar/Letter W (eff.3 km)*
- *Jalan keliling danau kerinci (Sangg.Agung-jujun-sei.penuh-jujun-lempur) (eff.1.50 km)*
- *Jalan Sei.Penuh-Siulak deras(eff.3km)*
- *Peningkatan jalan dengan sumber DAK terealisasi 99.74% pada ruasJalan ma.Bungo-Junction/Rantau ikil (eff.2 km)*
- *Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan diwilayah Perkotaan terealisasi 95,34% pada ruas*
- *Jalan kol.Pol M.Thaher-Jalan Rangkayo Pingai-Jalan Sentot alibasa (eff.3.70 km)*
- *Peningkatan jalan Bakaruddin-Pattimura-Arif Rahman Hakim (eff.1.70 km)*
- *Peningkatan jalan akses bandara sultan taha jambi (eff.2.80 km)*
- *Peningkatan jalan Hos Cokroaminoto (eff.1.70 km)*
- *Jalan Bagan Pete (eff.1.70 km)*
- *Jalan Basuki Rahmat-Jl.H.agus salim (eff.1.50 km)*
- *Jembatan Desa Jelatang (eff.130 m')*
- *Jembatan Sei.Pulau Musang*
- *Jembatan Sei.abang*
- *Jembatan sei.kuamang*
- *Jembatan sei.Tanjung*
- *Jembatan sei.Tebat*
- *Jembatan Sei.Punti kalo*
- *Jembatan sei.Sisin,Desa Tuo*
- *Jembatan sei.Pandan*
- *Jembatan alai II*
- *Jembatan sei.Pandan II*

- *Jembatan sei.Gemuruh*
- *Jembatan sei.Jantan*
- *Jembatan sei.Air biru*
- *Jembatan sei.Pantai*
- *Jembatan sei.Rantau ikil*
- *Jembatan sei.Ronggo*
- *Jembatan sei.kayu aro*
- *Jembatan sei.Penyantan*
- *Jembatan sei.tali gawe*
- *Jembatan sei.Mengkuang*
- *Jembatan sei.Suak balam*
- *Jembatan sei.Pengian*
- *Jembatan sei.Pening*
- *Jembatan sei.Copet*
- *Jembatan Sei.suak tapa*
- *Jembatan sei.Batang uleh*
- *Jembatan sei.Peninjauan*
- *Jembatan di Provinsi Jambi (Swakelola)*

**Permasalahan:**

1. Peningkatan kondisi jalan baru mampu sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun

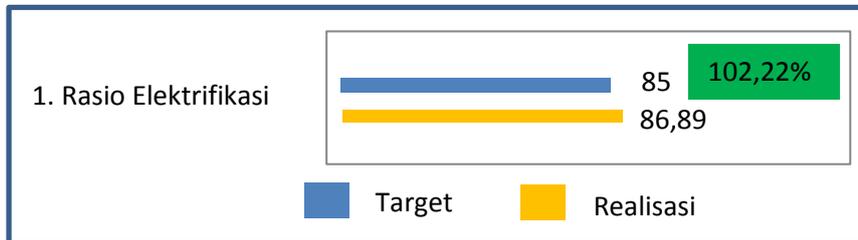
**Solusi:**

- 1 Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

**Sasaran 10.2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik**

Pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jambi maka kebutuhan akan energi listrik juga turut meningkat. Tenaga listrik juga menjadi kebutuhan pokok dalam hal industrialisasi, sehingga suatu wilayah yang energi listriknya tidak bisa bersaing sudah dapat dipastikan industrinya juga tidak dapat bersaing. Sebagai suatu daerah yang sedang mengarahkan perubahan sektor unggulan dari sektor primer ke sektor

sekunder, Provinsi Jambi menjadikan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan. Adapun capaian sasaran ini pada tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.37 Capaian Sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik

### 10.2.1. Rasio Elektrifikasi

Listrik sangat berguna untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti untuk penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Capaian indikator rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

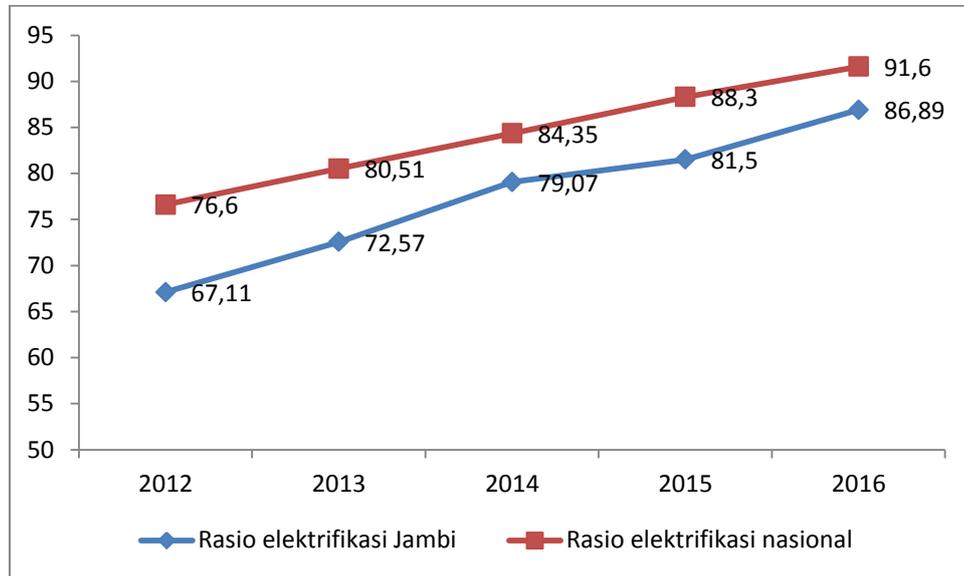
Tabel 3.37 Capaian Indikator Rasio elektrifikasi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Rasio Elektrifikasi	67,11	72,57	79,07	81,5	85	86,89	102,22	96	90,51

Sumber: Dinas ESDM, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun sejak tahun 2012. Pada tahun 2016, capaian indikator rasio elektrifikasi terealisasi sebesar 86,89. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 85 atau

teralisasi sebesar 102,22% dengan kriteria **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021, maka capaian ini telah mencapai 90,51% dan masih dalam kategori sangat tinggi.



Sumber: Dinas ESDM dan Kementerian ESDM, 2017

Gambar 3.38 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional



Gambar 3.39 Pembangkit Listrik PLTMG di Sungai Gelam Jambi

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Jambi selalu berada di bawah nasional, demikian pula pada tahun 2016 ini dimana Provinsi Jambi belum mampu melebihi rasio elektrifikasi nasional yang juga terus meningkat diatas rasio elektrifikasi Provinsi Jambi. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi ini, terutama guna memenuhi kebutuhan listrik di wilayah perdesaan dengan akses yang sulit namun memiliki potensi untuk pengembangan energi

baru terbarukan. Penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi merupakan suatu keniscayaan mengingat hingga saat ini kapasitas terpasang di Provinsi Jambi masih pada 359,5 MW, sementara proyeksi kebutuhan daya sebesar 656 MW.

Tabel 3.38 Kapasitas Pembangkit yang ada di Provinsi Jambi

No	Nama Pembangkit	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Pemilik	Kapasitas Terpasang (MW)	DMN (MW)
<b>I</b>	<b>Sektor Jambi</b>				<b>334,5</b>	<b>334,5</b>
1	PLTD Payo Selincah #1	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
2	PLTD Payo Selincah #2	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
3	PLTD Payo Selincah #3	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
4	PLTD Payo Selincah #4	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
5	PLTD Payo Selincah #5	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
6	PLTD Payo Selincah #6	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
7	PLTD Payo Selincah #7	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
8	PLTG Batang Hari #1	PLTG	Gas	PLN	30	30
9	PLTG Batang Hari #2	PLTG	Gas	PLN	30	30
10	PLTG Batang Hari #3 (sewa)	PLTG	Gas	PLN	18	18
<b>11</b>	<b>PLTG BOT Payo Selincah #1</b>	<b>PLTG</b>	<b>Gas</b>	<b>PLN</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	PLTG BOT Payo Selincah #2	PLTG	Gas	PLN	50	50
13	PLTG Sungai Gelam (CNG)	PLTG	Gas	PLN	90	90
14	PLTMG Sewa #1	PLTG	Gas	sewa	30	30
<b>II</b>	<b>IPP/Lain-lain</b>				<b>25</b>	<b>22</b>
1	PLTMG Sungai Gelam (sewa wilayah S2JB)	PLTMG	Gas	sewa	15	12
2	PLTU Bio Masa (Jambi)	PLTU	Biomass	PLN	10	10
<b>TOTAL</b>					<b>359,5</b>	<b>356,5</b>

Sumber: Dinas ESDM, 2017

Tabel 3.39 Proyeksi neraca daya Provinsi Jambi

Uraian	Sat	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan											
- Rumah Tangga	GWh	673	726	785	841	897	954	963	971	980	988
- Bisnis	GWh	634	736	851	980	1.126	1.288	1.466	1.663	1.880	2.119
- Publik	GWh	77	83	89	95	103	111	120	130	141	154
- Industri	GWh	110	118	127	137	148	159	170	183	197	212
Total Kebutuhan	GWh	1.494	1.665	1.851	2.053	2.274	2.512	2.720	2.948	3.198	3.472
Pertumbuhan	%	12	11,5	11,1	10,9	10,8	10,4	8,3	8,4	8,5	8,6
- Losses (T&D)	%	13,4	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,8	12,7	12,6

Uraian	Sat	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Pemakaian Sendiri	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Total Losses Pemakaian Sendiri	%	18,4	18,3	18,2	18,1	18	17,9	17,8	17,8	17,7	17,6
Faktor Beban	%	47,8	47,9	48	48,1	48,2	48,3	48,4	48,5	48,6	48,7
Produksi	GWh	1.830	2.039	2.263	2.507	2.774	3.060	3.310	3.584	3.885	4.213
Beban Puncak	MW	437	486	538	593	657	723	781	843	912	987
Reserve Margin	%	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Kebutuhan Daya	MW	590	656	729	803	887	976	1.054	1.139	1.231	1.333
Kapasitas Existing (2014)	MW	373	369	365	362	358	354	351	347	344	340
Kebutuhan Tambahan Daya (kumulatif)	MW	217	287	361	441	529	624	706	795	892	998
Kebutuhan Tambahan Daya Tahunan	MW	217	69	74	80	87	95	82	89	97	106
Kapasitas Tahun Berjalan (rencana)	MW	590	656	726	803	887	976	1.054	1.139	1.231	1.333

Sumber: Dinas ESDM, 2017

Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi ini adalah **Program Pengembangan Energi**, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Digester Biogas dan Asesoris;  
Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak Tahun 2010 oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan membangun Biogas dalam rangka memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif. Tahun 2016 Pembangunan Digester Biogas dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten dengan jumlah total sebanyak 238 unit, antara lain : Kab. Sarolangun (34 unit), Kab. Kerinci (34 unit), Kab. Merangin (34 unit), Kab. Bungo (34 unit), Kab. Batanghari (34 unit), Kab. Muaro Jambi (34 unit) dan Kab. Tanjab Timur (34 unit). Adapun perkembangan pembangunan Digester Biogas di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.40 Realisasi pembangunan digester biogas dan aksesoris

Tahun	Realisasi (unit)	Jumlah Digester Biogas
2010	6	6
2011	6	12
2012	11	23
2013	28	51
2014	39	90
2015	28	118
2016	238	356

Sumber: Dinas ESDM, 2017

- Pembangunan PLTMH;  
Kegiatan Pembangunan PLTMH pada tahun 2016 dalah sebanyak 2 (dua) unit, yakni di Desa Masgo Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci dan di Desa Batin Pengambang Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun. Adapun perkembangan pembangunan PLTMH di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.41 Realisasi Pembangunan PLTMH di Provinsi Jambi

Tahun	Realisasi (Unit)	Jumlah PLTMH
2010	-	8
2011	1	9
2012	1	10
2013	3	13
2014	-	13
2015	2	15
2016	2	17

Sumber: Dinas ESDM, 2017

- Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (TM, TR, Trafo)  
Pada tahun 2016 kegiatan pembangunan jaringan baru dilaksanakan sepanjang 8 kms dengan rincian JTR sepanjang 5 kms di Desa Telentam Kec. Tabir Barat Kab. Merangin dan JTM sepanjang 2 kms dan JTR sepanjang 1 kms di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat  
Untuk Kegiatan Pembangunan PLTS dilaksanakan sebanyak 6 (enam) unit, yakni 2 (dua) unit di Desa Pasar Senin Kec. Pengabuan dan Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang Kab. Tanjab Barat, 2 (dua) unit di Pulau Burung Kec. Nipah Panjang dan Desa Sungai Cemara Kec. Sadu

Kab. Tanjab Timur, 1 (satu) unit di Desa Sialang Pungguk Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari dan 1 (satu) unit di Desa Manis Mato Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi. Adapun perkembangan pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.42 Realisasi pembangunan PLTS terpusat di Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah PLTS Terpusat	Lokasi
2012	1	Kab. Sarolangun
	1	Kab. Tanjab Timur
	1	Kab. Batanghari
	1	Kab. Bungo
2013	1	Kab. Muaro Jambi
	1	Kab. Batanghari
	1	Kab. Tanjab Barat
	1	Kab. Tebo
2016	2	Kab. Tanjab Barat
	2	Kab. Tanjab Timur
	1	Kab. Muaro Jambi
	1	Kab. Batanghari
TOTAL	14	

Sumber: Dinas ESDM, 2017

#### Permasalahan:

1. Provinsi Jambi masih mengalami defisit listrik, dimana kapasitas terpasang saat ini adalah 359 MW dan kebutuhan daya tahun 2016 sebesar 656 MW.
2. Rasio elektrifikasi masih di bawah rata-rata nasional.

#### Solusi:

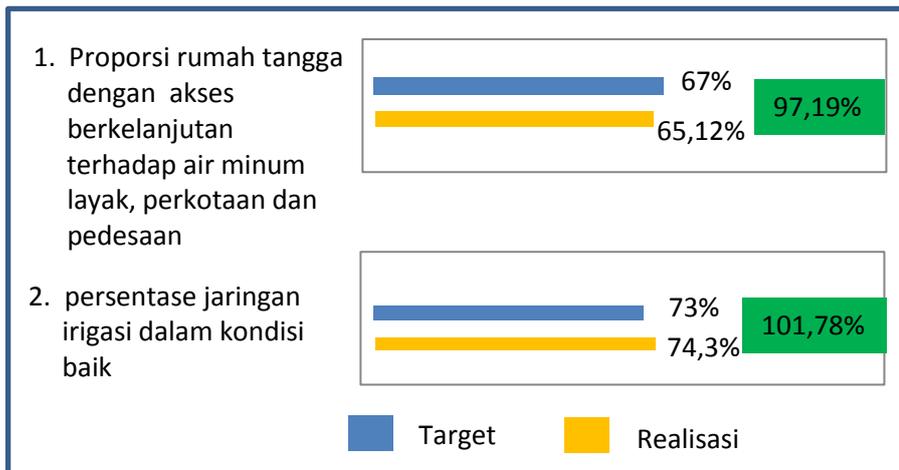
1. Memanfaatkan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif di Provinsi Jambi untuk mengatasi defisit listrik dan sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi Provinsi Jambi

#### *Sasaran 10.3. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi*

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah

memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030. Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah.

Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah irigasi yang baik. Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.40 Capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi

**10.3.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan**

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum

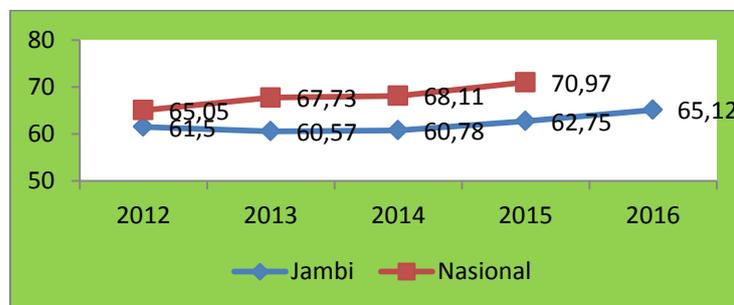
merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudah-mudahan akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Tabel 3.43 Capaian Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	44,62	42,72	42,72	62,75	67	65,12	97,19	95	68,55

Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2017

Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang sedikit berfluktuasi, dimana terjadi penurunan pada tahun 2013 sampai dengan 2014 dan kembali meningkat hingga tahun 2016. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi pada tahun 2016 adalah sebesar 65,12. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 67 atau hanya terealisasi sebesar 97,19% dengan kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021, maka capaian ini baru memenuhi 68,55% dari target akhir.



Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2017

Gambar 3.41 Perbandingan capaian proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Provinsi Jambi dengan nasional

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah:

1. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.

#### Permasalahan:

- 1 Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

#### Solusi:

- 1 Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

### 10.3.2. persentase jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2016 adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha.

Tabel 3.44 Capaian Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016	
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Tar-get	Reali-sasi			% capai-an
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	46,70	55,78	62,69	66,35	73	74,3	101,78	95	78,21

Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari target sebesar 73% pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi mampu mencapai 74,3% atau tercapai 101,78% dengan kriteria **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021 maka capaian ini masuk dalam kriteria sedang dengan capaian sebesar 78,21%.

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik atau fungsional memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada Provinsi Jambi yang mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan fungsional lahan pertanian. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama antar instansi yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian.

Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. Sepanjang tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan **program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan air lainnya ini dilaksanakan kegiatan pendukungnya yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dengan capaian pelaksanaan kegiatan 4.480 Ha. Adapun fokus kegiatan adalah penanganan rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan lantai saluran; serta pintu air. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dinilai efektif karena dapat meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan menurunkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi rusak secara signifikan. Adapun capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik per daerah irigasi kewenangan Provinsi Jambi

dapat dilihat pada tabel di bawah. Berdasarkan tabel dibawah terlihat bahwa DI yang paling fungsional adalah DI Sungai Suban dimana 98% dari seluruh areal telah dialiri oleh jaringan irigasi yang baik. Sedangkan DI Sungai Limun Singkut masih memerlukan upaya pembangunan dan fungsionalisasi jaringan irigasi karena sampai dengan tahun 2016 persentase areal DI yang fungsional baru mencapai 40%.

Tabel 3.45 capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik per Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Jambi

No	DI Potensial Berdasarkan kewenangan Provinsi (berdasarkan Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 Tanggal 21 April 2015)		Realisasi DI fungsional Tahun 2016 (ha)	Capaian %
	Nama Daerah Irigasi	Luas (ha)		
1.	DI.Sungai Batang Uleh	2.043	1.800	88
2.	DI.Sungai Tanduk	1.265	931	74
3.	DI.Sungai Suban	1.121	1.103,84	98
4.	DI.Sungai Limun Singkut	1.600	646	40
<b>Jumlah</b>		<b>6.029</b>	<b>4.480,84</b>	<b>74,3</b>

Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2017

#### Permasalahan:

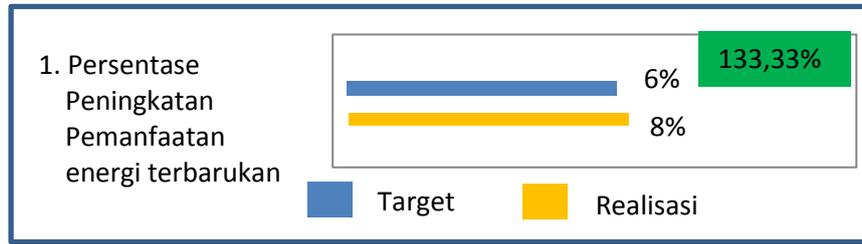
1. Capaian persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak merata pada seluruh Daerah Irigasi kewenangan Provinsi, diman terlihat kesenjangan yang cukup besar antara kondisi DI Sungai Suban dan Di Sungai Limun Singkut.

#### Solusi:

1. Upaya peningkatan kondisi jaringan harus dilaksanakan merata pada seluruh Daerah Irigasi, mengingat pada keempat lokasi Daerah Irigasi tersebut merupakan lumbung padi Provinsi Jambi dan bila produktivitasnya terganggu maka akan mengganggu ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Tujuan 11 Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan

Sasaran 11.1. Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan



Gambar 3.42 Capaian sasaran meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan

**11.1.1. persentase Peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan**

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (*geothermal*). Data-data lokasi potensi *geothermal* di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.46 Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No	Lokasi	Resources (Mwe)			Reserves (Mwe)	
		Speculative	Hypotetic	Predicted	Possible	Proven
1	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2	Gunung Kaca, Kerinci	25	-	-	-	-
3	Sungai Betung, Kerinci	100	-	-	-	-
4	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-
5	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6	Air Dikit, Merangin	25	-	-	-	-
7	Graha Nyabu, Merangin	-	185	-	-	-
8	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2016

Potensi sumber energi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.47 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
1	MERANGIN	1. Air Terjun Sungai Sigerincing Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	
		2. Air Terjun Tuah Rajo Sungai Tembesi Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	
		3. Air Terjun Telentam Desa Telentam Kec. Tabir Barat	
		4. Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		5. PLTA Langkup Danau Pauh, Sungai Lungkup, Kec. Jangkat	
		6. Desa Renah Pellaan Kec. Jangkat	200 KW
		7. Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
		8. Desa Sepantai Renah	
		9. Desa Terapung Air Liki	
		10. Desa Terapung Air Liki Baru	
		11. Desa Terapung Ngaol Ilir	
		12. Desa Tanjung Beringin	
2	TEBO	13. Desa Semambu Kec. Sumay	
3	KERINCI	14. Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci	13 KW
		15. Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180 KW
		16. Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW
4	SAROLANGUN	17. Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
		18. Desa Simpang Narso Kecil	
		19. Desa Padang Jering	
		20. Desa Pulau Langsung	
5	BUNGO	21. Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	10 KW
		22. Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW
		23. Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		24. Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6 KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2016

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada dua tabel berikut ini.

Tabel 3.48 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci

NO	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBAR AIR TERJUN	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARAK DARI KOTA
1	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2	BEDENG IV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4	TALANG KEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5	PANCURAN ARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7	PANCURAN TUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8	TELUN BERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM
10	GUNUNG TUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2016

Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan *system Solar Home System* (SHS) dan biogas yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi.

Tabel 3.49 Capaian indikator persentase peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	NA	NA	NA	NA	6%	8%	133,33	20%	40

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2017

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2016, maka realisasi indikator persentase peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan adalah 8%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 6% atau terealisasi sebesar 133,33% atau masuk dalam **kategori sangat tinggi**. Capaian ini bila dibandingkan dengan target akhir maka baru mencapai 40% atau sangat rendah sehingga memerlukan beberapa terobosan baru agar capaian akhir dapat diwujudkan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah **Program pengembangan Energi**, dengan potensi energi yang telah dimanfaatkan pada tahun 2016 adalah air terjun, matahari dan biogas.

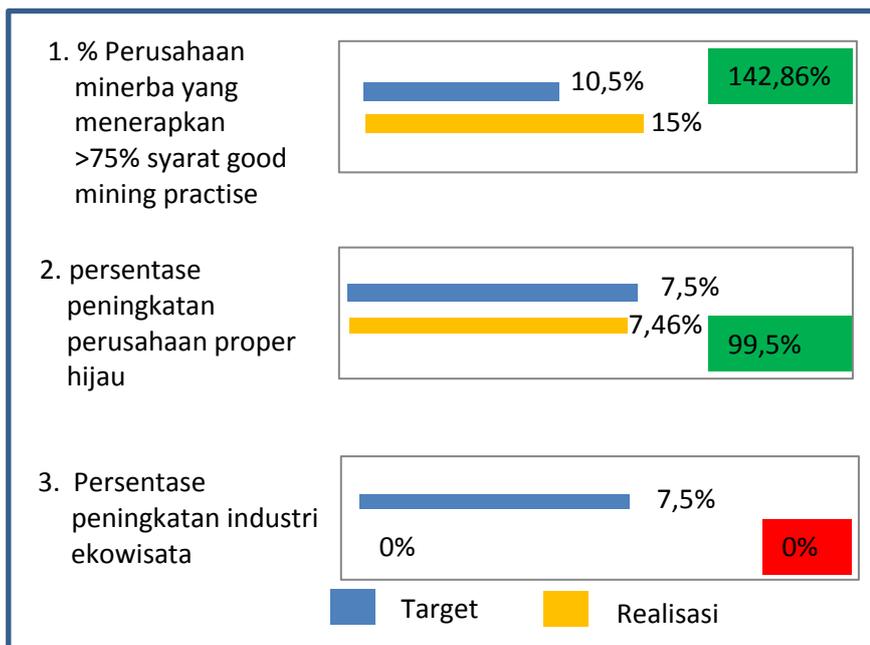
**Permasalahan:**

1. Beberapa potensi energi alternatif seperti kotoran sapi, POME, Biji jarak, tenaga surya, angin, panas bumi dan potensi air terjun belum termanfaatkan secara maksimal

**Solusi:**

1. Terus menggali potensi energi baru terbarukan di Provinsi Jambi dan mengembangkannya menjadi energi listrik sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Jambi dan meningkatkan rasio elektrifikasi

*Sasaran 11.2. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal*



Gambar 3.43 Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberikan dampak ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal

Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak

yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi merasa berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan. Keinginan luhur tersebut dijawantahkan dalam salah satu sasaran jangka menengah daerah, yaitu “meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberikan dampak ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal”. Capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada gambar di atas.

#### 11.2.1. Persentase perusahaan Minerba yang menerapkan >75% syarat *good mining practice*

Di era globalisasi dan reformasi saat ini, beberapa perubahan tuntutan sudah menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan aktivitas pembangunan. Salah satu tuntutan yang wajib diperhatikan dalam melaksanakan aktivitas/ kegiatan di dunia pertambangan, yaitu pelaksanaan aktivitas pertambangan secara baik dan benar (*good mining practice*). Hal ini dianggap penting karena permasalahan umum tambang di Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi.

*Good mining practice* adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dan berlandaskan pada efektivitas dan efisiensi, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa ciri *good mining practice* antara lain:

1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan
2. Kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjanya
3. Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar
4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku
5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya
6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi pemanfaatan mineral
7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang
8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki cukup banyak kekayaan sumberdaya alam ESDM. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang

dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar perusahaan pertambangan yang ada merupakan pertambangan batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan bijih besi, emas dan kuarsa.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, per Januari 2017, IUP yang dinyatakan Clean and Clear (CNC) sebanyak 186 IUP dari total 201 IUP di Provinsi Jambi. Dari 15 IUP yang belum CNC, 7 IUP direkomendasikan untuk dicabut. Data terakhir pada Bulan Oktober Tahun 2016 Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Jambi sebanyak 72 dalam tahap Ekplorasi dan 124 dalam tahap Operasi Produksi. Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi juga terdapat 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). PKP2B adalah suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan batu bara dengan berpedoman kepada UU No. 1/1967 tentang PMA serta UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Tabel 3.50 Data PKP2B di Provinsi Jambi

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHAP KEGIATAN	BAHAN GALIAN	LOKASI
1	PT. KARYA BUMI BARATAMA	EKSPLORASI	BATUBARA	SAROLANGUN
2	PT. SARWA SEMBADA KARYA BUMI	EKSPLORASI	BATUBARA	SAROLANGUN DAN BATANGHARI
3	PT. INTIRTA PRIMA SAKTI	EKSPLORASI	BATUBARA	SAROLANGUN DAN BATANGHARI

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2017

Tabel 3.51 Capaian indikator persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat *good mining practice*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat <i>good mining practice</i>	NA	NA	NA	NA	10,5%	15%	142,86	75%	20%

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2017

Sebelum tahun 2016 data tentang indikator ini tidak dapat diakses, dan sejak dijadikan sebagai indikator kinerja, pemerintah Provinsi Jambi mulai tahun 2016 mulai melakukan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minerba dengan lebih intens dengan melaksanakan **program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan**. Dari target sebesar 10,5% perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat *good mining practice*, Pemerintah Provinsi Jambi telah merealisasikan sebesar 15%, yang artinya terealisasi sebesar 142,86% atau berkinerja **sangat tinggi**. Namun bila dibandingkan dengan target capaian akhir, maka kondisi ini baru memenuhi 20% dari target akhir tersebut atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu ciri *good mining practice* adalah Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan minerba adalah pembayaran *landrent* dan *royalti*. Ketentuan mengenai pembayaran *landrent* dan *royalti* diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Landrent* dan *royalti* dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Pertambangan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.52 Realisasi PNBP bidang pertambangan tahun 2011-2016

TAHUN	LANDRENT (Rp)	ROYALTI (Rp)	TOTAL (Rp)
2011	6.624.870.897	72.800.086.703	79.424.957.600
2012	13.911.967.978	75.904.540.173	89.816.508.151
2013	7.375.299.644	65.339.135.029	72.714.434.673
2014	10.262.610.504	50.761.328.971	61.023.939.475
2015	6.274.673.872	75.839.530.583	82.114.204.455
2016*	6.496.187.933	44.513.286.757	51.009.474.690

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2017

Ket: \*per November 2016

Tabel di atas memperlihatkan penurunan PNBP dari pertambangan karena menurunnya produksi batubara di Provinsi Jambi. Produksi Batubara di Provinsi Jambi dihasilkan oleh Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari dan Muaro Jambi. Sedangkan untuk Bijih Besi di Provinsi Jambi di Produksi oleh PT. Sitasa Energi dan PT. Putra Sarko Mining yang terletak di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Produksi Bijih Besi tahun 2013 mencapai 148.657 ton, sedangkan pada tahun 2014 hanya mencapai 30.003 ton. Terjadi penurunan disebabkan kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah mineral logam.

Tabel 3.53 Jumlah Produksi Batubara dan Bijih Besi

Tahun	Batubara (Ton)	Bijih Besi (Ton)
2009	2.690.971	213.276
2010	4.175.424	305.081
2011	7.760.173	527.096
2012	7.118.038	116.401
2013	7.737.549	148.657
2014	7.797.960	30.003
2015	6.091.552	-
2016	2.244.560	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2017

Ket: \*per November 2016

#### Permasalahan:

Pembinaan dan pengawasan belum menyentuh seluruh Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara

#### Solusi:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia bidang pertambangan mineral dan batubara
3. Meningkatkan sarana dan prasarana, terutama laboratorium pengujian mineral dan batubara
4. Menambah ruang kerja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

#### 11.2.1. Persentase Perusahaan Proper Hijau

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) merupakan salah satu upaya untuk mendorong penerapan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Berbagai kegiatan yang diarahkan untuk penataan perusahaan ini adalah: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*). Hasil penilaian diberikan dengan kriteria emas, hijau, biru, merah dan hitam. Hingga saat ini, belum ada perusahaan di Provinsi yang mendapatkan proper emas.

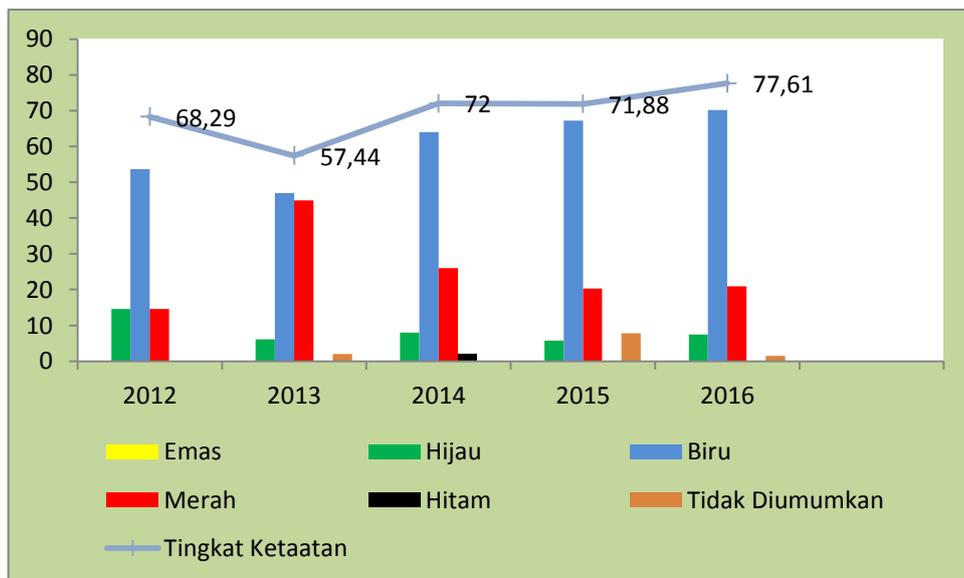
Tabel 3.54 Capaian indikator persentase perusahaan proper hijau

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase perusahaan Proper Hijau	14,63	6,12	8,0	5,77	7,5	7,46	99,5%	15	49,75

Sumber: Dinas LH, 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa perusahaan yang mendapatkan proper hijau berfluktuasi sepanjang tahun 2012-2016. Pada tahun 2016 realisasi indikator ini adalah sebesar 7,46%, belum memenuhi target yang telah ditetapkan atau terealisasi sebesar 99,5% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Namun bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini baru mencapai 49,75 % atau sangat rendah.

Dalam rangka Proper di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan dalam melakukan peningkatan kualitas lingkungan dan ketaatannya terhadap peraturan - peraturan yang berlaku dengan melaksanakan **program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**. Gambar di bawah ini memperlihatkan bahwa tingkat ketaatan berfluktuasi, namun memperlihatkan kecenderungan perbaikan atau peningkatan sejak tahun 2014.



Sumber: Dinas LH, 2017

Gambar 3.44 Tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan Hasil Proper Tahun 2012-2016

**Permasalahan:**

1. Tingkat kesadaran perusahaan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan belum tinggi sehingga menyebabkan hasil penilaian baik bagi suatu perusahaan pada tahun n-1 tidak menjamin hasil penilaian pada tahun n tetap baik atau meningkat.

**Solusi:**

1. Insentif bagi perusahaan yang taat dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan perundang-undangan harus diterapkan dengan jelas, dan bila memungkinkan pencabutan izin sementara bagi perusahaan yang telah melanggar berkali-kali.

**11.2.3. Persentase peningkatan Industri Ekowisata**

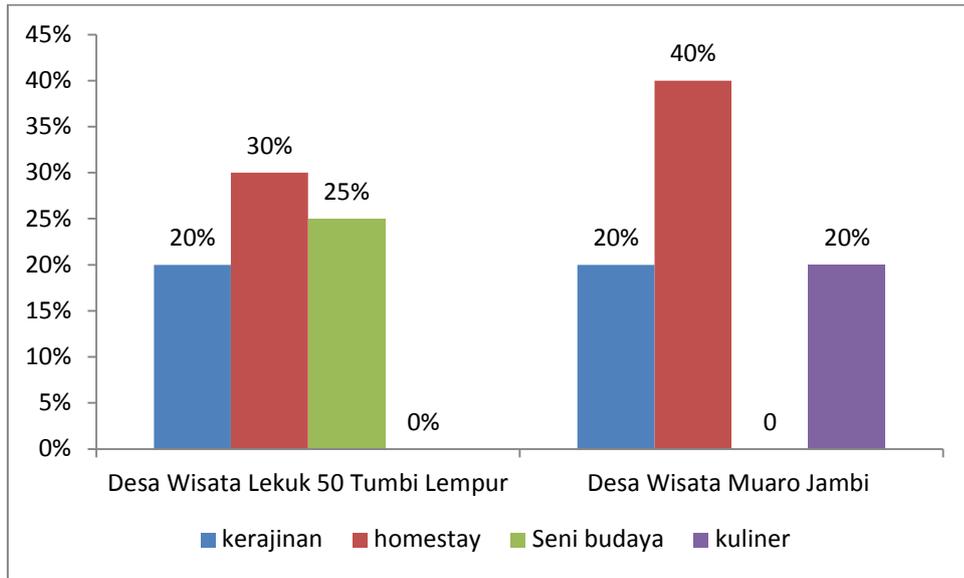
Istilah “ekowisata” dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, dimana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Ekowisata juga dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.

Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam, flora dan fauna yang tidak kalah dari daerah lainnya, dimana terdapat 4 taman nasional yang memiliki ciri khas masing-masing dan dapat dikembangkan untuk mendukung ekowisata. Salah satu bentuk pengejawantahan ekowisata berbasis masyarakat adalah dengan membentuk desa wisata, dimana pada desa wisata ini akan berkembang institusi masyarakat lokal, homestay sebagai sistem akomodasi, edukasi dan konservasi. Pada tahun 2016, terdapat dua desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata di Provinsi Jambi, yaitu Desa Wisata Lekuk 50 Tumbi Lempur dan Desa Wisata Muaro Jambi.

Tabel 3.55 Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan Industri Ekowisata

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase peningkatan industri ekowisata	NA	NA	NA	7%	7,5%	25,8%	344	10%	258

Sumber: Disbudpar, 2017



Sumber: Disbudpar (data diolah), 2017

Gambar 3.45 peningkatan industri ekowisata tahun 2016



Gambar 3.46 Danau Kaco, salah satu destinasi wisata yang terintegrasi dengan Desa Wisata Lekuk 50 Tumbi Lempur

Realisasi indikator persentase peningkatan industri ekowisata pada tahun 2016 adalah 25,8% atau mencapai 344% dari target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut atau masuk dalam **kategori sangat tinggi**. Realisasi ini juga telah melampaui target akhir hingga mencapai 258%.

Berdasarkan gambar 3.45 dapat disimpulkan bahwa dari 4 jenis industri ekowisata yang dikembangkan pada 2 desa wisata yang telah ditetapkan, industri kerajinan dan homestay cukup berkembang walaupun perlu dorongan lebih besar lagi agar lebih optimal. Sedangkan 2 jenis industri lainnya, yaitu seni budaya dan kuliner belum berkembang dengan baik, terutama jenis industri kuliner di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur dan industri seni budaya di Desa Muaro Jambi. Hal ini cukup disayangkan mengingat kedua tempat tersebut memiliki potensi yang besar untuk pengembangan kedua jenis industri tersebut. Oleh karena itu kedepan dibutuhkan pendampingan yang lebih baik dan lebih intensif untuk kedua desa tersebut untuk

memanfaatkan potensi yang mereka miliki, hingga pada akhirnya dapat membantu pengembangan perekonomian pada desa-desa tersebut.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata
2. Program pengembangan destinasi pariwisata

**Permasalahan:**

1. Provinsi Jambi memiliki potensi ekowisata yang cukup banyak, namun belum tergali dan dikelola dengan baik.

**Solusi:**

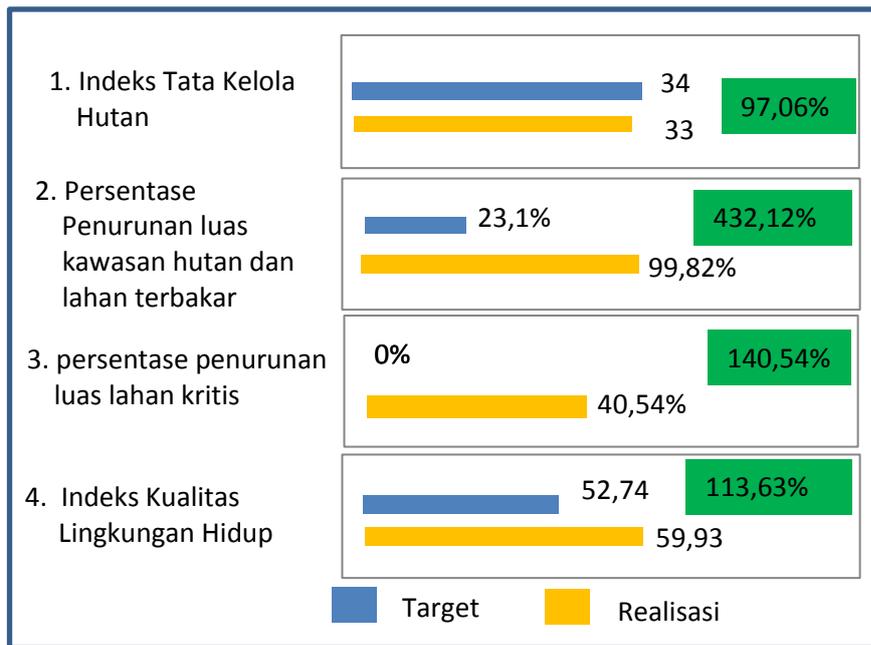
1. Pemberdayaan masyarakat pada daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan ekowisata

*Sasaran 11.3. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan Lahan di Provinsi Jambi*

---

DAS atau Daerah Aliran Sungai adalah kesatuan ruang yang terdiri atas unsur abiotik (tanah, air, udara), biotik (vegetasi, binatang dan organisme hidup lainnya) dan kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan ekosistem. Pengelolaan DAS meliputi tindakan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan DAS berazaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia.

Tutupan lahan merupakan salah satu komponen yang berpengaruh pada kualitas DAS. Luas lahan kritis akibat alih fungsi lahan, illegal logging ataupun kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga dijadikan target sasaran untuk diatasi. Capaian meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi tergambar dari capaian 4 indikator dengan uraian sebagai berikut:



Gambar 3.47 Capaian Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi

### 11.3.1. Indeks Tata Kelola Hutan

Indeks Tata Kelola Kehutanan mengukur 4 (empat) aspek antara lain: (1) Aspek Kepastian Kawasan Hutan, (2) Aspek Keadilan Atas Sumberdaya Hutan, (3) Transparansi Pengelolaan Hutan, dan (4) Kapasitas Penegakan Hukum. Indeks Tata Kelola Kehutanan merupakan salah satu instrumen yang bisa dipergunakan untuk memahami konteks tantangan pembangunan kehutanan dan pada saat bersamaan dapat digunakan untuk melihat peran setiap aktor kunci dalam penguatan tata kelola hutan. Hal ini bermanfaat dalam menetapkan prioritas kebijakan, program dan sejumlah inovasi yang bisa dipergunakan untuk mencapai target-target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Tabel 3.56 Capaian Indikator Indeks Tata Kelola Hutan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Tar-get	Reali-sasi	% capai-an		
Indeks Tata kelola Hutan	NA	NA	39	33	34	33*	97,06	50	66

Sumber: Dinas Kehutanan, 2017

Ket: \* capaian 2015 karena capaian 2016 belum dirilis

Pada tahun 2015, indeks tata kelola Hutan Provinsi Jambi sebesar 33 dan merupakan peringkat dua nasional walaupun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya indeks tersebut turun. Hal ini menunjukkan bahwa indeks tata kelola hutan di seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun tersebut mengalami penurunan. Sementara itu, realisasi tahun 2016 masih menggunakan data capaian tahun 2015 karena data tahun 2016 sampai saat laporan ini dibuat belum dirilis. Bila dibandingkan antara realisasi dengan target tahun 2016, maka capaian indeks tata kelola hutan ini adalah sebesar 97,06 atau kategori **sangat tinggi**, dan bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka capaian ini tergolong sedang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks tata kelola hutan di Provinsi Jambi dengan meningkatkan akuntabilitas internal dan eksternal. Akuntabilitas internal mencakup antara lain, Penetapan RTRW melalui PERDA Nomor 10 Tahun 2013 yang dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pemberian rekomendasi dengan kajian mendalam terhadap izin usaha pertambangan serta pertimbangan teknis untuk pinjam pakai hutan dan lain-lain. Sementara untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dilakukan antara lain dengan penyelesaian tata batas hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan pengaduan-pengaduan serta penyelesaian konflik kehutanan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui **Program perencanaan dan pengembangan hutan**.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi meliputi area dengan luas  $\pm 1.458.934$  ha terdiri dari HL dengan luas  $\pm 175.483$  HP dengan luas  $\pm 981.530$  ha, HPT dengan luas  $\pm 301.922$ . Berdasarkan SK tersebut maka kawasan hutan provinsi Jambi dibagi dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 17 unit kelola KPH yang terdiri dari 16 (enam belas) unit KPHP dan 1 (satu) unit KPHL. Dari 17 KPH tersebut sampai dengan tahun 2016 baru terdapat 5 KPHP yang memiliki organisasi pengelola dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) yaitu KPHP Limau Unit VII Hulu Kabupaten Sarolangun, KPH Unit I Kerinci, KPHP Lubuk Pekak Hulu Landai Kabupaten Merangin, KPHP Tebo Barat dan Tebo Timur di Kabupaten Tebo.

#### Permasalahan:

1. Pengelolaan hutan bukan hanya tugas satu instansi namun tugas seluruh stakeholder yang ada dan saling berkaitan. Degradasi hutan dan konflik kehutanan yang terjadi saat ini memerlukan ketegasan dan komitmen yang kuat dalam penyelesaiannya
2. Penataan batas hutan belum selesai seluruhnya.

#### Solusi:

- 1 Melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam perencanaan dan pengembangan hutan
- 2 Penegakan hukum yang tegas atas kasus-kasus kehutanan
- 3 Penyelesaian penataan batas hutan

**11.3.2. Persentase Penurunan Luas Kawasan Hutan dan Lahan Terbakar**

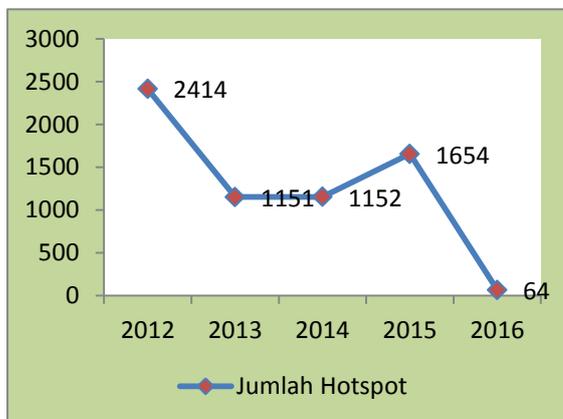
Isu kebakaran hutan dan lahan merupakan isu yang selalu diangkat ke permukaan setiap tahun oleh semua pihak, namun belum terselesaikan dengan tuntas. Isu ini akan ramai dibicarakan pada saat kondisi kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya memburuk akibat kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 3.57 Capaian Indikator Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Tar-get	Reali-sasi	% capai-an		
Persentase penurunan luas Kawasan Hutan dan Lahan terbakar	NA	NA	NA	(130.000 Ha)	23,1%	99,82%	432,12	50% (10.000 Ha)	108,14

Sumber: Dinas Kehutanan, 2017

Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil yang menggembirakan pada tahun 2016, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Dari target penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar sebesar 23,1% atau turun 30.030 Ha dari 130.000 Ha pada tahun 2015, Provinsi Jambi mampu menurunkan hingga 99,82% atau turun seluas 129.765 Ha, sehingga luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2016 adalah seluas 235 Ha. Persentase capaian indikator ini mencapai 432,12% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**, bahkan bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 capaian ini juga telah mencapai kategori sangat tinggi dengan persentase capaian sebesar 108,14%.



Sumber: Dinas Kehutanan, 2017

Gambar 3.48 Jumlah Hotspot di Provinsi Jambi

Penurunan luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar ini juga terlihat pada penurunan jumlah hotspot di Provinsi Jambi, dimana pada tahun 2015 masih ditemukan 1654 hotspot dan menurun drastis menjadi 64 hotspot pada tahun 2016. Jumlah hotspot di Provinsi Jambi tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada gambar disamping.

Upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi:

1. Deteksi dini melalui pemantauan titik panas (hotspot) dilakukan setiap hari.
2. Memberikan informasi titik panas (hotspot) kepada Posko Dalkarlahut Kabupaten/Kota.
3. Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat pengguna lahan.
4. Patroli kebakaran hutan dan lahan.
5. Gelar regu dalam rangka kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan.
6. Menyiapkan peralatan kebakaran hutan dan lahan.
7. Monitoring peralatan pada perusahaan bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
8. Membuat pengumuman Gubernur Jambi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
9. Peraturan Daerah tentang Karhutla
10. Pembuatan leaflet/booklet untuk kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
11. Pencegahan dan pemadaman
12. Pembuatan embung, kanal dan sekat kanal.

Tabel 3.58 Lokasi pembuatan sekat kanal dan embung

N O	LOKASI	PANJANG KANAL	PERSONIL	PERALATAN	KET
1.	<b>Desa Manis mato</b> Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi	2.750 M	TNI : 25 Org Polri : 25 Org BPBD : 6 Org Dishut : 6 Org WKS : 12 Org Masy : 12 Org Operator : 6 Org	Eskavat : 3 Unt or : 6 Unt Mbl : 2 Unt Mtr : 8 Unt Pompa : 65 Glg Air Selang	Kerjasama Satgas dengan PT. WKS
2.	<b>Desa Pematang Buluh</b> Kec. Betara Kab. Tanjab Barat	Target 7.000 M Progres 7.000 M	TNI : 70 Org Polri : 22 Org BPBD : 10 Org Dishut : 17 Org Masy : 10 Org Kesehata n : 3 Org Damkar : 10 Org	Viar : 1 Unt Mbl : 3 Unt Mtr : 2 Unt Pompa : 4 Unt Air : 35 Glg Selang	Kerjasama Satgas &PT. Harta Mulia, PT. Makmur, PT. Sungai Bahar Pasifik dgn rencana (Pembuatan Parit 1.700 M)
3.	<b>Desa Sei Cemara</b> Kec. Sadu Kab. Tanjab Timur	3.000 M	TNI : 15 Org Polri : 12 Org BPBD : 12 Org Kec. : 7 Org Damkar : 5 Org Masy. : 14 Org	Eskavat : 1 Unt or : 8 Unt Mtr : 3 Unt Pompa : 10 Glg Air Selang	Kerjasama Satgas dan Masyarakat

			Operator : 2 Org		
4.	<b>Desa Puding</b> Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi.	3.000 M	TNI : 25 Org Polri : 30 Org BPBD : 10 Org Brimob : 25 Org Polres : 15 Org MA : 10 Org	Pompa : 4 Unit Air : 3 Unit Exavator	
5	<b>Desa Sei. Panoban</b> Kec Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat	30 x 10 Mtr	TNI : 20 Org Polri : 7 Org Apdes : 3 Org	Pompa : 5 Unit Air : 35 Unit Selang : 5 Unit SPM	Pembuatan Embung Kerjasama Satgas dengan PT.WKS
6	<b>Desa Sei Jambat Kec Sadu</b> Kab. Tanjab Barat	3.500 M	TNI : 15 Org Polri : 12 Org BPBD : 12 Org Kec. : 7 Org Damkar : 5 Org Masy. : 14 Org Operator : 2 Org	Eskavator : 1 Unit Mtr : 3 Unit Pompa : 10 Glg Air Selang	
7	<b>Desa Pematang Raman</b> Kab. Muaro jambi	Target 3000 M	TNI : 50 Org Polres : 21 Org Polda : 24 Org Brimob : 25 Org Ma : 48 Org PT.PDIW : 30 Org BPBD : 10 Org	Pompa : 8 Unit Air : 2 Unit Truck : 5 Unit Double Cabin	Dalam Pengerjaan Kerjasama Satgads dengan PT.PDIW
8	<b>Desa Rawasari</b> Kel. Simpang Kec. Berbak	Target 6.350 M Progres 6.350 M	TNI : 15 Org Polri : 4 Org Apdes : 5 Org Damkar/ : 10 Org MA : 5 Org PT.ATGA : 10 Org Masy		Kerjasama Satgas dengan PT. ATGA
9	<b>Tahura Sekitar Tanjung</b>	Target 15.000 M Progres Tahap pengukuran Topografi Lahan			Kerjasama Satgas dengan PT. WSI, PT. SMP, PT. BEP, PT. RKK, PT. BBS, PT. JBP, PT. PDIW, PT. SNTP

Sumber: SLHD Provinsi Jambi, Dinas LH, 2016

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2016 guna mendukung capaian indikator ini adalah

1. program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

**Permasalahan:**

1. Pengaruh iklim masih sangat berpengaruh dengan jumlah kejadian Kebakaran hutan dan lahan, dimana pada saat terjadi kemarau yang panjang maka kebakaran hutan dan lahan akan meningkat
2. Kesadaran masyarakat dan korporasi untuk tidak melakukan pembakaran pada saat pembukaan lahan belum seperti yang diharapkan.

**Solusi:**

1. Optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik panas (hotspot), pemberdayaan masyarakat peduli api, patroli kebakaran hutan dan lahan, penyiapan embung, kanal dan sekat kanal pada wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
2. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

**11.3.3. Persentase Penurunan Lahan Kritis**

Perkembangan lahan kritis di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 luas lahan kritis di Provinsi Jambi adalah 1.736.475,3 Ha dan mengalami penurunan luas pada tahun 2014 menjadi seluas 1.420.602 Ha. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi terutama rehabilitasi lahan kritis yang ada di Provinsi Jambi. Penurunan lahan kritis pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

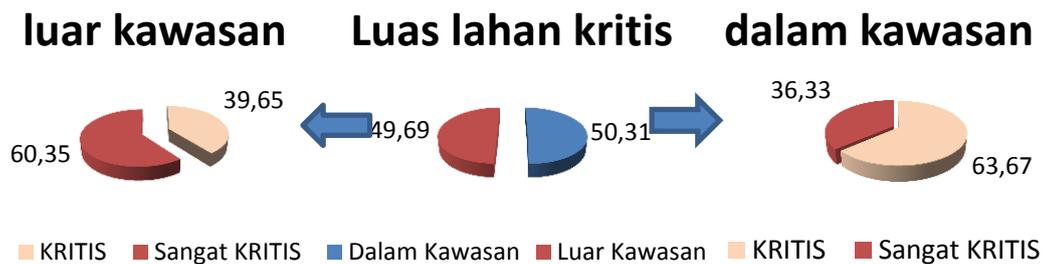
Tabel 3.59 Capaian Indikator Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase penurunan Lahan kritis	NA	NA	NA	(1.420.602 Ha)	0%	40,54 %	140,54	2% (1.284.112 Ha)	134,22

Sumber: Dinas Kehutanan, 2017

Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan target 0% untuk penurunan lahan kritis, mengingat laju degradasi hutan dan lahan hampir seimbang dengan laju rehabilitasi hutan dan lahan. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Jambi tetap melakukan berbagai

upaya rehabilitasi yang bersinergi dengan upaya rehabilitasi oleh berbagai NGO dan pemerintah pusat serta masyarakat di Provinsi Jambi. Realisasi penurunan lahan kritis di Provinsi Jambi tahun 2016 adalah 40,54% sehingga luas lahan kritis saat ini adalah seluas 844,647,42 Ha dari luas awal pada tahun 2015 seluas 1.420.602 Ha. Persentase realisasi ini adalah sebesar 140,54% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**, bahkan jika dibandingkan dengan target akhir pun realisasinya telah mencapai 134,22% atau sangat tinggi.



Sumber: Dinas Kehutanan (diolah), 2017

Gambar 3.49 Persentase luas lahan kritis dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

Bila dibandingkan antara luas lahan kritis dalam kawasan hutan dengan luas lahan kritis di luar kawasan hutan, maka 50,31% luas lahan kritis berada di luar kawasan hutan dengan 36,33% diantaranya termasuk dalam kategori sangat kritis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aktivitas yang paling dominan menyebabkan terjadinya lahan kritis saat ini adalah PETI atau Pertambangan Tanpa Izin, terutama di wilayah-wilayah Barat Provinsi.



Gambar 3.50 Aktivitas Pertambangan tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten dalam mengatasi kegiatan PETI dilakukan melalui cara-cara persuasif maupun represif. Secara persuasif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi hukum mengenai dampak buruk dari kegiatan pertambangan tanpa izin bahan galian emas yang dilakukan oleh tim terpadu baik dari Pemerintah Provinsi Jambi maupun dari pemerintah kabupaten yang terdiri dari instansi teknis terkait meliputi BLHD, Dinas

ESDM, Kejaksaan, Dan Biro/Bagian Hukum Setda Provinsi/Kabupaten, Dengan sasaran objek penyuluhan/sosialisasi meliputi para Camat dan staf, Para Lurah, Kepala Desa Dan Ketua LKMD, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh-Tokoh Pemuda/Organisasi Kepemudaan Serta LSM. Kepada para penambang dihimbau agar beralih profesi menjadi penambang pasir atau usaha lainnya.

Secara represif dilakukan melalui operasi penertiban oleh tim terpadu tingkat provinsi maupun tim terpadu tingkat kabupaten yang melibatkan pihak kepolisian dari tingkat Polres sampai Polda dan SatPol PP Kabupaten. Sasaran operasi mulai dari lokasi penambangan, pengangkutan, penimbunan sampai kepada penjualan dengan memutuskan mata rantai kegiatan melalui pemanggilan para pemilik SPBU yang menyalurkan bbm solar agar tidak melayani pembelian solar dalam partai besar serta pemanggilan pimpinan beberapa toko yang diduga menjual mesin penambangan emas agar tidak menjual mesin dompeng serta peralatan pertambangan lainnya termasuk air raksa.

Program yang dilakukan pada tahun 2016 untuk menurunkan luas lahan kritis adalah:

1. Program rehabilitasi hutan dan lahan
2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

**Permasalahan:**

1. Pemberantasan PETI sangat sulit, fakta selama ini memperlihatkan bahwa aktivitas ini akan berhenti pada saat bahan galian yang ditambang telah habis/tidak ditemukan lagi dan kawasan yang dijadikan tempat aktivitas PETI telah rusak parah.

**Solusi:**

1. Penegakan hukum atas pelanggaran ini harus benar-benar dilaksanakan secara serius dengan diiringi penyediaan lapangan pekerjaan alternatif yang lebih baik.
2. Rehabilitasi hutan dan lahan yang telah kritis secara terus menerus.

#### 11.3.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia saat ini dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale, Amerika Serikat. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia mencakup kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan tutupan hutan.

IKLH merupakan sebuah kebijakan yang diambil untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dan menjadi salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut dengan wilayah lainnya atau membandingkan kualitas lingkungan hidup pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan IKLH menjadi sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam rangka implementasi Instrumen Analisis Risiko Lingkungan. Bila IKLH diterapkan dengan benar maka akan dapat memberi sumbangan penting dalam rangka pengkajian risiko lingkungan dan pengelolaan risiko lingkungan karena IKLH mengandung hasil penilaian aktual pada komponen penting lingkungan hidup.

Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 262 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana pembangunan Daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Karena dalam perumusan rencana pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan, maka IKLH dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan.

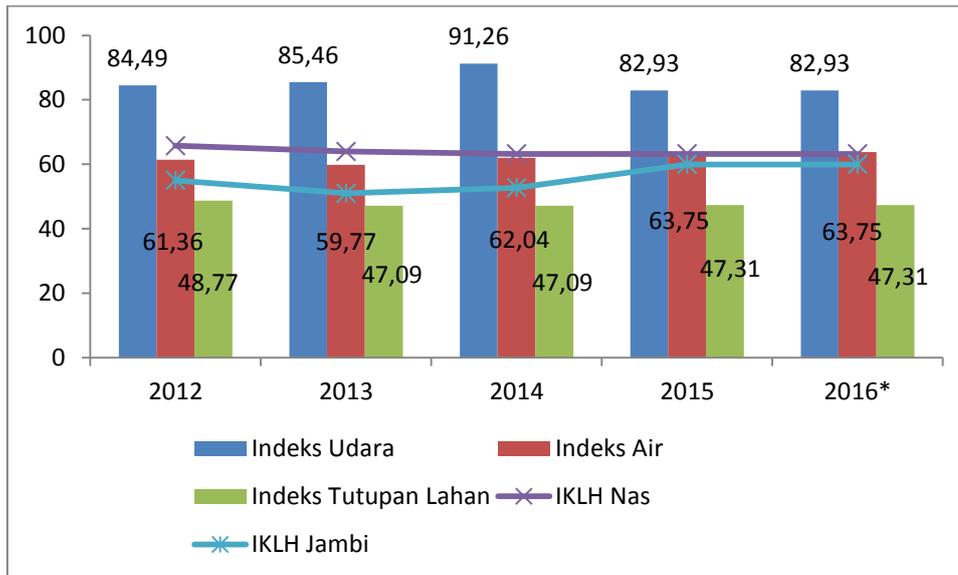
Tabel 3.60 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016	
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Tar-get	Realisasi			% capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,0	51,0	52,72	52,72*	52,74	59,93*)	113,63	52,84	113,42

Sumber: Kemen LH, 2016

Ket: \*data tahun 2014 rilis tahun 2015; \*)data tahun 2015 rilis tahun 2016

Sejak mengalami penurunan pada tahun 2013, IKLH Provinsi Jambi kembali mengalami perbaikan pada tahun 2013 hingga saat ini. Data realisasi IKLH tahun 2016 yang disampaikan pada tabel di atas adalah data yang dirilis pada akhir tahun 2016 dan merupakan kondisi tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, realisasi IKLH melebihi target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 113,63% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Realisasi ini bahkan telah melebihi target akhir IKLH pada tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 52,84 atau telah terealisasi sebesar 113,42% atau sangat tinggi.



Sumber: Kemen LH (diolah), 2016

Gambar 3.51 Perkembangan komponen ICLH di Provinsi Jambi dan Perbandingan dengan ICLH Nasional

Bila dilihat perkomponen pembentuk indeks, maka indeks yang mengalami penurunan adalah indeks kualitas udara. Hal ini disebabkan oleh buruknya kualitas udara pada tahun 2015 akibat kabut asap yang berkepanjangan di Provinsi Jambi. Sedangkan indeks lain, yaitu indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan menunjukkan peningkatan atau perbaikan. Namun demikian, ICLH Provinsi Jambi masih terus dibawah ICLH Nasional sejak tahun 2012 hingga saat ini. Untuk itu upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan harus terus dilakukan secara masif.

Pemantauan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan tanpa diikuti oleh aktivitas pemantauan tidak akan banyak berarti. Hal ini merupakan upaya untuk mengetahui sejauhmana dampak aktivitas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur kualitas lingkungan di wilayah Provinsi Jambi khususnya kualitas air sungai lintas Kabupaten/Kota dan kualitas udara ambien di Wilayah Provinsi Jambi.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan pemantauan kualitas air pada 6 sungai dalam Provinsi Jambi yaitu Batang Merangin, Batang Tembesi, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sumay, Batang Limun dengan 12 titik sampel dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Berdasarkan analisa terhadap data hasil uji menggunakan Metode Indeks Pencemar (IP), status mutu air untuk baku mutu kelas 2 adalah memenuhi baku mutu s/d cemar ringan sedangkan untuk status mutu air untuk baku mutu kelas 1 pada kondisi cemar ringan. Untuk hasil lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.61 Data Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2016

No	Kabupaten	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air
1	Kab Kerinci	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kec. Keliling Danau	Memenuhi Baku Mutu
2	Kabupaten Merangin	Batang Merangin	Desa Muara Hemat, Kec. Batang Merangin	Memenuhi Baku Mutu
3	Kabupaten Merangin	Batang Merangin	Kel. Pasar Bangko, Kec. Bangko	Memenuhi Baku Mutu
4	Kab Sarolangun	Batang Limun	Desa Pulau Pandan	Cemar Ringan
5	Kab Sarolangun	Batang Tembesi	Desa Batu Kucing Kec Pauh sepenggal	Cemar Ringan
6	Kab Sarolangun	Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang	Cemar Ringan
7	Kabupaten Bungo	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang	Cemar Ringan
8	Kabupaten Bungo	Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang	Cemar Ringan
9	Kabupaten Tebo	Batang Tebo	Desa Mangun Jayo	Cemar Ringan
10	Kabupaten Tebo	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang	Cemar Ringan
11	Kab.Batanghari	Batang Tabir	Dusun Tuo Peninjauan	Cemar Ringan
12	Kab.Batanghari	Batang Tembesi	Desa Pasar Muaro Tembesi	Cemar Ringan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi, 2017

Sedangkan untuk Sungai Batanghari dilakukan pemantauan pada 16 titik sampling dan dianalisa dengan Metode STORET dengan baku mutu pembanding kelas 2. Hasil analisa menunjukkan bahwa status mutu air di Sungai Batanghari cemar ringan s/d cemar berat, dengan hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.62 Data Hasil Pemantauan Air Sungai Batanghari Tahun 2016

No	Nama Desa	Golongan	Skor Total	Kualifikasi Mutu Air	Status Mutu Air
1	Desa Pucuk Jambi, Kab.tebo	B	-1	Baik	Cemar ringan
2	Desa Teluk Kayu Putih, Kab.Tebo	B	-5	Baik	Cemar ringan
3	Desa Teluk Kepayang, Kab.Tebo	B	-7	Baik	Cemar ringan
4	Desa Teluk Singkawang, Kab.Tebo	B	-16	Sedang	Cemar sedang
5	Desa Tambun Arang, Kab.Tebo	B	-20	Sedang	Cemar sedang
6	Desa Bulu Kasap, Kab.Batanghari	B	-16	Sedang	Cemar sedang
7	Desa Pematang Gadung, Kab.Batanghari	B	-17	Sedang	Cemar sedang
8	Desa Rantau Kapas Mudo, Kab.Batanghari	B	-21	Sedang	Cemar sedang
9	Desa Kubu Kandang, Kab.Batanghari	B	-17	Sedang	Cemar sedang
10	Desa Gerunggung, Kab.Muaro Jambi	B	-15	Sedang	Cemar sedang
11	Desa Rengas Bandung, Kab.Muaro Jambi	B	-16	Sedang	Cemar sedang
12	Desa Kunangan, Kab.Muaro Jambi	B	-16	Sedang	Cemar sedang
13	Desa Rukam, Kab.Muaro Jambi	B	-31	Buruk	Cemar berat
14	Desa Tanjung, Kab.Muaro Jambi	B	-31	Buruk	Cemar berat
15	Desa Kuala Dendang, Kab.Tanjab Timur	B	-19	Sedang	Cemar sedang
16	Desa Lagan Hulu, Kab.Tanjab Timur	B	-27	Sedang	Cemar sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi, 2017

Sementara untuk kualitas udara, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi di 4 lokasi yaitu perkantoran, transportasi, pemukiman dan industri/rumah sakit didapat hasil bahwa kualitas udara dalam Provinsi Jambi masih memenuhi baku mutu udara ambien dan aktivitas yang ada belum mencemari udara. Namun demikian upaya preventif pengadaan Ruang Terbuka Hijau disekitar area tersebut tetap dibutuhkan sebagai penyedia oksigen bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tingkat penurunan emisi yang dihasilkan oleh pengelolaan limbah pertahun dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.63 Penurunan Emisi GRK dari Limbah

Pengelolaan Limbah	2013	2014	2015	2016
Jumlah Aksi Mitigasi	9	16	7	39
Emisi BAU (ton CO <sub>2</sub> e)	3.901,66	919,30	21,50	32.937,20
Penurunan Emisi (ton CO <sub>2</sub> e)	1.505,30	(-2758,1)	(-322,16)	16.923,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa upaya penurunan emisi di Provinsi Jambi menunjukkan hasil yang baik, dimana pada tahun 2013 upaya penurunan emisi baru mencapai 38,58% dengan 9 aksi mitigasi. Pada tahun 2016 telah terjadi penurunan emisi sebesar 16.923,20 CO<sub>2</sub>e dari emisi BAU sebesar 32.937,2 Ton CO<sub>2</sub>e dengan 39 aksi mitigasi atau terjadi penurunan sebesar 51,38%. Dari 39 aksi mitigasi yang telah dilakukan, terdapat aksi mitigasi pendukung yang tercatat tidak dapat menurunkan emisi tapi berkontribusi secara tidak langsung terhadap penurunan emisi.

Program yang dilakukan untuk meningkatkan IKLH:

1. Program rehabilitasi hutan dan lahan
2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

#### Permasalahan:

1. Degradasi lahan dan hutan akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab masih menjadi permasalahan yang harus diatasi di Provinsi Jambi
2. Kualitas air yang menunjukkan kualifikasi buruk akibat cemar berat di beberapa titik di Sungai Batanghari perlu penanganan serius mengingat Sungai Batanghari merupakan sumber air baku utama bagi perusahaan air minum yang beroperasi di Provinsi Jambi

3. Kualitas udara saat ini sangat dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun di Provinsi Jambi. Kebakaran hutan dan lahan ini lebih disebabkan oleh aktivitas masyarakat dalam membuka lahan.

**Solusi:**

1. Pengelolaan lingkungan secara baik dan benar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab seluruh stake holder. Oleh sebab itu upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya preventif harus terus dilakukan seiring dengan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan.

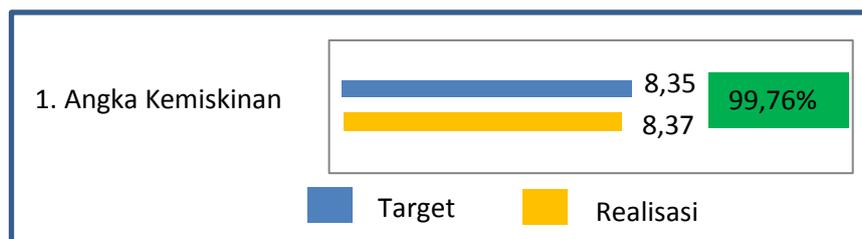
## Tujuan 12 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan ini berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta pengendalian penduduk.

### Sasaran 12.1. Menurunnya angka kemiskinan

Pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan. Tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan perbulannya (perkapita) sebanyak Rp.372.114,- untuk di kota dan Rp.350.420 perkapita per bulan di desa (atau sekitar USD \$25) yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, bahkan untuk pengertian orang Indonesia sendiri.

Stabilitas harga makanan merupakan hal penting sekali bagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan sebagian pendapatannya untuk membeli makanan. Oleh karena itu, tekanan inflasi pada harga makanan dapat memiliki konsekuensi sangat serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin. Bahkan sebagian dari mereka yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan bisa jatuh dalam kemiskinan penuh karena inflasi yang tinggi. Capaian sasaran menurunnya angka kemiskinan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

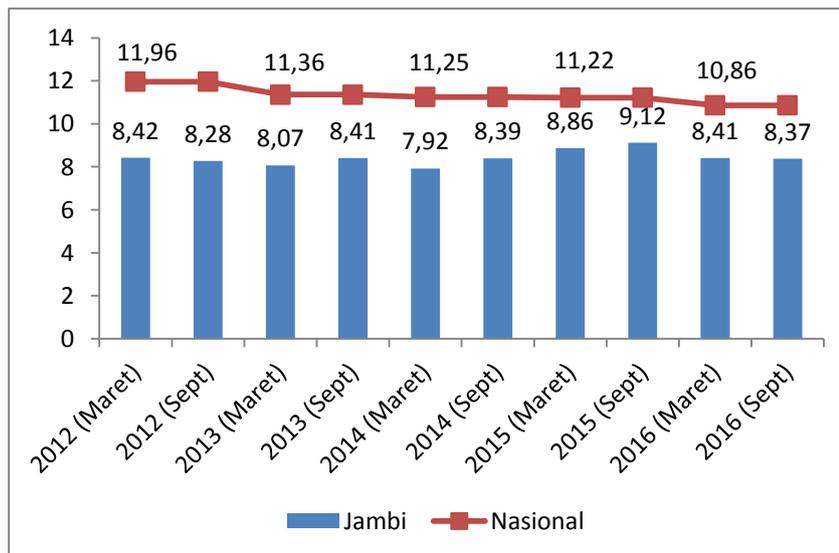


Gambar 3.52 Capaian sasaran menurunnya angka kemiskinan

12.1.1. Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi sumber daya dan juga lingkungan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.53 Angka kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2012 sampai tahun 2016 berfluktuatif dan mencapai angka tertinggi pada Bulan September Tahun 2015. Angka tersebut kemudian kembali turun berkat mulai membaik kondisi ekonomi global. Angka kemiskinan Provinsi Jambi mengalami penurunan pada tahun 2016 dibandingkan kondisi awal, namun belum memenuhi target pada tahun tersebut. Tingkat capaian indikator pada tahun 2015 adalah sebesar 99,76%, dengan **kategori sangat tinggi** dan bila dibandingkan dengan target akhir maka capaiannya adalah sebesar 81,95%

Tabel 3.64 Capaian Indikator angka kemiskinan Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Angka kemiskinan	55,0	51,0	52,72	9,12	8,35	8,37	99,76	7,09	81,95

Sumber: BPS, 2017

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pennaggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah indeks kealaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada periode maret-september 2016, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. **Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,468 pada Maret 2016 menjadi 1,421 pada September 2016.** Demikian pula **indeks keparahan kemiskinan, turun dari 0,365 menjadi 0,364 pada periode yang sama.** Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2016 untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan pemenuhan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan pengurangan kawasan lingkungan yang tidak layak huni serta penyediaan lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.65 Capaian indikator penunjang indikator angka kemiskinan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	65%	60,7%	93%
Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	20%	44%	220%
Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	20%	9%	45%

Sumber: Dinas PUPR, 2017

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan merupakan target SDG's yang berhubungan dengan upaya penurunan angka kemiskinan karena salah satu indikator kemiskinan adalah akses terhadap sanitasi layak. Selain akses Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan, upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah menyediakan lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat dan mengurangi luas kawasan kumuh. Semuanya masih berkaitan dengan meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat. Penyediaan lingkungan layak huni dilaksanakan dengan menyediakan sarana, prasarana, dan utilitas (PSU) yang tersedia.

Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat petani, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan stabilitas harga di tingkat petani. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan layanan irigasi, pemberian pupuk bersubsidi, pemberian penyuluhan, pemberian saprodi, dan lain-lain. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, salah satunya dengan meningkatkan kondisi jalan yang menuju ke sentra produksi karena kondisi jalan yang buruk mempengaruhi biaya produksi dan transportasi yang harus ditanggung petani.

Demikian pula pada nelayan dan masyarakat lainnya. Pada dasarnya hampir seluruh program yang bersentuhan dengan masyarakat merupakan upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk menudukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
2. Program pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Progra Pengembangan Perumahan dan Permukiman
4. Program Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman di pusat kegiatan nasional dan kawasan strategis provinsi
5. Program pengembangan perikanan budidaya
6. Program pengembangan perikanan tangkap

**Permasalahan:**

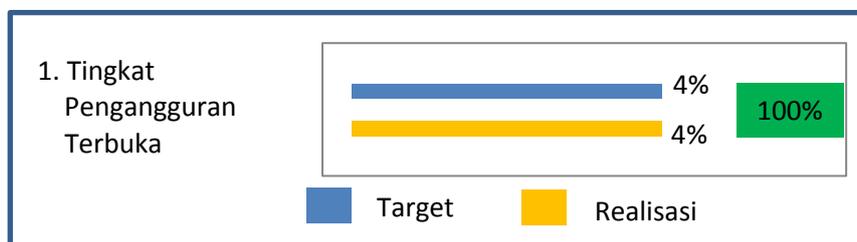
1. Kondisi perekonomian yang tidak menentu yang dapat menyebabkan inflasi tinggi merupakan salah satu faktor kerawanan peningkatan angka kemiskinan, karena masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat mudah kembali menjadi miskin akibat keadaan ini.
2. Proporsi masyarakat dengan akses terhadap sanitasi layak masih tergolong cukup rendah.
3. NTP tidak stabil

**Solusi:**

1. Meningkatkan Peran masyarakat dalam menjaga sanitasi lingkungan melalui kegiatan – kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dan lain – lain sebagainya.
2. Penyediaan PSU layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
3. Penyediaan prasarana umum hingga ke pelosok daerah, koordinasi antara pemerintah dan swasta (CSR), dan pengaturan kegiatan cooperate social responsibility (CSR) di Provinsi Jambi.

**Sasaran 12.2. Menurunnya angka pengangguran**

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran tahun 2016 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.54 Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran

12.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perluasan kesempatan kerja merupakan usaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

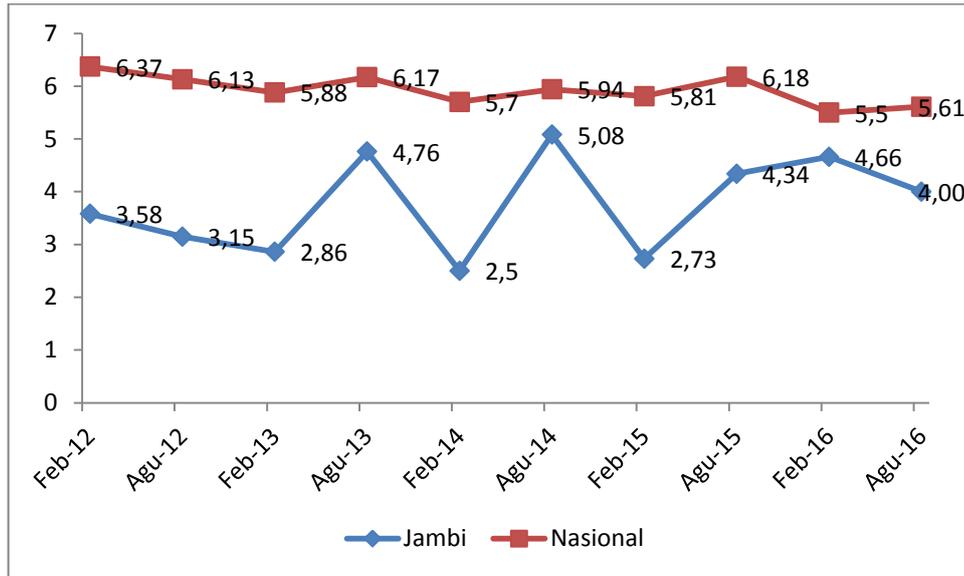
Tabel 3.66 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,15	4,76	5,08	4,34	4,0	4,0	100%	2,5 %	48,8

Sumber: BPS, 2017

Ket: TPT Bulan Agustus

Tabel capaian indikator TPT diatas memperlihatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi mulai membaik sejak tahun 2015. TPT Tahun 2016 sebesar 4,0 % , terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan, dengan kata lain tercapai 100% (**sangat tinggi**). Namun bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini masih dalam kategori sangat rendah karena baru mencapai 48,8% dari target sebesar 2,5%. TPT Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah TPT nasional yang artinya capaian indikator TPT di Provinsi Jambi masih lebih baik dari nasional dan beberapa daerah lainnya.

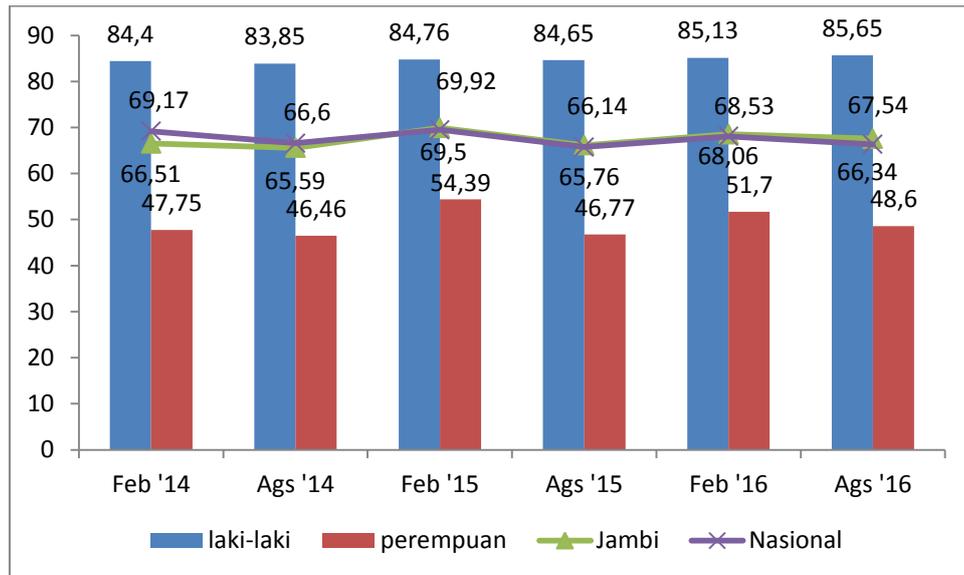


Sumber: BPS (diolah), 2017

Gambar 3.55 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi dibandingkan dengan TPT Nasional

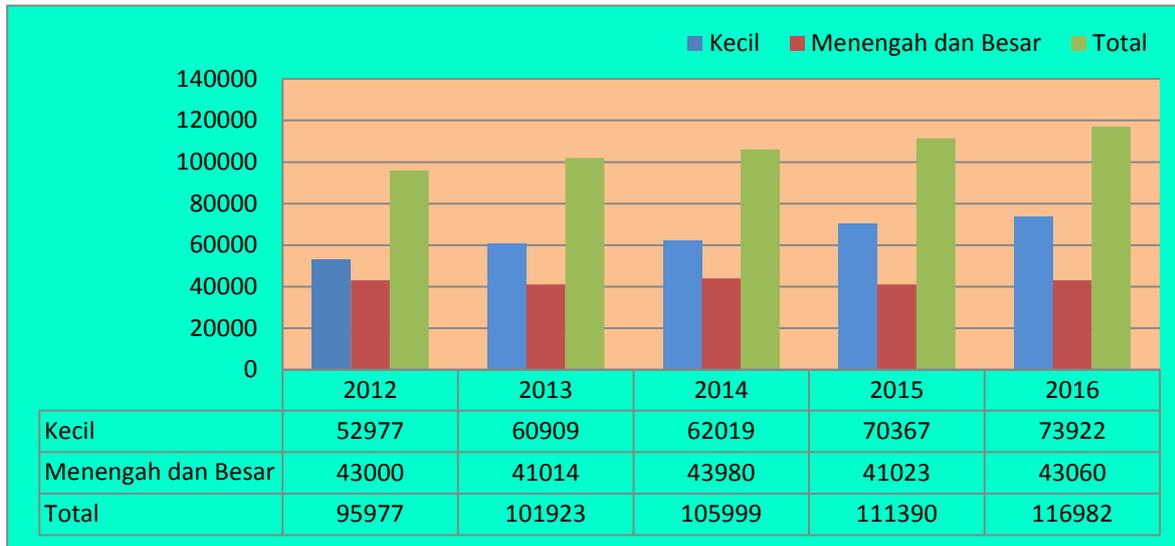
Kondisi ketenagakerjaan dirilis oleh BPS 2 kali setahun, yaitu pada Bulan Februari dan Agustus. Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada Agustus 2016 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 4 ribu orang dibanding Februari 2016 dan bertambah 71,4 ribu orang dibanding Agustus 2015. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi Agustus 2016 adalah sebesar 67,54% atau memperlihatkan peningkatan dibanding Agustus 2016 yaitu 66,14. Tingkat partisipasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK nasional yang berada pada 66,34%.

Jumlah penganggur pada Agustus 2016 mengalami penurunan sebanyak 11,3 ribu orang dibanding Februari 2016 dan turun sebanyak 2,6 ribu jika dibandingkan dengan Agustus 2015. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2016 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 691,8 ribu orang (42,59%), atau bertambah 29 ribu orang dibanding kondisi Februari 2016. Penduduk bekerja dengan pendidikan SMA dan SMK juga mengalami kenaikan dalam setahun terakhir. Sementara jumlah penduduk bekerja berpendidikan tinggi pada Agustus 2016 mengalami penurunan jika dibanding kondisi Februari 2016, dengan rincian penduduk bekerja berpendidikan diploma berkurang 4,1 ribu orang dan penduduk bekerja berpendidikan sarjana (S1,S2, S3) berkurang 34,8 ribu orang.



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2017

Gambar 3.56 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi dibanding nasional Tahun 2014-2016



Sumber: Disperindag, 2017

Gambar 3.57 Perkembangan Tenaga Kerja Industri Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan TPT antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja tentang kewirausahaan produktif, produktivitas tenaga kerja; kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi

(PBK) dan berbasis masyarakat; pemagangan dalam dan luar negeri, Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri; Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB); Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri; serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk semua skala industri baik industri kecil, industri menengah maupun industri besar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan Tenaga Kerja untuk industri Kecil pada tahun 2016 meningkat sebesar 5,05 persen atau bertambah 3.555 orang dari 70.367 orang pada tahun 2015 menjadi 73.922 orang di tahun 2016. Untuk industri menengah dan besar perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2015 meningkat sebesar 4,99 persen atau bertambah 2.047 orang dari 41.023 orang menjadi 43.060 orang di tahun 2016. Sedangkan perkembangan Tenaga Kerja untuk total keseluruhan semua skala industri, menunjukkan kinerja yang menggembirakan, yaitu dari tahun 2015 sebanyak 111.390 orang meningkat sebesar 5,02 persen atau 5.592 orang menjadi 116.982 orang di tahun 2016 Perkembangan Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar dapat dilihat pada gambar 3.57

Provinsi Jambi telah memfasilitasi angkatan kerja konstruksi agar tersertifikasi. Jumlah assessor unit sertifikasi tenaga kerja (USTK) LPJK Prov.Jambi Tahun 2016 adalah sebanyak 39 orang, terdiri dari :

1. Asesor yang aktif 27 orang
2. Asesor yang tidak aktif 12 orang

Sampai dengan tahun 2016 jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah tersertifikasi adalah sebanyak 2.343 orang .

Tabel 3.67 Jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi profesi

No	Tahun Anggaran	Nama Sertifikat (Orang)								Jumlah
		Tenaga Tingkat Terampil (SKT)		Tenaga Tingkat Ahli (SKA)		Instruktur		Assesor		
		APBD	APBN	APBD	APBN	APBD	APBN	APBD	APBN	
1	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2013	110	0	0	0	0	0	0	0	110
3	2014	180	483	0	0	0	0	0	0	663
4	2015	335	500	0	50	30	0	30	0	945
5	2016	230	325	0	0	0	70	0	0	625
<b>Jumlah</b>		<b>855</b>	<b>1308</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2343</b>

Sumber : LPJK Provinsi Jambi

Tabel 3.68 Daftar registrasi SBU/SKA/SKTK

No	Tahun Anggaran	Nama Sertifikat (Lembar)		
		Tenaga Tingkat Terampil (SKT)	Tenaga Tingkat Ahli (SKA)	USBU
1	2012	1195	244	5209
2	2013	1943	314	4356
3	2014	2247	1308	3644
4	2015	2106	485	1858
5	2016	2241	369	1230
<b>Jumlah</b>		<b>9732</b>	<b>2720</b>	<b>16297</b>

Sumber : LPJK Provinsi Jambi

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih adalah peranan para pelaku jasa konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

Adapun program yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

#### Permasalahan:

1. TPT di Provinsi didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan tinggi (S1,S2,S3), yang berarti penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja dengan gaji rendah.

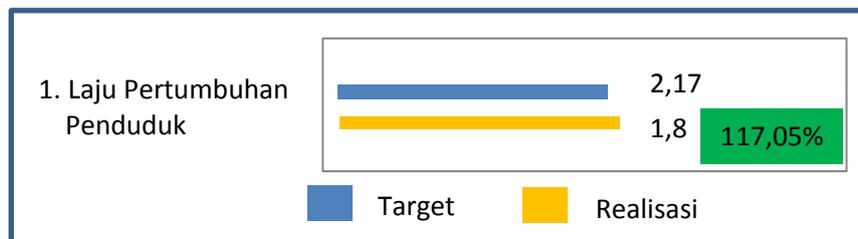
#### Solusi:

1. Meningkatkan kapasitas pendidikan para pencari kerja, sehingga dapat bersaing dengan orang lain dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi
2. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja (SDM) antara lain :
  - Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi masyarakat.

- Menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk, memberikan jaminan sosial yang memadai
- Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik.
- Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk memperlus ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.

### *Sasaran 12.3. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi*

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera diatasi. Kependudukan merupakan hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Perkembangan kependudukan adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Capaian sasaran terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.58 Capaian sasaran terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi

#### 12.3.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada umumnya, masalah yang dialami negara berkembang adalah masalah pertumbuhan penduduk yang berlebih. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan banyak pengaruh dalam kehidupan. Problem yang akan dihadapi akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk adalah pangan, energi, dan papan. Dari sisi kebutuhan pangan, setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula kebutuhan pangan. Begitu pula kebutuhan energi, pertumbuhan penduduk akan menyedot energi besar, sementara

ketersediaan energi makin menipis. Tak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Masalah ini tentunya akan berujung pada naiknya tingkat pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas dan lain-lain.

Berbagai cara dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. seperti transmigrasi, program Keluarga Berencana (KB), meningkatkan standar pendidikan bangsa, serta melakukan pengawasan-pengawasan terkait masalah ini. Pertumbuhan penduduk penting, tetapi dibatasi. Kita perlu sadar bahwa daya dukung sumber daya alam terbatas, sehingga jika jumlah penduduk tidak terkendali akan menjadi problem besar di masa depan. Prinsipnya. Pertumbuhan harus dibatasi, dan setiap lapisan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. karena dengan pertumbuhan yang terkendali akan mempermudah pemerintah mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

Tabel 3.69 Capaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2012	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,90	1,88	1,85	2,24	2,17	1,8	117,05%	1,82	101,1%

Sumber: BPS, 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2016 adalah sebesar 1,8. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 2,17 atau terealisasi sebesar 117,05% dengan kategori capaian termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, capaian ini juga telah melebihi target akhir yang ditetapkan sebesar 1,82 atau terealisasi 101,1% dengan kategori capaian adalah sangat tinggi.

Tercapainya target indikator ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak terkait dalam menggalakkan program KB. Adapun program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2016 untuk mendukung capaian indikator ini adalah **Program Fasilitas Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Keluarga Berencana**.

#### Permasalahan:

1. Bila dilihat piramida penduduk, maka jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi adalah penduduk usia produktif, bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk alamiah maka akan terjadi lonjakan penduduk yang tidak terkendali di Provinsi Jambi yang pada akhirnya memberikan banyak dampak negatif.

#### Solusi:

1. Program Keluarga Berencana harus terus digalakkan, dan diimbangi dengan peningkatan pendidikan masyarakat sehingga kesadaran akan dampak buruk pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat tersosialisasi dengan baik.

2. Bila laju pertumbuhan penduduk alamiah dapat ditekan melalui program KB, faktor migrasi penduduk tidak bisa dibatasi dengan mudah. Oleh karena itu, langkah antisipatif untuk mengurangi dampak buruk penambahan penduduk lewat migrasi adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diiringi dengan penyediaan pendidikan yang berkualitas.

## 3.2 Indikator Kinerja Lainnya

Selain pencapaian IKU Gubernur sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab 3.1, berikut akan diuraikan capaian kinerja lainnya terkait dengan dukungan terhadap capaian RPJMN:

### 3.2.1 Kinerja Kesehatan

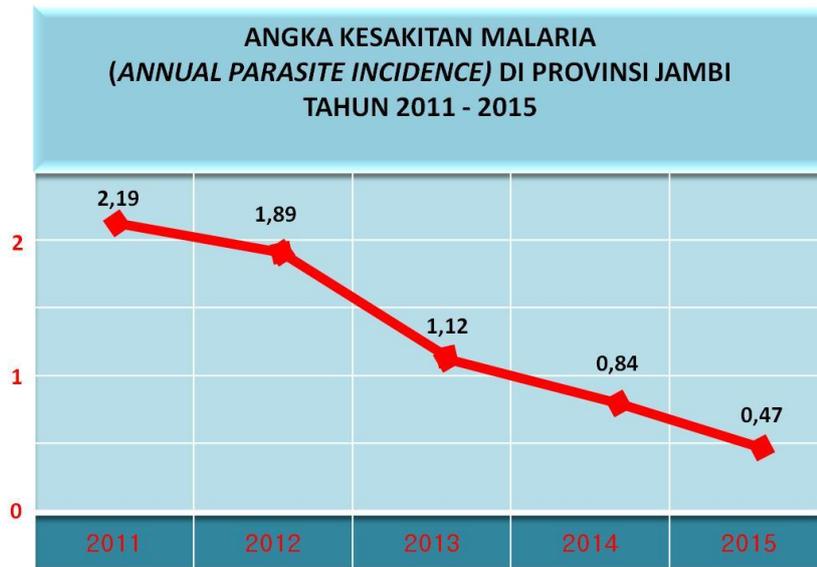
#### 3.2.1.1 Angka Kesakitan Malaria

Malaria merupakan masalah kesehatan dunia termasuk di Indonesia karena mengakibatkan dampak yang luas dan berpotensi menjadi penyakit *emerging* dan *re-emerging*. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya kasus import, resistensi obat dan beberapa insektisida yang digunakan dalam pengendalian vektor, serta adanya vektor potensial yang dapat menularkan dan menyebarkan malaria. Malaria disebabkan oleh hewan bersel satu (protozoa) Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Wilayah endemis malaria pada umumnya adalah desa-desa terpencil dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, sarana transportasi dan komunikasi yang sulit, akses pelayanan kesehatan kurang, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, serta buruknya perilaku masyarakat terhadap kebiasaan hidup sehat.

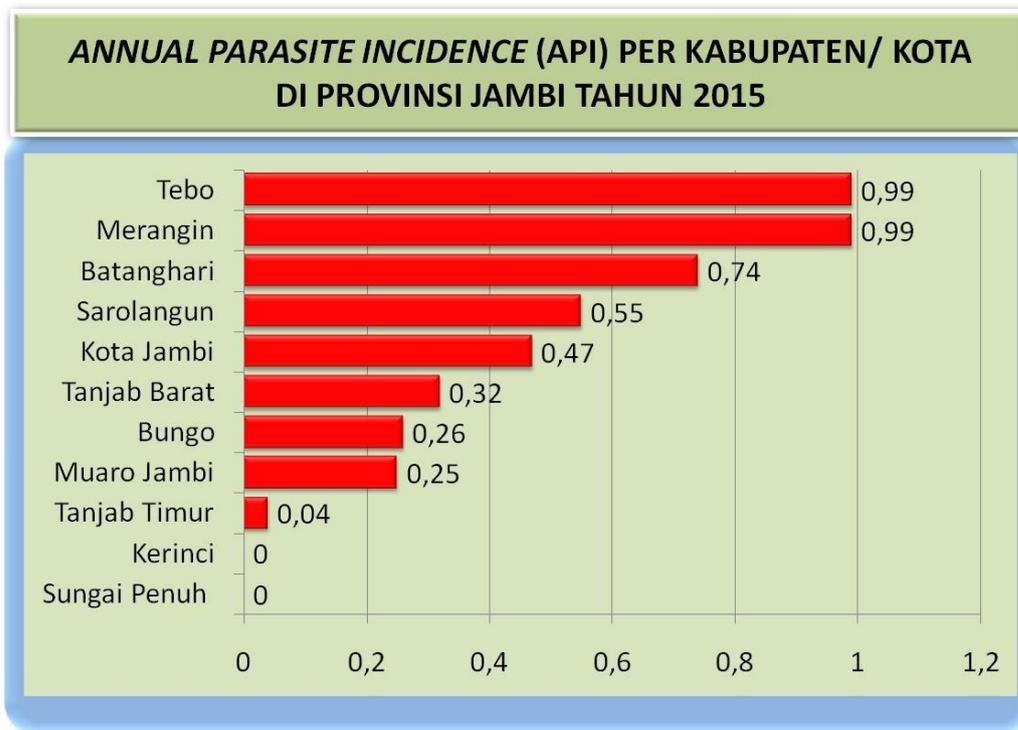
Kementerian Kesehatan telah menetapkan Sertifikasi endemisitas malaria suatu wilayah di Indonesia menjadi 4 strata yaitu :

1. **Endemis Tinggi** bila API > 5 per 1.000 penduduk.
2. **Endemis Sedang** bila API berkisar antara 1 - < 5 per 1.000 penduduk.
3. **Endemis Rendah** bila API 0 – 1 per 1.000 penduduk.
4. **Non Endemis** adalah daerah yang tidak terdapat penularan malaria (daerah pembebasan malaria) atau API = 0.

Upaya pengendalian malaria di Provinsi Jambi menggunakan *Annual Parasite Incidence* (API). Pada gambar 3.59 menunjukkan bahwa API di Provinsi Jambi dari tahun 2011 sampai dengan 2015 cenderung menurun. Pada tahun 2011 API di Provinsi Jambi berada pada angka 2,19 per 1.000 penduduk sampai dengan tahun 2015 menunjukkan angka 0,47 per 1.000 penduduk.



Sumber : Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan, 2016  
 Gambar 3.59 Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence) Di Provinsi Jambi Tahun 2011 s/d 2015



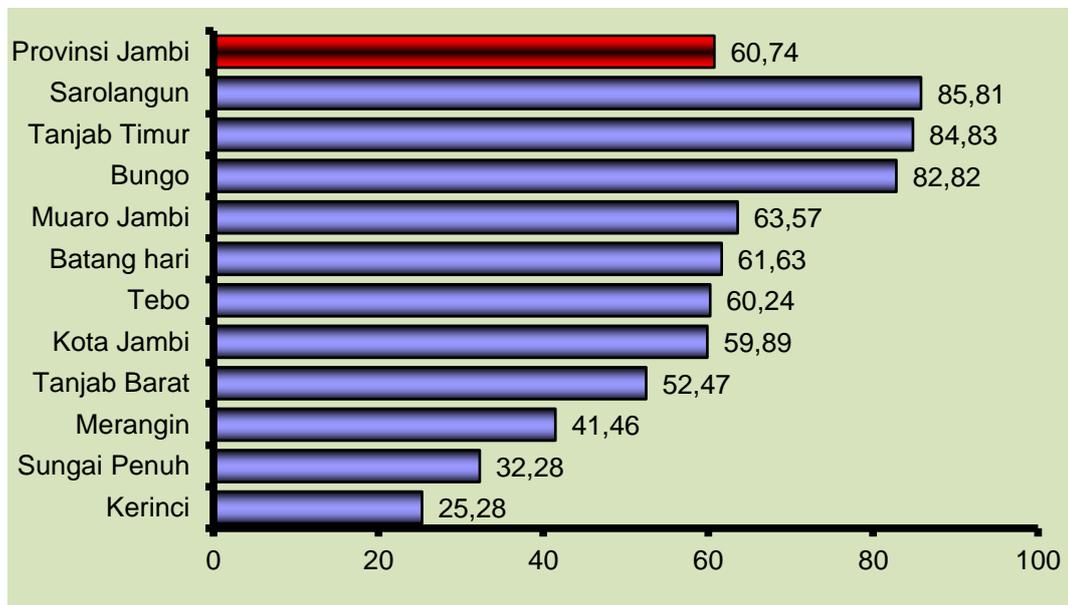
Sumber : Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan, 2016  
 Gambar 3.60 Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence) Per Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2015

Angka kesakitan Malaria per kabupaten/ kota di Provinsi Jambi pada tahun 2015 tertinggi adalah Kabupaten Tebo dan Merangin yaitu 0,99 per 1.000 penduduk dan terendah adalah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yaitu 0,00 per 1.000 penduduk.

**3.2.1.2 Pasien TB Paru**

Penyakit Tuberkulosis (TB) Paru termasuk penyakit menular kronis. Waktu pengobatan yang panjang dengan jenis obat lebih dari satu menyebabkan penderita sering terancam putus berobat selama masa penyembuhan dengan berbagai alasan, antara lain merasa sudah sehat atau faktor ekonomi. Akibatnya pola pengobatan harus dimulai dari awal dengan biaya yang bahkan menjadi lebih besar serta mengabdikan waktu berobat yang lebih lama. Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. TB Paru menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs.

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB Paru adalah *Case Detection Rate* (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan menetapkan target CDR minimal pada tahun 2015 sebesar > 70 %. Dalam gambar 3.60 berikut ini dapat dilihat angka penemuan kasus BTA (+) pada tahun 2015, dan persentase penemuan setiap kabupaten/ kota di Propinsi Jambi.



Sumber : Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan, 2016  
 Gambar 3.61 Cakupan Case Detection Rate (CDR) TB Paru BTA (+) di Provinsi Jambi Tahun 2015

Pencapaian CDR Provinsi Jambi pada tahun 2015 sebesar 60,74%, angka ini belum memenuhi target minimal yang telah ditetapkan nasional yaitu sebesar > 70%. Pada tingkat kabupaten/ kota, CDR tertinggi di Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 85,81 % diikuti Kabupaten Tanjab Timur sebesar (84,83 %). sedangkan kabupaten dengan CDR terendah terdapat di Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 25,28.

Dalam mengukur keberhasilan pengobatan TB Paru digunakan angka keberhasilan pengobatan ( $SR=Success Rate$ ) yang mengindikasikan persentase pasien baru TB paru BTA positif menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap diantara pasien baru TB paru BTA positif.

Tabel 3.70 Hasil Cakupan Pengobatan Penderita TBC di Provinsi Jambi Tahun 2012 s/d 2015

No	Indikator	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1.	Perkiraan penderita TB Paru	5.108	5.228	5.460	5.443
2.	Jumlah suspek yg diperiksa	6.900	11.551	9.012	31.313
3.	<i>Case Detect Rate (CDR) (%)</i>	72,04	66,60	63,46	61%
4.	Penderita diobati	3.156	1.111	1.035	3.864
5.	Konversi (%)	88,87	91,00	90,05	--
6.	<i>Sukses Rate (%)</i>	93,54	87,81	86,79	--

Sumber : Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan, 2016

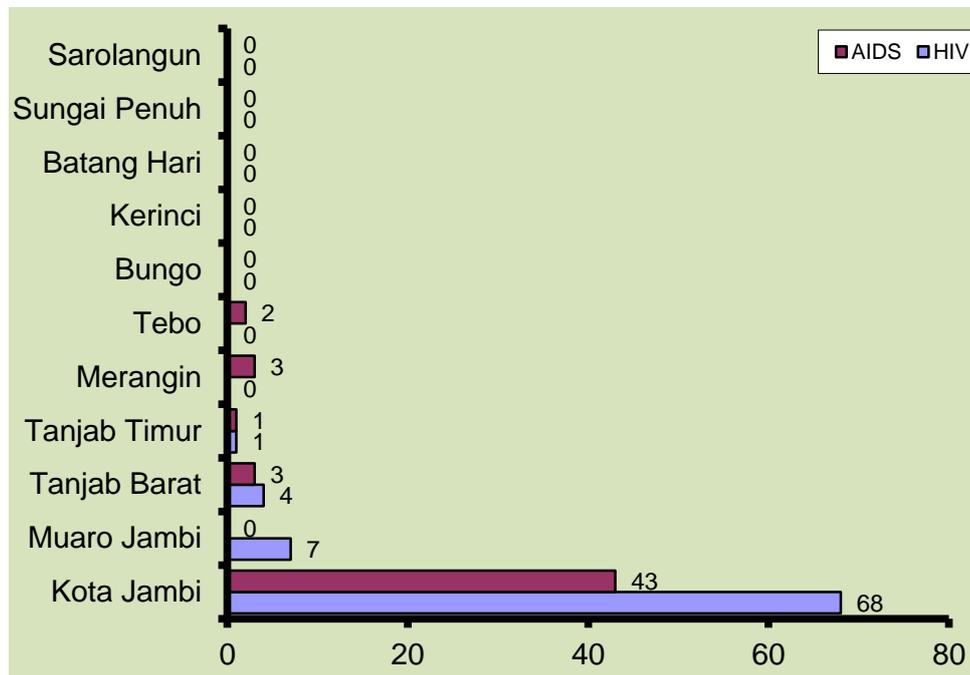
Berdasarkan Tabel 3.70 terlihat bahwa pencapaian *Success Rate* (SR) pada tahun 2012 s/d 2014 telah melampaui target nasional 85%. Adapun angka *Success Rate* (SR) untuk tahun 2013 telah mencapai angka 87, 81 %. Sedangkan untuk Angka *Sukses Rate* tahun 2014 adalah sebesar 86, 79 %.

### 3.2.1.3 Kasus HIV dan AIDS

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Penyakit ini ditularkan melalui cairan tubuh penderita yang terjadi melalui proses hubungan heteroseksual, tranfusi darah yang tidak aman, penggunaan jarum suntik bersama yang terkontaminasi secara bergantian, dan penularan dari ibu ke anak dalam kandungan melalui kandungan dan menyusui.

HIV & AIDS di Provinsi Jambi menunjukkan trend penurunan setiap tahun. Pada tahun 2015 di Provinsi Jambi jumlah kasus HIV dan AIDS adalah 80 kasus HIV dan 52 AIDS. Kasus HIV

dan AIDS terbanyak berada di Kota Jambi dengan jumlah kasus masing-masing adalah HIV 68 kasus dan AIDS 43.



Sumber : Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan, 2016

Gambar 3.62 Jumlah Kasus HIV dan AIDS Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015

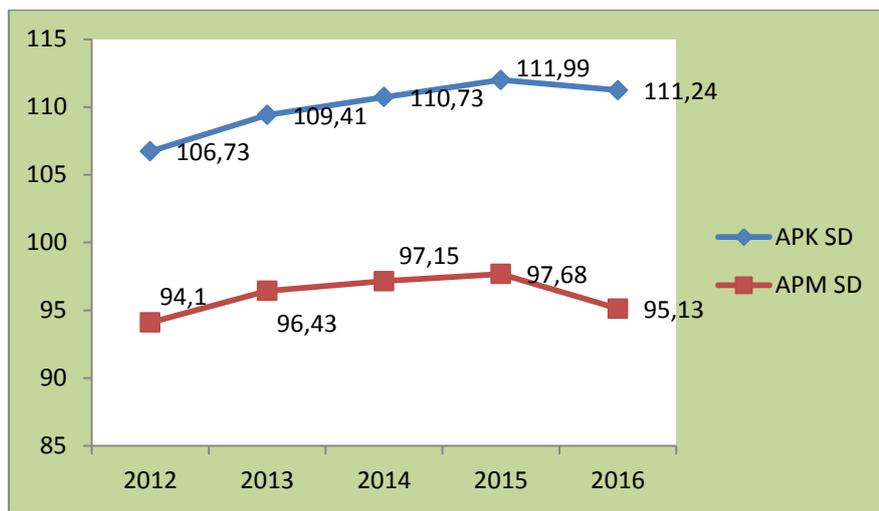
### 3.2.2 Kinerja Pendidikan

Keberhasilan program pembangunan pendidikan digambarkan dalam Misi 5K. Adapun Misi 5K yang dimaksud adalah ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, mewujudkan kesetaraan untuk pendidikan, dan menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, khususnya menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/ sederajat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12

tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100.

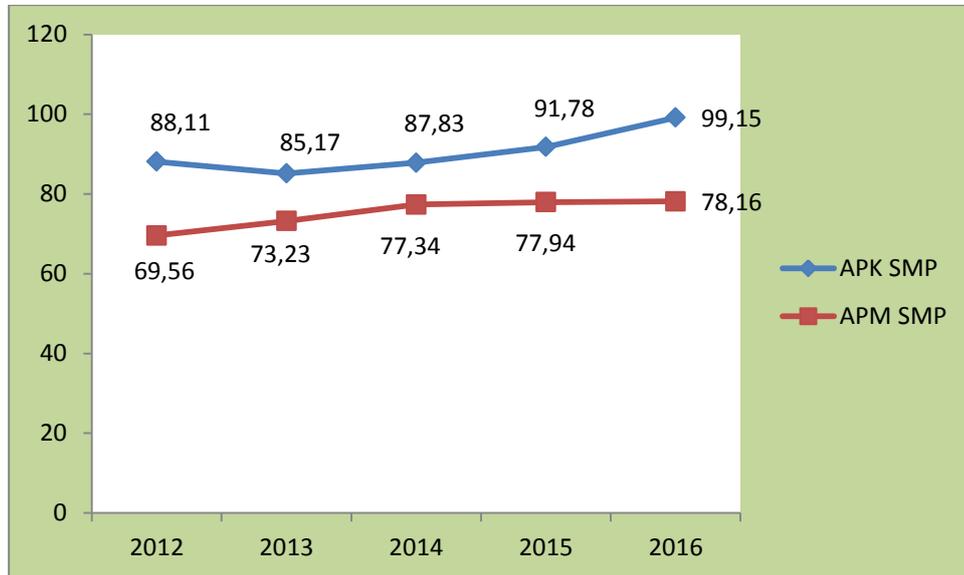


Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Gambar 3.63 APK dan APM Sekolah Dasar Provinsi Jambi Tahun 2011-2016

Terjadi peningkatan APK dan APM SD sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2016. APK SD pada tahun 2012 mencapai 106,73 persen dan meningkat pada tahun 2015 mencapai 111,99 persen, kenyataan ini turut didorong oleh meningkatnya kejar paket A. Sedangkan untuk APM SD, terjadi peningkatan dari 94,1 persen pada tahun 2012 menjadi 97,68 persen pada tahun 2015, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 95,13 persen. Walaupun angka partisipasi baik APK dan APM sudah cukup tinggi tetapi masih terdapat sejumlah anak-anak usia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah baik sama sekali belum pernah sekolah maupun yang tidak lagi bersekolah.

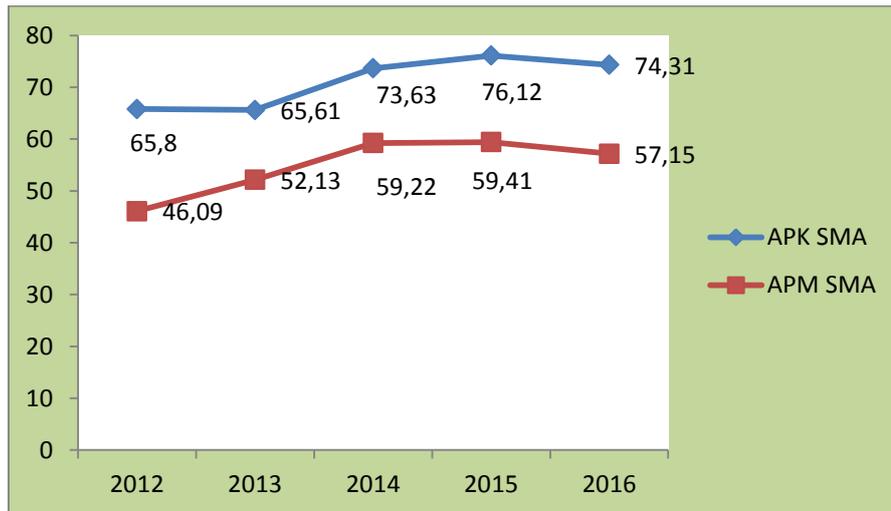
Untuk APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2012, APK SMP sebesar 88,11 persen, meningkat menjadi 99,15 persen pada tahun 2016. Sedangkan APM SMP sejak tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebesar 69,56 persen menjadi 78,16 persen tahun 2016.



Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, 2017

Gambar 3.64 APK dan APM SMP Provinsi Jambi Tahun 2011-2016

Untuk APK SMA Provinsi Jambi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2012, APK SMA sebesar 65,8 persen, meningkat menjadi 74,31 persen pada tahun 2016. Fluktuasi juga terjadi pada APM SMA. Pada tahun 2012, APM SMA sebesar 46,09 persen, meningkat menjadi 57,15 persen pada tahun 2016. Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100 persen.



Sumber: BPS dan Dinas pendidikan, 2017

Gambar 3.65 APK dan APM SMA dan APS Usia 16 – 18 Tahun di Provinsi Jambi Tahun 2011-2016

Angka Partisipasi selama lima tahun terakhir belum menunjukkan kinerja bidang pendidikan yang baik masih terdapat banyak catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan. *Pertama*, program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2016 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi penduduk usia SD dan SMP belum mencapai/mendekati angka 100 persen. *Kedua*, tingkat partisipasi pendidikan yang masih relatif rendah pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA (baru sekitar separuhnya dari usia sekolah SMA yang melanjutkan pendidikan) menjadi tantangan kedepan dalam peningkatan kualitas SDM di Provinsi Jambi. *Ketiga*, masih terdapatnya disparitas tingkat pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender. *Keempat*, masih rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan komperatif daerah.

Persentase APK dan APM diatas tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk kelancaran penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui kegiatannya yaitu Rakor BOS SD, SMP dan bidang DIKDAS yang dilaksanakan setiap tahun disamping adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar 9 tahun.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah dan Angka Partisipasi Murni (APM) masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100%. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya daya tampung siswa, rendahnya kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anaknya dan faktor sosial ekonomi orang tua yang tidak memadai serta faktor geografis yang kurang mendukung.

Untuk capaian Angka melek huruf, yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang tidak dapat membaca dan menulis, Provinsi Jambi menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2016. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016 yang dirilis oleh BPS, **angka melek huruf usia 15-24 tahun di Provinsi Jambi Tahun 2016 adalah sebesar**

**99,85%** dengan rincian angka melek huruf usia 15-24 tahun di daerah perkotaan telah mencapai 100% dan angka melek huruf usia 15-24 tahun di daerah perdesaan sebesar 99,78%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk belajar di kota telah tumbuh dengan sangat baik, namun kesadaran untuk belajar membaca dan menulis di daerah perdesaan masih belum optimal walaupun proporsinya sangat kecil sekali yaitu 0,22%. Kondisi ini berhubungan erat dengan pekerjaan utama penduduk di daerah perdesaan yang mayoritas bergerak di sektor pertanian dengan kecenderungan memiliki anggapan bahwa pendidikan belum menjadi sesuatu yang penting. Namun kedepan melalui pendamping-pendamping desa yang bertugas di desa, diharapkan akan tumbuh kesadaran masyarakat perdesaan untuk belajar membaca dan menulis, hingga angka melek huruf usia 15-24 tahun di Provinsi Jambi dapat mencapai 100%.

Sementara itu, Pendidikan Nonformal telah mampu memberikan alternatif pilihan penyelesaian permasalahan pendidikan yang dihadapi masyarakat, selain itu dapat memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat terutama mereka yang belum terlayani kebutuhan pendidikannya pada jalur Pendidikan Formal. Adapun persentase penduduk buta huruf menurut Kelompok Umur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.71 Persentase Penduduk Buta Huruf (persen) menurut Kelompok Umur tahun 2011 - 2015

Keterangan	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
Persentase penduduk buta huruf 15 +	4,63	4,21	3,28	2,23	2,16
Persentase penduduk buta huruf 15 - 44	1,43	1,33	0,89	0,57	0,49
Persentase penduduk buta huruf 45 +	12,61	11,32	9,29	6,34	6,06

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Berdasarkan data tersebut terlihat terjadi penurunan persentase penduduk buta huruf berusia 15+,15-44 dan 45+ selama lima tahun dari tahun 2011 sampai 2015 oleh karena itu keterlibatan stakeholder sangat diharapkan untuk penuntasan buta aksara di Provinsi Jambi ini, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melakukan kegiatan-kegiatan penuntasan buta aksara, salah satunya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sehingga bukan saja yang sebelumnya belum melek huruf menjadi melek huruf, tapi bagaimana setelah itu dilakukan bimbingan-bimbingan serta diantarkan sampai mengikuti ujian paket A,B dan C.

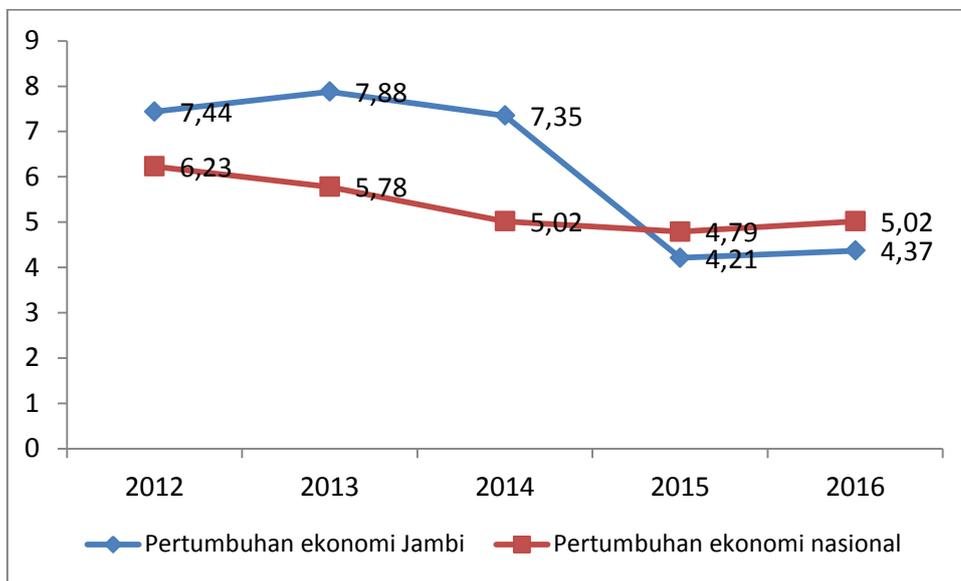
### 3.2.3 Kinerja Ekonomi

#### 3.2.3.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode waktu tahun 2012-2016 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,25 persen pertahun. Dilihat dari laju pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi Jambi jauh berada di atas

pertumbuhan ekonomi Nasional. Selama periode yang sama, pertumbuhan ekonomi nasional bahkan hanya tumbuh rata-rata kurang dari 6 persen per tahun.

Bila dirinci berdasarkan tahun, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni 7,88 persen, sementara laju pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 4.21 persen. Pertumbuhan terendah yang dicapai selama kurun waktu 2012-2016 tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Selain dikarenakan oleh faktor eksternal (kondisi ekonomi dunia yang lesu, kondisi ekonomi Indonesia yang juga mengalami penurunan, menurunnya harga minyak dunia) juga disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berlangsung selama lebih kurang empat bulan. Kondisi ini menyebabkan hasil sektor pertanian dan perkebunan mengalami penurunan drastis.



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.66 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2012 -2016

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2014 selalu berada di atas nasional, namun seiring dengan lesunya perekonomian nasional dan dunia, dua tahun terakhir pertumbuhannya selalu berada di bawah nasional walaupun memperlihatkan peningkatan dari tahun 2015 lalu, dimana pada tahun 2016 perekonomian Jambi tumbuh sebesar 4,37%, meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 4,21%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan kenaikan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalan yang pada tahun 2015 lalu mengalami kontraksi. Membaiknya kondisi cuaca menjadi faktor utama membaiknya kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2016. Sementara membaiknya kinerja sektor pertambangan didorong oleh realisasi investasi migas di Blok Tung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.72 PDRB atas Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jambi Tahun 2015-2016

No	Sektor	2015 (Rp. Miliar)	2016 (Rp. Miliar)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32.815,888	34.932,189
2	Pertambangan & penggalian	30.879,897	31.016,888
3	Industri pengolahan	13.948,830	14.267,737
4	Pengadaan Listrik dan gas	59,284	68,265
5	Pengadaan air	170,147	178,689
6	Konstruksi	8.806,044	9.156,964
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	11.836,589	12.579,058
8	Transportasi dan pergudangan	3.911,183	4.235,228
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.306,239	1.406,109
10	Informasi dan komunikasi	4.257,475	4.619,679
11	Jasa keuangan dan asuransi	2.815,828	3.108,019
12	Real estate	1.805,348	1.883,128
13	Jasa perusahaan	1.308,193	1.376,796
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.422,401	4.555,653
15	jasa pendidikan	4.033,381	4.277,115
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.398,143	1.490,994
17	jasa lainnya	1.263,844	1.347,121
	PDRB	125.038,713	130.499,632

Sumber: BPS, 2017

### 3.2.3.2 Inflasi

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Provinsi Jambi dihitung pada 2 kota/ kabupaten yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo.

Tabel 3.73 Nilai Inflasi Tahun 2012-2012 Provinsi Jambi (Kota Jambi)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi	4,22	8,74	8,72	1,37	4,51

Sumber: BPS, 2017

### 3.3 Realisasi Anggaran

Persentase realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2016 adalah sebesar 90,84% dari total anggaran yang dialokasikan. Persentase realisasi anggaran yang mendukung sasaran-sasaran strategis adalah sebesar 88,75% sedangkan program pendukung terealisasi lebih besar yaitu sebesar 99,98%. Persentase realisasi terkecil berada pada sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan realisasi terbesar berada pada sasaran terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi yang kecil adalah adanya kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pada pertengahan triwulan III sampai dengan akhir tahun, sehingga anggaran yang telah disediakan menjadi *idle cash* dan tetap terhitung sebagai besaran anggaran yang dialokasikan. Rincian realisasi anggaran tiap sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.74 Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2016

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	21.952.823.358,00	20.087.296.226,00	91,50
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	197.288.308.002,77	162.770.675.847,00	82,50
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	11.302.501.035,00	5.337.695.692,00	47,23
4	meningkatnya kualitas Pendidikan Menengah	133.033.302.050,00	118.235.333.827,00	88,88
5	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	5.455.548.600,00	4.516.232.086,00	82,78
6	Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama	2.321.596.100,00	1.100.883.353,00	47,42
7	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	2.163.582.050,00	2.034.868.050,00	94,05
8	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	2.622.244.050,00	2.464.236.679,00	93,97
9	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	22.797.236.186,00	19.091.509.424,00	83,74

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
10	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	570.150.000,00	332.016.000,00	58,23
11	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal	26.176.756.605,00	24.271.076.991,00	92,72
12	Meningkatnya Indeks Pertanaman pada lahan Tanaman Pangan	8.112.848.158,00	7.398.663.856,00	91,20
13	akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	678.596.676.100,00	668.740.857.270,00	98,55
14	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	3.647.875.600,00	2.389.483.350,00	65,50
15	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	83.457.642.600,00	82.778.592.313,00	99,19
16	meningkatkan tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan	67.076.877.300,00	37.107.534.891,00	65,50
17	Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	3.890.224.616,00	3.325.423.990,00	85,48
18	Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	7.147.268.354,00	5.318.902.768,00	74,42
19	Menurunnya angka kemiskinan	39.436.588.131,00	25.702.389.715,00	65,17
20	Menurunnya angka pengangguran	201.008.601.001,00	154.232.843.677,00	76,73
21	Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi	456.674.800,00	456.674.800,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.518.515.324.696,77</b>	<b>1.347.693.190.805,00</b>	<b>88,75</b>
<b>Belanja langsung Pendukung</b>		<b>347.161.865.494,26</b>	<b>347.097.211.678,51</b>	<b>99,98</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>1.865.677.190.191,03</b>	<b>1.694.790.402.483,51</b>	<b>90,84</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah (diolah), 2017



## BAB IV PENUTUP

*Bab IV Berisi:  
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja  
Pemerintah Provinsi Jambi*

Laporan Kinerja (LKj) merupakan pengejawantahan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Pemerintah Provinsi Jambi juga menjadi makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai Pemerintah Provinsi Jambi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2016), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2016 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai semata-mata adalah berkat kerjasama, partisipasi dan komitmen seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat yang diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga terget Jambi TUNTAS 2021 dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara umum, sebagai pelaksanaan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2016-2021, kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2016 adalah sangat baik, karena 31 indikator memenuhi kriteria sangat baik, 2 indikator memenuhi kriteria tinggi, dan hanya 1 indikator dengan kriteria rendah serta 2 indikator dengan kriteria sangat rendah. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa upaya maksimal telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPd 2016, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan yang dikenal sebagai e-planning adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/ kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk) dan penilaian akuntabilitas kinerja melalui e-sakip.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan. **Pertama**, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan sumber daya manusia seperti prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dan angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi akreditasi A. Peran Pemerintah Provinsi Jambi diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

**Kedua**, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas, kreatifitas, inovasi, dan komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kinerja yang akuntabel sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

**Ketiga**, Inovasi menjadi penting bagi pemerintah Provinsi Jambi. Perubahan-perubahan kebijakan yang tiba-tiba terutama terkait dengan penghematan anggaran, menuntut adanya inovasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga kekurangan anggaran bukan lagi menjadi persoalan yang penting yang menghambat pembanguana di Provinsi Jambi.

**Keempat**, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

# LAMPIRAN

*Lampiran Berisi:*

- *Penghargaan-Penghargaan yang diterima oleh Pemprov Jambi pada tahun 2016*
- *Perjanjian Kinerja Tahun 2016*

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2016:

- 1 Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas capaian kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015 sebagai peringkat kedua nasional, diberikan di Jakarta tanggal 7 Maret 2016.
- 2 Penghargaan Pembina keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) Tahun 2016 dari Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 18 Mei 2016 di Jakarta.
- 3 Penghargaan “BKN Award 2016” dari Kepala BKN, pada tanggal 23 Mei 2016 di Jakarta, dengan kategori sebagai berikut:
  - a. Peringkat kedua Kategori pelaksanaan elektronik pendaftaran ulang Pegawai negeri Sipil (e-PUPNS)
  - b. Peringkat ketiga kategori pelayanan pengadaan dan kepangkatan
  - c. Peringkat ketiga kategori pelayanan pensiun
- 4 Penghargaan Nirwasita Tantra 2016, yang diberikan oleh Wakil Presiden RI atas dokumen Status Lingkungan Hidup (SLHD) pada tanggal 22 Juli 2016 di Istana Siak, Riau.
- 5 Penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas perannya mendukung dan mendampingi kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- 6 Penghargaan Setia Kencana Kebaktian Sosial 2016, yang diberikan oleh Presiden RI atas pengambilan kebijakan, implementasi, inovasi dan terobosan baru bidang sosial pada tanggal 20 Desember 2016 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI**  
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Februari 2016  
GUBERNUR JAMBI

**H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
PROVINSI JAMBI**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien seiring peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Nilai SAKIP	CC
		2. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		3. Efisiensi Pengelolaan keuangan daerah	109
		4. Indeks transparansi pemerintah	6,4
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan menengah, kesadaran dan pengetahuan dalam pengembangan seni budaya serta kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	1. Angka Harapan Hidup	70,5
		2. Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	359
		3. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	34
		4. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (persen)	17
		5. Angka melanjutkan ke PT akreditasi A	43 %
		6. Tingkat kelulusan SMA dan SMK	99 %
		7. HAKI karya seni	20
		8. IPG	90
		9. IDG	62,01
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	1. Indeks Kebebasan Sipil	76
4.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) guna mendukung perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah serta	1. TFP	1,0
		2. Ketersediaan energi(kkal/kap/hari)	3.208
		3. Persentase peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanian: - IP 200	- 1,2% - 1,4%

	terwujudnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal melalui peningkatan indeks pertanaman tanaman pangan	- IP 300	
		4. Persentase share sektor sekunder terhadap PDRB	19%
5.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi, energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	1. Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	74,59
		2. Jalan dalam kondisi mantap	76,18
		3. Rasio elektrifikasi	85
		4. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	67%
		5. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73%
6.	Meningkatnya pengelolaan energi dan SDA yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal sehingga terwujud pengelolaan DAS yang berkualitas	1. Persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	6%
		2. Persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat <i>good mining practice</i>	10,5%
		3. Persentase perusahaan proper hijau	7,5%
		4. Persentase peningkatan industri ekowisata	7,5%
		5. Indeks Tata Kelola Hutan	34
		6. Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	23,1% (30.030 ha)
		7. Persentase penurunan luas lahan kritis	1% (14.206 Ha)
		8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,74
7.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta terwujudnya keserasian,	1. Angka Kemiskinan	8,35
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,0

	keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial ekonomi	3. Laju Pertumbuhan Penduduk	2,17
--	--	------------------------------	------

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Program Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan	Rp.515.148.154.800,-
2.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 69.229.847.400,-
3.	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Rp. 15.263.241.600,-
4.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 7.256.337.000,-
5.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 817.720.800,-
6.	Program Pengendalian Daya Rusak Air	Rp. 67.505.280.200,-
7.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 72.727.810.800,-
8.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp. 15.242.031.700,-
9.	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rp. 12.396.447.000,-
10.	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Rp. 10.773.525.300,-
11.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 4.861.996.000,-
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an	Rp 14.481.796.000,-
13.	Program Pengembangan Energi	Rp. 72.745.506.300,-
14.	Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan	Rp. 3.663.340.800,-
15.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 25.577.517.500,-
16.	Program Pendidikan Menengah	Rp.106.876.512.715,-
17.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp. 10.432.294.820,-
18.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 24.625.267.015,-
19.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 2.420.610.000,-
20.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.373.384.000,-
21.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 821.116.700,-
22.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 65.691.808.982,-

23	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 3.331.297.097,-
24	Program Peningkatan Mutu Pelayanan KesehatanProgram Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 30.871.075.000,-
25	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Rp. 604.581.000,-
26	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Rp. 1.594.387.200,-
27	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Rp. 4.056.880.600,-
28	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 4.665.529.000,-
29	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp. 2.943.990.600
30	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp. 1.012.937.000
31	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp. 1.180.832.740
32	Program Penataan Struktur Industri	Rp. 903.215.000,-
33	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 1.122.157.000,-
34	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 336.004.000,-
35	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 803.237.600,-
36	Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rp. 6.346.516.000,-
37	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rp. 22.358.118.000,-
38	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan	Rp. 1.541.910.000,-
39	Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Rp.12.285.987.000,-
40	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Rp. 926.011.205,-
41	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Rp. 10.459.463.800,-
42	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp. 5.497.178.500,-
43	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp. 2.476.724.558,-
44	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Rp. 3.189.837.500,-
45	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 2.570.983.930,-
46	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp. 2.253.117.880,-
47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp. 1.175.000.000,-
48	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp. 6.745.726.200,-
49	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Rp. 403.755.200,-
50	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber	Rp. 403.755.200,-

	Daya Alam		
51	Program Peningkatan kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp.	1.878.249.400,-
52	Program Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	Rp.	700.000.000,-
53	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp.	11.929.195.100,-
54	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.	6.308.888.000,-
55	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Rp.	330.069.900,-
56	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp.	3.203.646.100,-
57	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh	Rp.	1.367.401.200,-
58	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.	1.270.436.700,-
59	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp.	806.606.200,-
60	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp.	2.387.637.000,-
61	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	700.000.000,-
62	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp.	428.753.000,-
63	Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	1.798.279.500,-
64	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Rp.	6.346.516.000,-

Jambi, Februari 2016

**GUBERNUR JAMBI**

**H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI**

